



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR 3 TAHUN 2021

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 - 2026



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



| TAHUN 2021



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penjabaran visi, misi serta program Bupati Labuhanbatu Utara untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

- Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, danRencanaKerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 100 Tahun 2018 tentangPenerapanStandarPelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 70 Tahun 2019 tentangSistemInformasiPemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 26. Peraturan Daerah KabupatenLabuhanbatu Utara

Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 54);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 84);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
11. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
18. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik

tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 – 2026, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kerja Bupati dan Wakil Bupati berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai fungsi :

- a. sebagai acuan resmi penyusunan RKPD untuk seluruh Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan program serta kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah secara terpadu, terarah dan terukur;
- b. sebagai acuan resmi Bupati melalui Kepala Bappeda dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah.

Pasal 5

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Klimatologi
 - 2.1.3 Hidrologi
 - 2.1.4 Geologi
 - 2.1.5 Tata Guna Lahan
 - 2.2 Demografi
 - 2.2.1 Jumlah Penduduk
 - 2.2.2 Kepadatan Penduduk
 - 2.2.3 Komposisi Penduduk
 - 2.2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- 2.2.5 Aspek Pelayanan Umum
- 2.2.6 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1 Kerangka Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2 Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2 Analisis Pembiayaan
- 3.3 Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020-2024

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021-2026

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan
- 6.2 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026 dan pedoman penyusunan RKPD.

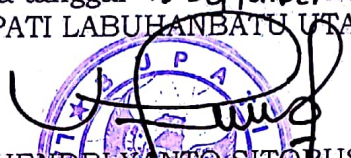
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

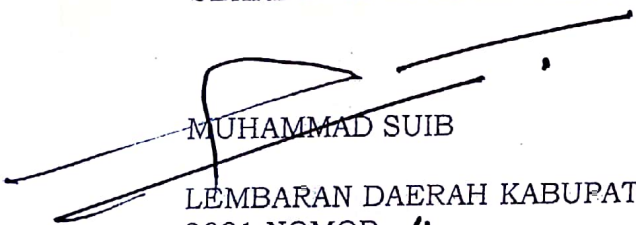
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 15 September 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA,


HENDRI YANTO SITORUS



Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 15 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,


MUHAMMAD SUIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3 / 116 / 2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 berisi visi, misi, strategi, kebijakan, program kepala daerah dan program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan pendanaan pembangunan yang dirumuskan sebagai pedoman perencanaan pembangunan bagi semua pihak di Kabupaten Labuhanbatu Utara selama kurun lima tahun ke depan.

Penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui rangkaian proses kegiatan (Konsultasi publik dan musrenbang RPJMD) dengan substansi yang diperoleh dari masukan dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pemangku kepentingan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, topdown-bottom up.

Demikian Penyusunan Dokumen ini kami sampaikan, atas kerjasama semua pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Aekkanopan, 2021

Tim Penyusun

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	1-5
1.4 Maksud dan Tujuan	1-9
1.5 Sistematika Penulisan	1-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	2-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	2-1
2.1.2 Topografi	2-10
2.1.3 Klimatologi	2-12
2.1.4 Hidrologi	2-12
2.1.5 Geologi	2-13
2.1.6 Tata Guna Lahan	2-15
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana	2-21
2.2 Demografi	2-26
2.2.1 Jumlah Penduduk.....	2-26
2.2.2 Kepadatan Penduduk.....	2-27
2.2.3 Komposisi Penduduk.....	2-29
2.2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-30
2.2.5 Aspek Pelayanan Umum	2-53
2.2.6 Aspek Daya Saing Daerah.....	2-66
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-1

3.1.1	Kerangka Pelaksanaan APBD	3-2
3.1.2	Neraca Daerah.....	3-12
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-17
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	3-18
3.2.2	Analisis Pembiayaan	3-19
3.3	Kerangka Pendanaan	3-22
3.3.1	Proyeksi Pendapatan Dan Belanja.....	3-22
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	3-29
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1	Permasalahan Pembangunan	4-1
4.2	Isu Strategis.....	4-3
4.2	Isu - isu Strategis berdasarkan Analisis permasalahan.....	4-9
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	
5.1	Visi.....	5-1
5.2	Misi.....	5-1
5.3	Tujuan dan Sasaran	5-2
5-4	Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara	5-14
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	6-2
6.2	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026	6-9
6.2.1	Arah Kebijakan Tahun Transisi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2021)	6-12
6.2.2	Arah Kebijakan Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2022)	6-12
6.2.3.	Arah Kebijakan Tahun Kedua RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2023)	6-12

6.2.4. Arah Kebijakan Tahun Ketiga RPJMD	
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2024)	6-13
6.2.5. Arah Kebijakan Tahun Keempat RPJMD	
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2025).....	6-13
6.2.6. Arah Kebijakan Tahun Kelima RPJMD	
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2026)	6-13
6.3. Program Pembangunan Daerah	6-14
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	7-1
7.2 Program Perangkat Daerah	7-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
8.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten	
labuhanbatu Utara	8-1
8.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten	
Labuhanbatu Utara	8-2
8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap	
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	8-3
BAB IX PENUTUP	

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-2
Tabel 2.2.	Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020	2-6
Tabel 2.3	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan 2020	2-6
Tabel 2.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Desa/Kelurahan 2020.....	2-7
Tabel 2.5	Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020	2-8
Tabel 2.6	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020	2-11
Tabel 2.7	Luas Lahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Menurut Kemiringan Lahan.....	2-11
Tabel 2.8	Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Setiap Bulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.....	2-12
Tabel 2.9	Aliran Sungai di Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-13
Tabel 2.10	Jenis Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dirinci Per Kecamatan	2-14
Tabel 2.11	Banyaknya Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.....	2-26
Tabel 2.12	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020	2-27
Tabel 2.13	Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamindi Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020	2-29
Tabel 2.14	PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020	2-32
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020	2-33

Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2016 – 2020	2-35
Tabel 2.17	PDRB Per Kapita ADHB & ADHK Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-36
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara Dibanding Kabupaten Sekitar dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020	2-37
Tabel 2.19	Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 – 2020	2-38
Tabel 2.20	Indikator Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015-2019	2-40
Tabel 2.21	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Utara Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 – 2020	2-40
Tabel 2.22	Perkembangan IPM/HDI Kab.Labuhanbatu Utara, Provinsi SUMUT dan Nasional Tahun 2015– 2020	2-41
Tabel 2.23	Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-46
Tabel 2.24	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-47
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Utara Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 – 2020.....	2-50
Tabel 2.26	Jumlah Gedung, Grup Dan Kegiatan Kesenian di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-51
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-54
Tabel 2.28	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-55

Tabel 2.29	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020 (Km).....	2-58
Tabel 2.30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-58
Tabel 2.31	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019	2-59
Tabel 2.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-60
Tabel 2.33	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-61
Tabel 2.34	Jumlah Stasiun Kereta Api dan Terminal Bis Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-62
Tabel 2.35	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015- 2019	2-62
Tabel 2.36	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015-2019	2-63
Tabel 2.37	Luas Panen, Produksi Padi di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-64
Tabel 2.38	Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015-2019.....	2-65
Tabel 2.39	Data penilaian SAKIP Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021	2-65
Tabel 2.40	Angka Konsumsi RT Per Kapita di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-66
Tabel 2.41	Jumlah Konsumsi RT Non Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-67
Tabel 2.42	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-67
Tabel 2.43	Data Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020.....	2-68
Tabel 2.44	Data Persentase Irigasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-70
Tabel 2.45	Persentase Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-72

Tabel 2.46	Capaian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-75
Tabel 2.47	Capaian Program Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-77
Tabel 2.48	Capaian Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-79
Tabel 2.49	Capaian Program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-81
Tabel 2.50	Capaian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-83
Tabel 2.51	Capaian Program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-85
Tabel 2.52	Capaian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-87
Tabel 2.53	Capaian Program Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-89
Tabel 2.54	Capaian Program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-91
Tabel 2.55	Capaian Program Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-93
Tabel 2.56	Capaian Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-95
Tabel 2.57	Capaian Program Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-98
Tabel 2.58	Capaian Program Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-100
Tabel 2.59	Capaian Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-102
Tabel 2.60	Capaian Program Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-104
Tabel 2.61	Capaian Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-106
Tabel 2.62	Capaian Program Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-108

Tabel 2.63	Capaian Program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-110
Tabel 2.64	Capaian Program Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-112
Tabel 2.65	Capaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-115
Tabel 2.66	Capaian Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-117
Tabel 2.67	Capaian Program Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-119
Tabel 2.68	Capaian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-121
Tabel 2.69	Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-124
Tabel 2.70	Capaian Program Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-126
Tabel 2.71	Capaian Program Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-128
Tabel 2.72	Capaian Program Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-130
Tabel 2.73	Capaian Program Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-132
Tabel 2.74	Capaian Program Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-134
Tabel 2.75	Capaian Program Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-136
Tabel 2.76	Capaian Program Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-138
Tabel 2.76	Capaian Program Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-140
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	3-4
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	3-9
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	3-11

Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020	3-13
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	3-19
Tabel 3.6	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	3-19
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	3-20
Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	3-21
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026.....	3-23
Tabel 3.10	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026.....	3-26
Tabel 3.11	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	3-29
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara	4-1
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	5-5
Tabel 5.2	Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	5-17
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	6-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	6-11
T-C.15	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	7-2
Tabel 8.1	penetapan Indikator Kinerja Makro	8-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator kinerja Utama	8-5

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.....	2-3
Gambar 2.2	Peta Orientasi Kabupaten Labuhanbatu Utara Terhadap Provinsi Sumatera Utara.....	2-4
Gambar 2.3	Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-5
Gambar 2.4	Peta Indeks Rawan Bencana Provinsi Sumatera Utara.....	2-22
Gambar 2.5	Peta Daya Dukung Daya Tampung Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2-23
Gambar 2.6	Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020.....	2-27
Gambar 2.7	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara	2-28
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020	2-30
Gambar 2.9	PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016 - 2020.....	2-34
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Gini Kab.Labuhanbatu Utara, Tahun 2016 - 2020	2-38
Gambar 2.11	Perkembangan IPM/HDI Kab.Labuhanbatu Utara, Provinsi SUMUT dan Nasional Tahun 2016-2020.....	2-41
Gambar 2.12	Angka Rata - Rata Lama Sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020	2-43
Gambar 2.13	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020	2-44
Gambar 2.14	Rasio Murid dan Guru Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020.....	2-465
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	2-46
Gambar 2.16	Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020	2-47

Gambar 2.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	2-48
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020	2-49
Gambar 2.19	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-53
Gambar 2.20	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-56
Gambar 2.21	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020	2-57
Gambar 6.1	Kinerja Pembangunan Daerah	6-1
Gambar 6.2	Agenda/Tema RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026.....	6-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Di dalam dokumen tersebut harus dapat memberikan gambaran solusi atas permasalahan yang ada Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini yang nantinya diakhir periode akan dilakukan evaluasi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Baik buruknya hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dari tahun 2021-2026 tergantung dari ketepatan dan kebijakan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu, muatan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 harus dapat menampung seluruh masukan dari Stakeholder yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sebelum menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dalam menetapkan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, terlebih dahulu telah disusun dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 dan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 41 huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 tidak serta merta berdiri sendiri, dokumen ini juga berpedoman terhadap dokumen RPJPD Kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 merupakan tahun keempat atau yang terakhir dalam penjabaran Visi Misi RPJPD Kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025. Untuk itu maka dokumen RPJMD kali ini terasa sangat spesial dalam pencapaian kinerja dalam 20 tahun RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selain keterkaitan dengan dokumen RPJPD, dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 ini disusun agar menjadi pedoman dalam penyusunan

dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD, Pemerintah Daerah akan menjabarkan Program/Kegiatan tahunan yang dimuat di dalam dokumen RKPD.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 54);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 84);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati masa bakti tahun 2021-2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 adalah “**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA MANDIRI MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025**”. Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menuju sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ; Meningkatkan ekonomi daerah; Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah; Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu, RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan tahap keempat (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan;

- b. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- c. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa masyarakat Labuhanbatu Utara;
- d. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk unggulan daerah;
- e. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk daerah lainnya dan kelembagaannya;
- f. Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja;
- g. Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan dasar yang berkualitas secara merata;
- h. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi;
- i. Meningkatnya luas persawahan yang beririgasi;
- j. Berkembangnya kawasan pendukung perdagangan dan jasa;
- k. Meningkatnya pelayanan publik.

2. RPJMD dengan RPJMN 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Pemerintah. Adapun 7 agenda pembangunan di dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang harus dicapai dan menjadi perhatian juga bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Indonesia yaitu :

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

- Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

3. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara tentunya menyesuaikan perencanaan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan capaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tidak terlepas dari hasil capaian kinerja Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, maka perlunya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara. Tidak terkecuali Kabupaten Labuhanbatu Utara, penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara juga memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari sinkronisasi perencanaan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
- b. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
- c. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
- d. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
- e. Peningkatan daya saing melalui sektor agraria dan pariwisata.

4. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015-2035

Penyusunan RPJMD juga dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW

Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ketetapan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan Kabupaten. Dengan demikian, semua program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.

5. RPJMD dengan KLHS Kabupaten Labuhanbatu Utara

KLHS merupakan sebagai *filter* dalam menjalankan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu dokumen RPJMD tidak hanya berfokus pada penggalan ekonomi namun harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan (eksternalitas).

6. RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD dibuat agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang terencana selama 5 (lima) tahun. Adapun muatan Renstra Perangkat Daerah adalah visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan. Kesemuanya hal ini dirumuskan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara dilengkapi dengan besaran dana dan sumber dana.

7. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas

program dan kegiatan serta sub kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD dimaksud merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya dokumen RPJMD adalah untuk menjembatani Visi dan Misi yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara terpilih terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang berpedoman pada regulasi terkait, kinerja masa lalu dan kemampuan keuangan daerah. Adapun tujuannya adalah :

1. Mengimplementasikan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan karakteristik dan kemampuan keuangan daerah;
2. Menjabarkan Visi, Misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026;
3. Menyediakan acuan baku bagi seluruh Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara, APBN dan sumber dana lainnya;
4. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Pemerintah;
5. Sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
6. Menciptakan iklim pemerintahan daerah yang partisipatif dan

kondusif dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten yang berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS
DAERAH**

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Labuhanbatu Utara.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Secara rinci analisis geografi daerah untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

2.1.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:

2.1.1.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi;

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada 99°25' - 100°05' BT (Bujur Timur) dan 1°58' – 2°50' LU (Lintang Utara) dengan ketinggian 0 - 700 meter diatas permukaan laut (dpl).

Kabupaten Labuhanbatu Utara menempati area seluas 354.580 Ha. Secara administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu.

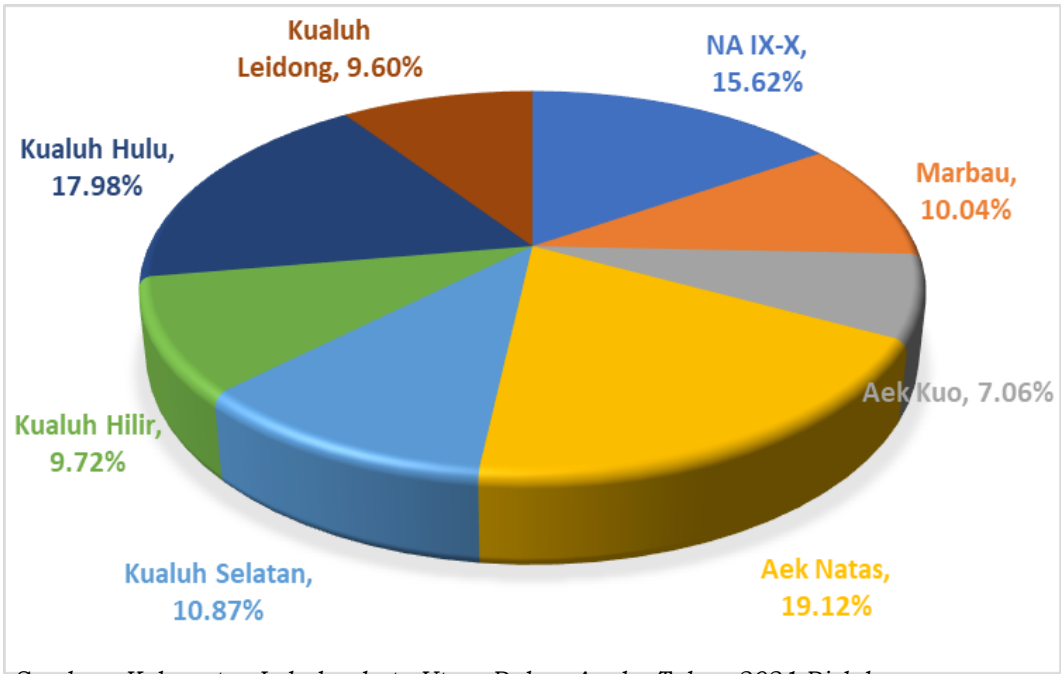
Secara administratif Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 8 (delapan) wilayah kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) desa dan 8 (delapan) kelurahan dengan luas wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada **tabel 2.1** berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NA IX-X	Aek Kota Batu	55.400	15,62
2.	Marbau	Marbau	35.590	10,04
3.	Aek Kuo	Aek Korsik	25.020	7,06
4.	Aek Natas	Bandar Durian	67.800	19,12
5.	Kualuh Selatan	Damuli	34.451	10,87
6.	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid	38.548	9,72
7.	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	63.739	17,98
8.	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	34.032	9,60
Jumlah			354.580	100,00

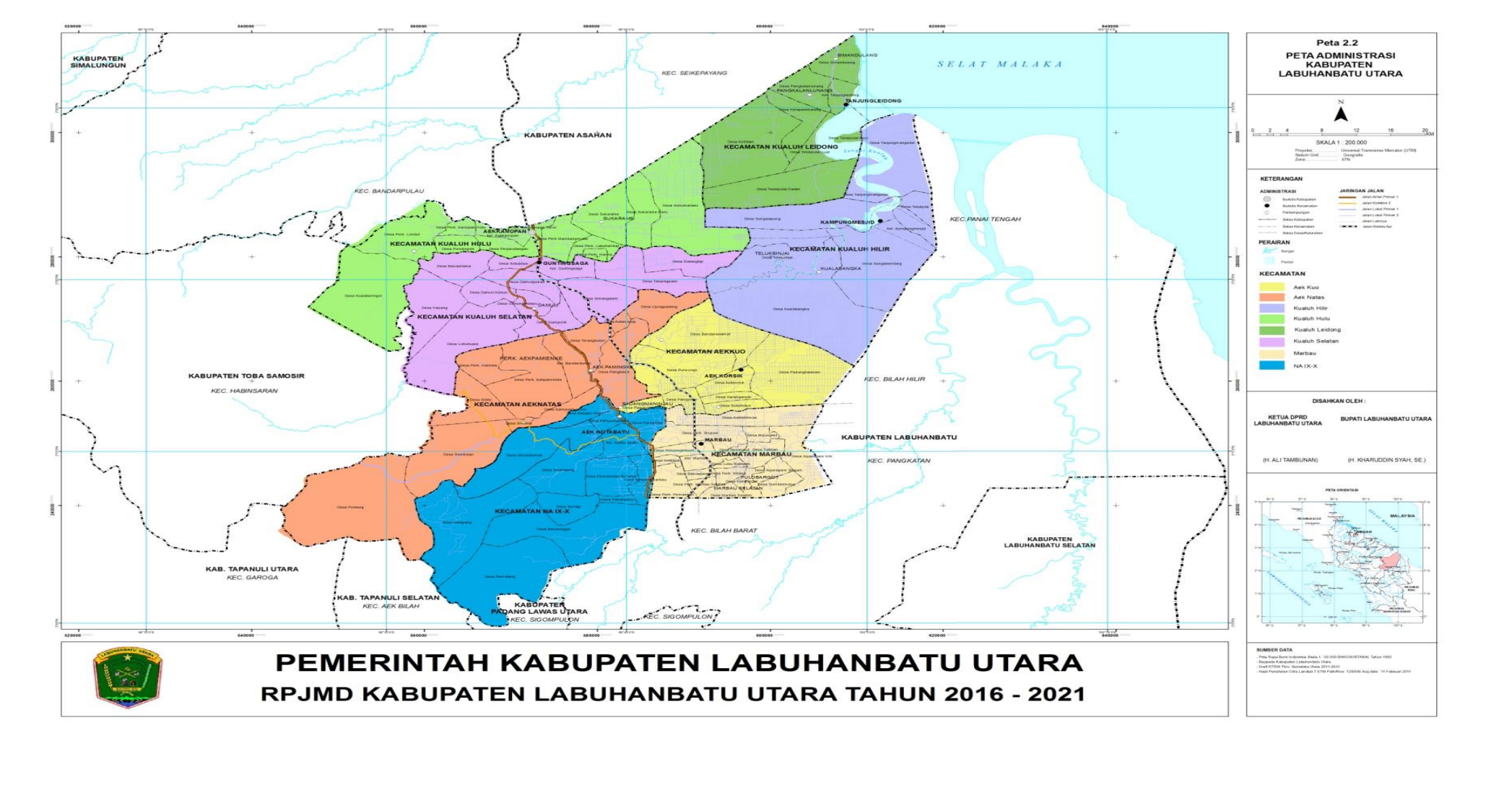
Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2020



Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021 Diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada, wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Aek Natas dengan luas areal sebesar 67.800 Ha (19,12%), sedangkan luas wilayah terkecil terdapat pada Kecamatan Aek Kuo dengan luas sebesar 25.020 Ha (7,06%). Orientasi Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada lingkup Sumatera Utara dapat dilihat pada **gambar 2.2**, sedangkan wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada **gambar 2.3** berikut ini:



Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara

WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SKALA 1 : 950 000

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

IBUKOTA

- (K) Kotamadya
- (K) Kecamatan
- (K) Kabupaten

PERAIRAN

- Sungai
- Danau
- Laut

JALURAN JALAN

- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor
- Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara

PETA ORIENTASI

SUMBER DATA

Peta Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 500 000 dan 1 : 250 000, Tahun 2008
 Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun 2010
 Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 500 000 dan 1 : 250 000, Tahun 2008
 Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 500 000 dan 1 : 250 000, Tahun 2008
 Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 500 000 dan 1 : 250 000, Tahun 2008

Bila dilihat dari jumlah desa, yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Marbau yaitu 17 (tujuh belas) desa, sedangkan kelurahan dan lingkungan terbanyak di wilayah Kecamatan Kualuh Hulu yaitu sebanyak 2 (dua) kelurahan dan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lingkungan dan wilayah yang memiliki jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Kualuh Selatan sebanyak 114 (seratus empat belas) dusun. Jumlah desa/kelurahan per kecamatan dapat dilihat pada **tabel 2.2** dibawah ini:

Tabel 2.2
Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun
Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingkungan	Dusun
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NA IX-X	12	1	7	86
2.	Marbau	17	1	5	101
3.	Aek Kuo	8	-	-	50
4.	Aek Natas	11	1	10	74
5.	Kualuh Selatan	11	1	14	114
6.	Kualuh Hilir	6	1	9	58
7.	Kualuh Hulu	11	2	33	105
8.	Kualuh Leidong	6	1	14	45
Total		82	8	92	633

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Menurut jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota Kabupaten, kecamatan yang memiliki jarak paling jauh adalah kecamatan yang terletak di kawasan pantai yaitu Kecamatan Kualuh Leidong sejauh 87 Km dan jarak yang paling terdekat adalah Kecamatan Kualuh Hulu sejauh 2 Km. Jarak kecamatan ke Ibu kota Kabupaten dapat dilihat pada **tabel 2.3** dibawah ini

Tabel 2.3
Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan 2020

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan (KM)
	(1)	(2)	(3)
1.	NA IX-X	Aek Kota Batu	42
2.	Marbau	Marbau	53

3.	Aek Kuo	Aek Korsik	57
4.	Aek Natas	Bandar Durian	34
5.	Kualuh Selatan	Damuli	12
6.	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid	57
7.	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	2
8.	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	87

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Menurut perkembangannya, desa dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan yaitu desa swadaya, swakarsa dan swasembada. Menurut KBBI, desa swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena tarif pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Desa swakarya memiliki pengertian desa yang sudah agak longgar adat-istiadatnya karena pengaruh luar, mengenai teknologi pertanian, dan taraf pendidikan warganya relatif tinggi dibandingkan desa swadaya. Sedangkan desa swasembada desa yang lebih maju dari pada desa swakarya dan tidak terikat oleh adat-istiadat. Untuk lebih jelasnya lihat **tabel 2.4** berikut :

Tabel 2.4
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Klasifikasi
Desa/Kelurahan 2020

No.	Kecamatan	Swadaya	Swakarsa	Swasembada	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NA IX-X	-	-	13	13
2.	Marbau	-	-	18	18
3.	Aek Kuo	-	-	8	8
4.	Aek Natas	-	-	12	12
5.	Kualuh Selatan	-	-	12	12
6.	Kualuh Hilir	-	-	7	7
7.	Kualuh Hulu	-	-	13	13
8.	Kualuh Leidong	-	-	7	7
2019		-	-	90	90

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Adapun Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada **tabel 2.5** berikut:

Tabel 2.5
Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM	Status IDM
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Na IX – X	Meranti Omas	0.6549	Berkembang
2	Na IX – X	Simpang Marbau	0.7392	Maju
3	Na IX – X	Bangun Rejo	0.5694	Tertinggal
4	Na IX – X	Batu Tunggal	0.6835	Berkembang
5	Na IX – X	Pulo Jantan	0.6871	Berkembang
6	Na IX – X	Kampung Pajak	0.7	Berkembang
7	Na IX – X	Pematang	0.497	Tertinggal
8	Na IX – X	Pasang Lela	0.6946	Berkembang
9	Na IX – X	Sei Raja	0.6049	Berkembang
10	Na IX – X	Silumajang	0.7037	Berkembang
11	Na IX – X	Perkebunan Berangir	0.6835	Berkembang
12	Na IX – X	Hatapang	0.4933	Tertinggal
13	Kualuh Hilir	Kuala Bangka	0.5625	Tertinggal
14	Kualuh Hilir	Teluk Piai	0.5302	Tertinggal
15	Kualuh Hilir	Tanjung Mangedar	0.567	Tertinggal
16	Kualuh Hilir	Sungai Sentang	0.5481	Tertinggal
17	Kualuh Hilir	Teluk Binjai	0.5506	Tertinggal
18	Kualuh Hilir	Sungai Apung	0.5854	Tertinggal
19	Aek Kuo	Bandar Selamat	0.7035	Berkembang
20	Aek Kuo	Purworejo	0.6171	Berkembang
21	Aek Kuo	Padang Maninjau	0.6051	Berkembang
22	Aek Kuo	Sidomulyo	0.6686	Berkembang
23	Aek Kuo	Aek Korsik	0.7283	Maju
24	Aek Kuo	Karang Anyar	0.5713	Tertinggal
25	Aek Kuo	Perkebunan Panigoran	0.5892	Tertinggal
26	Aek Kuo	Perkebunan Padang Halaban	0.56	Tertinggal
27	Kualuh	Air Hitam	0.6457	Berkembang

	Leidong			
28	Kualuh Leidong	Simandulang	0.5617	Tertinggal
29	Kualuh Leidong	Teluk Pulau Luar	0.609	Berkembang
30	Kualuh Leidong	Pangkalan Lunang	0.5529	Tertinggal
31	Kualuh Leidong	Kelapa Sebatang	0.5932	Tertinggal
32	Kualuh Leidong	Teluk Pulau Dalam	0.5538	Tertinggal
33	Marbau	Perkebunan Pernantian	0.5714	Tertinggal
34	Marbau	Perkebunan Marbau Selatan	0.6254	Berkembang
35	Marbau	Babussalam	0.607	Berkembang
36	Marbau	Marbau Selatan	0.6019	Berkembang
37	Marbau	Sumber Mulyo	0.6333	Berkembang
38	Marbau	Sipare - Pare Hilir	0.6033	Berkembang
39	Marbau	Pulo Bargot	0.5765	Tertinggal
40	Marbau	Bulunghilit	0.6403	Berkembang
41	Marbau	Sipare - Pare Tengah	0.6159	Berkembang
42	Marbau	Tubiran	0.6389	Berkembang
43	Marbau	Perkebunan Milano	0.6051	Berkembang
44	Marbau	Perkebunan Brussel	0.6646	Berkembang
45	Marbau	Aek Hitetoras	0.6498	Berkembang
46	Marbau	Belongkut	0.5614	Tertinggal
47	Marbau	Lobu Rampah	0.4973	Tertinggal
48	Marbau	Simpang Empat	0.6371	Berkembang
49	Marbau	Aek Tapa	0.6044	Berkembang
50	Kualuh Selatan	Gunung Melayu	0.7035	Berkembang
51	Kualuh Selatan	Damuli Kebun	0.7149	Maju
52	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	0.6522	Berkembang
53	Kualuh Selatan	Siamporik	0.5662	Tertinggal
54	Kualuh Selatan	Lobu Hala	0.636	Berkembang
55	Kualuh Selatan	Sidua Dua	0.7463	Maju
56	Kualuh Selatan	Bandar Lama	0.5852	Tertinggal
57	Kualuh Selatan	Hasang	0.5887	Tertinggal
58	Kualuh Selatan	Simangalam	0.5075	Tertinggal
59	Kualuh Selatan	Tanjung Pasir	0.6313	Berkembang
60	Kualuh Selatan	Sialang Taji	0.5711	Tertinggal

61	Kualuh Hulu	Kuala Beringin	0.5583	Tertinggal
62	Kualuh Hulu	Londut	0.7248	Maju
63	Kualuh Hulu	Pulo Dogom	0.6689	Berkembang
64	Kualuh Hulu	Perkebunan Kanopan Ulu	0.6578	Berkembang
65	Kualuh Hulu	Parpaudangan	0.6778	Berkembang
66	Kualuh Hulu	Perkebunan Membang Muda	0.6484	Berkembang
67	Kualuh Hulu	Perkebunan Labuhan Haji	0.7479	Maju
68	Kualuh Hulu	Perkebunan Hanna	0.6987	Berkembang
69	Kualuh Hulu	Sukarame	0.6781	Berkembang
70	Kualuh Hulu	Sukarame Baru	0.6608	Berkembang
71	Kualuh Hulu	Sonomartani	0.6924	Berkembang
72	Aek Natas	Terang Bulan	0.6362	Berkembang
73	Aek Natas	Adian Top	0.6141	Berkembang
74	Aek Natas	Ujung Pandang	0.6292	Berkembang
75	Aek Natas	Pangkalan	0.549	Tertinggal
76	Aek Natas	Kp. Yaman	0.6006	Berkembang
77	Aek Natas	Perkebunan Halimbe	0.6216	Berkembang
78	Aek Natas	Rombisan	0.4311	Tertinggal
79	Aek Natas	Sibito	0.5341	Tertinggal
80	Aek Natas	Poldung	0.5151	Tertinggal
81	Aek Natas	Simonis	0.791	Maju
82	Aek Natas	Perkebunan Aek Pamingke	0.6757	Berkembang

Sumber : Peringkat Status Indeks Desa Membangun Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2020 sebesar 0,2603 yang berarti rata-rata desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan desa berkembang. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 7 (tujuh) desa yang termasuk kategori maju, 45 (empat puluh lima) desa yang termasuk kategori berkembang dan 30 (tiga puluh) yang termasuk kategori desa tertinggal Hingga Tahun 2020, Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memiliki desa yang termasuk kategori mandiri dan tidak memiliki desa yang termasuk kategori tertinggal.

2.1.2 Topografi

Menurut ketinggian tanahnya, Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan. Wilayah yang terletak pada ketinggian 0 - 10 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 54.844 Ha (15,47%), 11 - 25 meter diatas permukaan laut

(dpl) seluas 124.212 Ha (35,03%), 26 - 100 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 61,949 Ha (17,47%) dan lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 104.859 Ha (29,57%) dan 8.716 Ha (2,46%) merupakan sungai.

Tabel 2.6
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (M)
	(1)	(2)
1.	NA IX-X	0 – 500
2.	Marbau	45
3.	Aek Kuo	0 – 20
4.	Aek Natas	20 – 700
5.	Kualuh Selatan	22
6.	Kualuh Hilir	0 – 5
7.	Kualuh Hulu	22
8.	Kualuh Leidong	0 – 5

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Pada umumnya kelerengan di wilayah ini didominasi oleh kelerengan 0 - 2% yaitu mencapai 71,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Labuhanbatu Utara (lihat **Tabel 2.7.**) Keadaan lereng ini sangat potensial untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian, perkebunan dan perikanan. Lahan dengan kemiringan > 40% terutama terdapat di bagian barat Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemekaran sehingga wilayah ini harus diarahkan untuk kawasan lindung dan dilarang dikembangkan untuk budidaya pertanian.

Tabel 2.7
Luas Lahan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Menurut Kemiringan Lahan

No.	Kelas Lereng	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3)
1	0-2%	253.514	71.50
2	2-15%	53.928	15.21
3	15-20%	23.511	6.63
4	20-40%	16.733	4.72
5	>40%	6.894	1.94
Jumlah		354.580	100,00

Sumber : RTRW, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun 2015-2035

2.1.3 Klimatologi

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan. Dari tabel dibawah menerangkan bahwasannya volume curah hujan banyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 590 mm. Jumlah hari hujan juga paling banyak terjadi di bulan November dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.8** berikut:

Tabel 2.8
Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Setiap Bulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

No.	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
	(1)	(2)	(3)
1.	Januari	8	144
2.	Februari	8	147
3.	Maret	8	181
4.	April	14	232
5.	Mei	17	234
6.	Juni	8	85
7.	Juli	15	228
8.	Agustus	14	136
9.	September	16	529
10.	Oktober	19	402
11.	November	23	590
12.	Desember	15	338

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

2.1.4 Hidrologi

Dari aspek hidrologi, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki banyak sungai baik sungai besar/utama maupun sungai kecil. Tercatat ada 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Kualuh dan Sungai Leidong dengan lebar antara 16 - 250 m, yang memiliki 35 (tiga puluh lima) sungai kecil sebagai anak sungai/cabang. Muara ke 4 (empat) sungai utama tersebut adalah Selat Malaka dengan debit rata-rata 22 - 47 m³/det.

Kabupaten Labuhanbatu Utara hanya dilewati satu daerah

aliran sungai (DAS) yaitu DAS Kualuh meliputi Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Aek Natas, Aek Kuo, Marbau, Na IX-X, Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong.

Tabel 2.9

Aliran Sungai di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Nama Sungai	Luas (Km²)	Kecamatan	Panjang (m)	Lebar (m)	Debit Air
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sungai Kualuh	14,39	Kualuh Hulu, Kualuh Hilir, dan Kualuh Leidong	143.864	100	5 lt/det
2.	Sungai Pamengke	3,21	Aek Natas	53.444	60	5 lt/det
3.	Sungai Marbau	2,59	Na. IX-X, Marbau	43.094	60	5 lt/det
4.	Sungai Air Hitam	1,38	Kualuh Hulu, Kualuh Leidong	34.593	40	5 lt/det
5.	Sungai Simangalam	0,08	Kualuh Selatan	3.769	20	5 lt/det
6.	Sungai Kuo	0.95	Aek Kuo, Kualuh Hilir	18.996	50	5 lt/det
7.	Sungai Peranganan	0.57	Kualuh Hulu, Kualuh Hilir	19.160	30	5 lt/det

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

2.1.5 Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Labuhanbatu Utara secara umum didominasi oleh tekstur tanah halus seluas 233.719 Ha (65,91%), tekstur tanah sedang seluas 112.145 Ha (31,63%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Wilayah dengan kedalaman efektif antara 30-60 cm mencapai 117.965 Ha (33,27%), kedalaman 60-90 cm mencapai 27.529 Ha (7,76%), lebih dari 90 cm seluas 102.686 Ha (28,96%), lahan gambut seluas 70.926 Ha (20%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Untuk kondisi geologi berdasarkan jenisnya wilayah Labuhanbatu Utara terdiri dari Alluvial seluas 84.782 Ha (23,91%), Pasir Kerakal seluas 53.909 Ha (15,20%), Batu Pasir, Batu Lanau dan Batu Lampung seluas 6.745 Ha (1,90%), Batu Lempung, Batu Pasir, Konglemerat seluas 27.742 Ha (7,82), Formasi Kuala seluas 33.386 Ha (9,42%), Formasi Bahorok seluas seluas 30.150 Ha (8,50%), Tuta Toba Riodasit seluas 100.117 Ha (28,24%), Kegiatan

Miosen seluas 4.398 Ha (1,24%), Batuan Intrusip Pratersier seluas 4.635 Ha (1,31%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Sedangkan menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri atas 7 (tujuh) jenis, yaitu: podsolik kuning, organosol, podsolik merah kekuningan, litosol/podsolik regosol, aluvial regosol organosol, hidromorfik kelabu gley humus regosol dan podsolik coklat kekuningan. Jenis tanah yang dominan di wilayah ini adalah organosol, litosol/pedsolik regosol dan podsolik merah kekuningan masing-masing dengan luas 83,387Ha (23,52%), 81.350 Ha (22,94%) dan 75,155 Ha (21,2%). Untuk lebih jelasnya tentang jenis tanah di Kabupaten Labuhanbatu Utara lihat **tabel 2.10** berikut:

Tabel 2.10
Jenis Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dirinci Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Podsolik Kuning	Organosol	Podsolik Merah Kekuningan	Litosol/ Podsolik Regosol	Aluvial Regosol Organosol	Hidromorphik Kelabu Gley Humus Regosol	Podsolik Coklat Kekuningan
1.	NA IX-X	4.308	0	25.516	25.576	0	0	0
2.	Marbau	11.822	7.499	4.673	0	13.896	11.822	0
3.	Aek Kuo	2.250	11.248	0	0	0	11.523	0
4.	Aek Natas	3.723	0	8.697	45.840	0	9.541	0
5.	Kualuh Selatan	0	392	18.842	9.467	0	5.557	193
6.	Kualuh Hilir	0	24.693	0	0	13.236	620	0
7.	Kualuh Hulu	0	11.477	17.428	468	0	17.906	16.461
8.	Kualuh Leidong	0	28.078	0	0	5.954	0	0
Total		22.101	83.387	75.155	81.350	33.085	56.968	16.654

Sumber : RTRW, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun 2015-2035

2.1.6 Tata Guna Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis di sesuaikan dengan Rencana RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2.1.6.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan SK.579/Menhut-II/2014. Kawasan lindung di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari :

- Kawasan hutan lindung disusun berdasarkan pada penetapan kawasan hutan yang berlaku yang menyebar di wilayah Kabupaten lebih kurang seluas 41.240 Ha (empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh hektar).
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air, dimana pengembangan kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Aek Natas, dan Kecamatan NA IX-X.
- Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar bendungan/waduk/situ, mata air dan Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan. Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan setempat meliputi :
 - a. Kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah Kabupaten yaitu sepanjang Kecamatan Kualuh Leidong - Kecamatan Kualuh Hilir ditetapkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi.
 - b. Kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi seluruh sungai yaitu :
 - Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman.
 - 10-15 meter di dalam kawasan permukiman yang cukup untuk membuat jalan inspeksi; dan
 - Lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik.

- c. Kawasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang menyebar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Adapun Rencana pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yaitu :
 - a. Kawasan Cagar Alam, meliputi Cagar Alam Sei Leidong yang terletak di perbatasan Kecamatan Kualuh Leidong, Kualuh Hulu dan Kualuh Hilir, seluas kurang lebih 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar.
 - b. Kawasan Cagar Budaya meliputi :
 - Kawasan makam penjar agama Islam yang berada di Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong;
 - Kawasan makam Tengku Raden di Desa Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu;
 - Kawasan Kerajaan Poldung di Desa Poldung di Kecamatan Aek Natas
 - c. Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir.
 - d. Cagar Budaya dan Pantai Berhutan Bakau. Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di Kec. Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir.

2.1.6.2 Kawasan budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budi daya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budi daya Provinsi dan Kabupaten. Kawasan budidaya di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi ;
 - a. Hutan produksi terbatas seluas 38.202 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua) hektar, terdapat di Kecamatan Aek

Natas, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Selatan, dan di Kecamatan NA IX- X.

- b. Hutan produksi tetap terluas 19.114 (sembilan belas ribu seratus empat belas) hektar terdapat di Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Kualuh Selatan, dan Kecamatan Aek Kuo.
- c. Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.796 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar. Terdapat di Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong.

2. Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan memiliki seluas kurang lebih 153.516 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam belas) hektar, meliputi: Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Marbau, dan Kecamatan NA IX-X.

3. Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Labuhanabatu Utara antara lain :

- a. Tanaman pangan (lahan basah) seluas kurang lebih 30.031 (tiga puluh ribu tiga puluh satu) hektar, meliputi : Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hulu
- b. Holtikultura (lahan kering) seluas kurang lebih 35.442 (tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua) hektar, meliputi : Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Marbau dan Kecamatan NA IX-X.

4. Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten

Labuhanbatu Utara meliputi:

- a. Perikanan tangkap; dan
- b. Perikanan budi daya.

Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap di pantai timur Kabupaten meliputi PPI Labuhanbatu Utara.

5. Kawasan peruntukan pertambangan;

Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten labuhanabatu Utara, meliputi:

- a. Batubara, terdapat di Kecamatan Kualuh Selatan dan Kecamatan Kualuh Hulu;
- b. Minyak bumi dan gas, terdapat di Kecamatan Marbau dan Aek Kuo.

6. Kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas kurang lebih 509 (lima ratus sembilan) hektar berada di Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, terdiri atas:

- a. Industri besar;
- b. Industri sedang; dan
- c. Industri rumah tangga.

7. Kawasan peruntukan pariwisata;

- a. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi : pengembangan Objek Wisata Air Terjun Aek Sordang, terletak di Desa Pulau Dogom Kecamatan Kualuh Hulu;
- b. Pengembangan Objek Wisata Pulau Santai Sei Kualuh, terletak di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan;
- c. Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Hatapang, terletak di Desa Hatapang Kecamatan NA IX-X.
- d. Pengembangan Objek Wisata Pemandian Aek Kota Batu, terletak di Desa Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X;
- e. Pengembangan Objek Wisata Aek Buru, terletak di

Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X;

- f. Pengembangan Objek Wisata Aek Momom, Aek Rindu, Aek Tombus, terletak di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu;
- g. Pengembangan Objek Wisata Pantai Sungai Pulau Diski terletak di Desa Simonis Kecamatan Aek Natas;
- h. Sungai Lubuk Lambung yang terletak di Desa Hasang Kecamatan Kualuh Selatan;
- i. Hagap Tahunan Gunting Saga terletak di Sungai Kualuh Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan.
- j. Kawasan peruntukan pariwisata tidak mutlak karena tidak efektif, kecuali bermanfaat dan ekonomis dan dapat menjadi sumber PAD.

8. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan Permukiman di Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki luas kurang lebih 11.081 (sebelas ribu delapan puluh satu) hektar, terdiri atas :

a. Permukiman Perkotaan

Permukiman perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas kurang lebih 3.164 (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar, meliputi:

- Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
- Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hektar;
- Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 619 (enam ratus sembilan belas) hektar;
- Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektar;
- Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar;
- Kecamatan Marbau seluas kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektar; dan
- Kecamatan NA IX-X seluas kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) hektar.

b. Permukiman perdesaan.

Permukiman perdesaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki luas kurang lebih 7.916 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas) hektar, meliputi:

- Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar;
- Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hektar;
- Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar;
- Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) hektar;
- Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) hektar;
- Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 3.010 (tiga ribu sepuluh) hektar;
- Kecamatan Marbau seluas kurang lebih 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) hektar; dan
- Kecamatan NA IX-X seluas kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) hektar.

9. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa kawasan peruntukan pertahanan, keamanan, ketertiban masyarakat dan tertib administrasi pertanahan, meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu;
- b. Subdenpom yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu;
- c. Batalyon yang berada di Kecamatan Kualuh Selatan;
- d. Koramil yang terdapat di setiap Ibukota Kecamatan;
- e. Polsek yang terdapat di setiap Ibukota Kecamatan;
- f. BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu;
- g. Polres Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdapat di Kecamatan Kualuh Selatan atau Aek Natas;

- h. Kejaksaan yang terdapat di Kecamatan Kualuh Selatan atau Kecamatan Aek Natas;
- i. Pengadilan Negeri terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu.

2.1.6.3 Kawasan Strategis

Rencana kawasan strategis Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi:

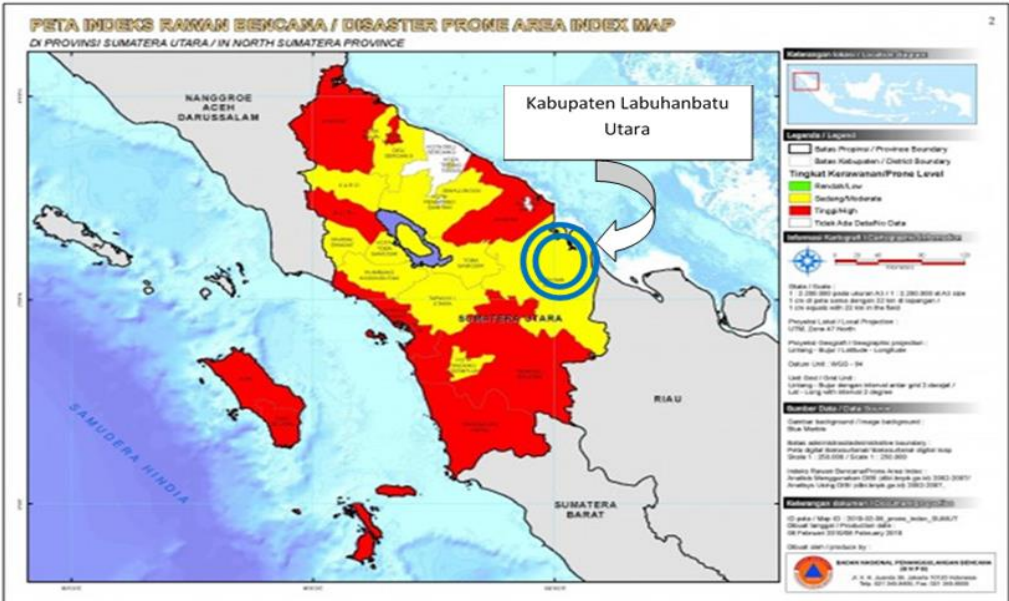
- a. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi pengembangan kawasan Ekonomi Terpadu di Kecamatan Aek Kuo dan Kecamatan Kualuh Leidong.
- b. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya meliputi kawasan Mesjid Raya Sultan Kualuh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan.
- c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan strategis lingkungan hidup berupa hutan lindung, meliputi :
 - Kecamatan Kualuh Hulu;
 - Kecamatan Kualuh Selatan;
 - Kecamatan Kualuh Leidong;
 - Kecamatan Kualuh Hilir;
 - Kecamatan Aek Natas;
 - Kecamatan NA IX-X;
 - Sepanjang DAS Kualuh; dan
 - Sepanjang pantai serta muara sungai di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir.

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peta Indeks Rawan Bencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk dalam daerah rawan bencana tingkat sedang. Adapun perbandingan daerah rawan bencana untuk kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada **Gambar 2.4** di bawah:

Gambar 2.4

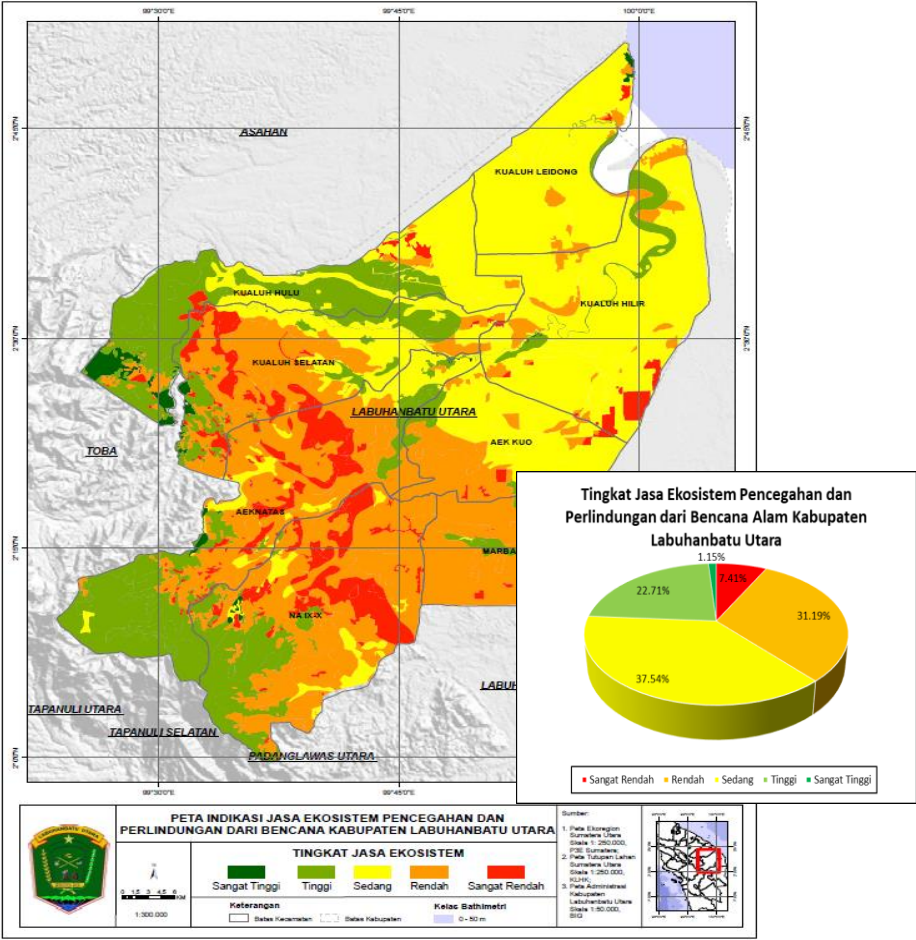
Peta Indeks Rawan Bencana Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BNPB Tahun 2018

Berdasarkan data BNPB tahun 2019, Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 151,8 yang berarti tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2019 berada pada kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah bencana sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Daya Tampung Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Labuhanbatu Utara



Sumber: Peta Ekoregion Sumatera Utara Skala 1:250.000

Berdasarkan peta daya dukung daya tampung jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana. Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi dengan daya dukung daya tampung jasa ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang rendah sebesar 37,54 persen dan daya dukung daya tampung jasa ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang sangat rendah sebesar 31,19 persen. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat dari bencana mengingat daya tampung dan daya dukung jasa ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang rendah dan Indeks resiko bencana yang tinggi. Adapaun kawasan rawan bencana di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari :

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 81.703 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 2.333 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi Desa Kuala Beringin;
- b. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 11.394 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar, meliputi:
 - 1) Desa Hasang seluas kurang lebih 4.522 (empat ribu lima ratus dua puluh dua) hektar;
 - 2) Desa Lobu Huala seluas kurang lebih 6.611 (enam ribu enam ratus sebelas) hektar;
 - 3) Desa Bandar Lama seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar; dan
 - 4) Desa Siamporik seluas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektar.
- c. Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 31.475 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar, meliputi:
 - 1) Desa Poldung seluas kurang lebih 18.867 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
 - 2) Desa Sibito seluas kurang lebih 2.877 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
 - 3) Desa Perkebunan Halimbe seluas kurang lebih 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) hektar;
 - 4) Kelurahan Bandar Durian seluas kurang lebih 483 (empat ratus delapan puluh tiga) hektar;
 - 5) Desa Perkebunan Aek Pamingke seluas kurang lebih 404 (empat ratus empat) hektar; dan
 - 6) Desa Rombisan seluas kurang lebih 7.034 (tujuh ribu tiga puluh empat) hektar.
- d. Kecamatan Na IX-X seluas kurang lebih 36.502 (tiga puluh enam ribu lima ratus dua) hektar, meliputi:
 - 1) Desa Batu Tunggal seluas kurang lebih 7.578 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar;

- 2) Desa Pematang seluas kurang lebih 11.896 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar;
- 3) Desa Hatapang seluas kurang lebih 11.322 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar;
- 4) Desa Sungai Raja seluas kurang lebih 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) hektar;
- 5) Desa Silumajang seluas kurang lebih 1.411 (seribu empat ratus sebelas) hektar; dan
- 6) Desa Meranti Omas seluas kurang lebih 2.049 (dua ribu empat puluh sembilan) hektar.

2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar, meliputi: wilayah pesisir pantai utara yakni Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir.

3. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir seluas kurang lebih 56.367 (lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 31.786 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;
- b. Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 17.153 (tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) hektar;
- c. Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar;
- d. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar;
- e. Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar; dan
- f. Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 1.607 (seribu enam ratus tujuh) hektar.

2.2 Demografi

2.2.1 Jumlah Penduduk

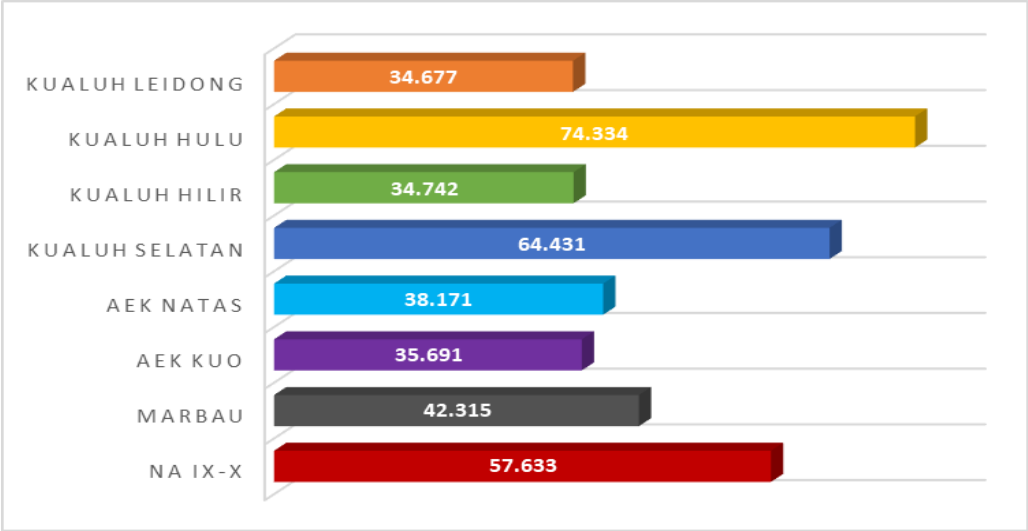
Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2020 sebanyak 381.994 jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu yaitu sebanyak 74.334 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kualuh Leidong sebanyak 34.677 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,2 dapat dilihat pada **tabel 2.11** berikut:

Tabel 2.11
Banyaknya Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penduduk (Orang)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1.	NA IX-X	57.633	15,09	104,03	102,41
2.	Marbau	42.315	11,08	118,90	100,99
3.	Aek Kuo	35.691	9,34	142,65	100,43
4.	Aek Natas	38.171	9,99	56,30	100,97
5.	Kualuh Selatan	64.431	16,87	187,02	102,17
6.	Kualuh Hilir	34.742	9,09	90,13	103,79
7.	Kualuh Hulu	74.334	19,46	116,62	101,69
8.	Kualuh Leidong	34.677	9,08	101,90	104,22
Jumlah		381.994	100	107,73	103,2

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.6
Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020



Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021 Diolah

2.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan hasil dari perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduknya. Semakin luas suatu wilayah maka kepadatan penduduknya akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya.

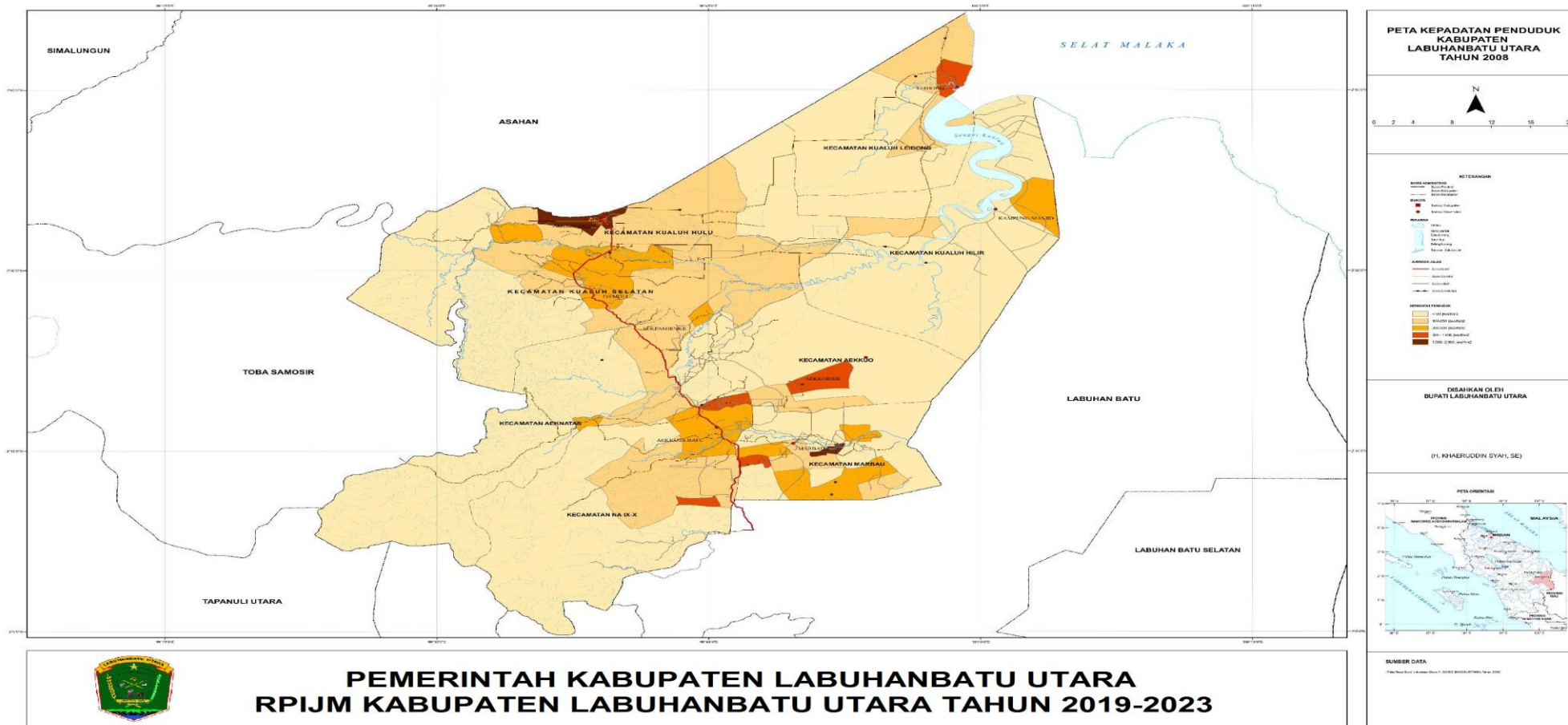
Kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2020 rata-rata sebesar 107,73 jiwa/Km², dimana kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Kualuh Hulu yaitu 116,62 jiwa/Km² dan kepadatan penduduk terkecil 56,30 jiwa/Km² di Kecamatan Aek Natas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.12** berikut:

Tabel 2.12
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1.	NA IX-X	554,00	15,62	57.633	15,09	104,03
2.	Marbau	355,90	10,04	42.315	11,08	118,90
3.	Aek Kuo	250,20	7,06	35.691	9,34	142,65
4.	Aek Natas	678,00	19,12	38.171	9,99	56,30
5.	Kualuh Selatan	344,51	10,87	64.431	16,87	187,02
6.	Kualuh Hilir	385,48	9,72	34.742	9,09	90,13
7.	Kualuh Hulu	637,39	17,98	74.334	19,46	116,62
8.	Kualuh Leidong	340,32	9,60	34.677	9,08	101,90
Jumlah		3.545,80	100,00	381.994	100	107,73

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.7
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015-2035

2.2.3 Komposisi Penduduk

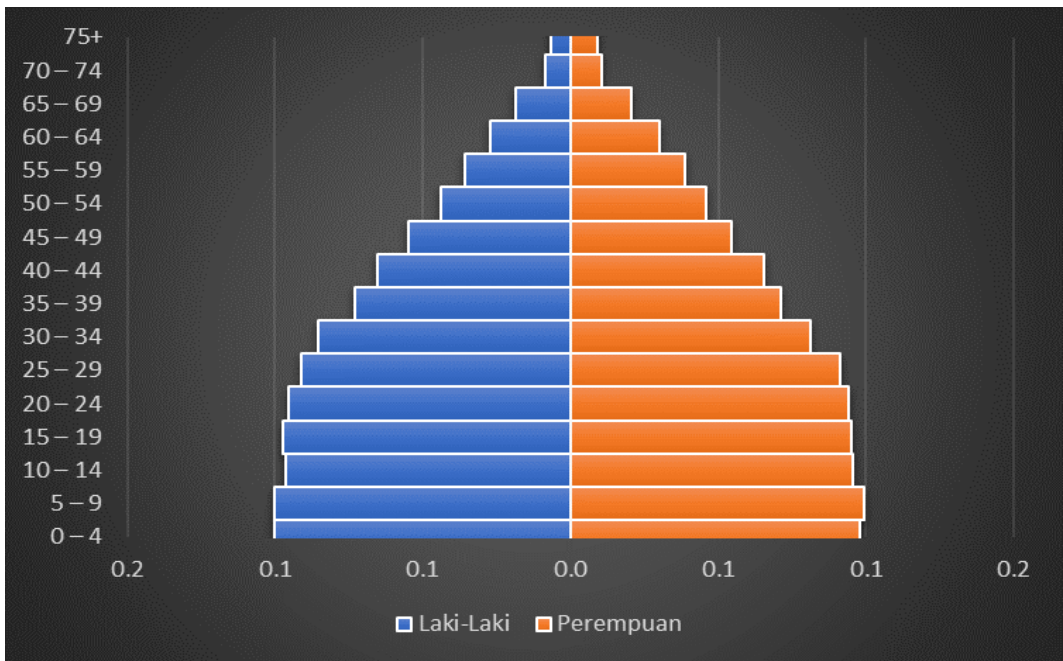
Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Pada dokumen ini, komposisi penduduk yang akan ditampilkan adalah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Penduduk menurut kelompok umur dapat dibagi menjadi 15 kelompok dengan range 4 tahun, dimulai dari kelompok umur 0-4 tahun hingga kelompok 70 tahun ke atas. Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi oleh kelompok umur 5-9 tahun yang berjumlah 19.422 jiwa untuk laki-laki dan 18.721 jiwa untuk perempuan, Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelompok umur +75 tahun, yaitu sebanyak 1.267 jiwa penduduk laki-laki dan 1.719 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.13** di atas.

Tabel 2.13
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

Kelompok Umur	Penduduk (Orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	19.428	18.446	37.874
5 – 9	19.422	18.721	38.143
10 – 14	18.688	17.997	36.685
15 – 19	18.888	17.829	36.717
20 – 24	18.517	17.665	36.182
25 – 29	17.666	17.125	34.791
30 – 34	16.519	15.285	31.804
35 – 39	14.188	13.421	27.609
40 – 44	12.647	12.279	24.926
45 – 49	10.614	10.229	20.843
50 – 54	8.535	8.59	17.125
55 – 59	6.969	7.277	14.246
60 – 64	5.245	5.683	10.928
65 – 69	3.592	3.873	7.465
70 – 74	1.669	2.001	3.670
+75	1.267	1.719	2.986
Total	193.854	188.14	381.994

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.8
Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020



Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2021 Diolah

2.2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.2.4.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Indeks Gini, serta Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 2.14** Selanjutnya dalam **Tabel 2.15** dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat pada periode 2016 - 2020. Adanya wabah Covid - 19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi 0,27 persen. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2020 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi leading sektor dalam pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan kontribusi sekitar 34,03 %. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,55 %, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 17,42 %. Berdasarkan tabel 2.14 PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016 - 2020 menunjukan trend yang terus meningkat. Pada tahun 2016 PDRB ADHB mencapai Rp. 19,37 triliun dan nilai ini terus meningkat hingga mencapai Rp. 25,19 Triliun pada tahun 2020. Sedangkan dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2016 mencapai Rp. 14,84 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 17,30 Triliun pada tahun 2020.

Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020

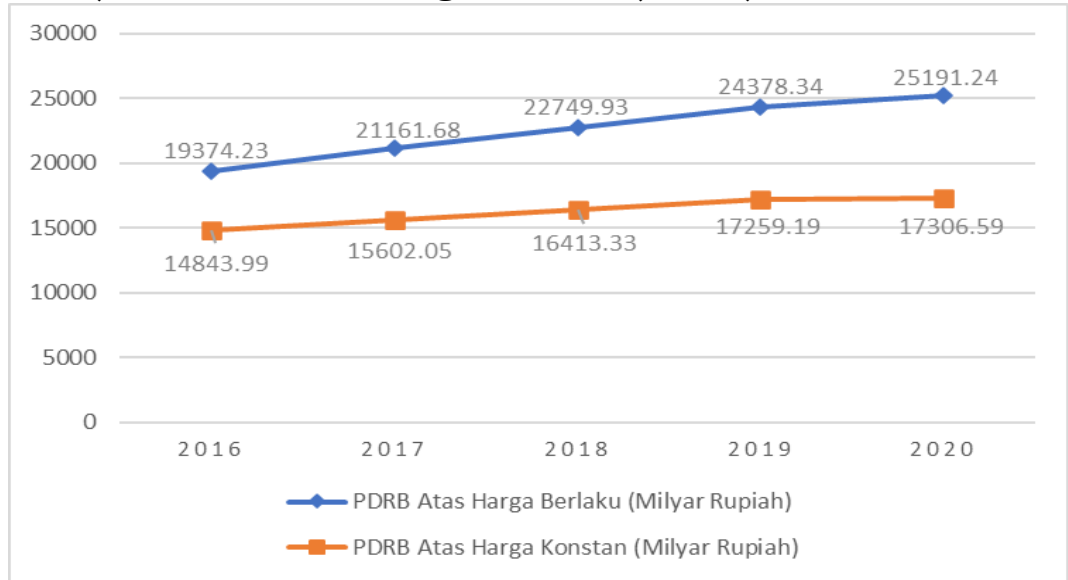
Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta)	(%)	(Juta)	(%)	(Juta)	(%)	(Juta)	(%)	(Juta)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	6.848,26	35,35	7.379,66	34,87	7. 699,89	33,85	8.095,68	33,21	8.573,25	34,03
B	Pertambangan dan Penggalian	146,74	0,75	154, 72	0,73	162,55	0,71	171,34	0,70	171,58	0,68
C	Industri Pengolahan	5.605,20	28,91	6.249,05	29,53	6 .807,16	29,92	7.168,15	29,40	7.444,21	29,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,01	0,07	15,78	0,07	16,79	0,07	18,26	0,07	18,84	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	3,70	0,02	4,09	0,02	4,23	0,02	4,44	0,02	4,37	0,02
F	Konstruksi	1.405,06	7,25	1.540,61	7,28	1.713,68	7,53	1.889,20	7,79	1.858,44	7,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.225,53	16,66	3.526,93	16,67	3.863,04	16,98	4.319,25	17,72	4.387,41	17,42
H	Transportasi dan Pergudangan	252,82	1,30	273,90	1,29	288, 77	1,27	313,79	1,29	302,75	1,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	205,30	1,06	227,45	1,07	248,76	1,09	273,08	1,12	260,88	1,04
J	Informasi dan Komunikasi	73,80	0,38	80,89	0,38	87, 92	0,39	97,40	0,40	103,26	0,41
K	Jasa keuangan dan Asuransi	175,92	0,91	182,049	0,86	191,93	0,84	196,64	0,81	198,54	0,79
L	Real Estate	653,54	3,37	772,51	3,37	796 ,93	3,50	868,42	3,56	897,40	3,56
M,N	Jasa perusahaan	35,81	0,18	39,47	0,18	41, 27	0,18	45,40	0,19	46,10	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	484,64	2,50	508,23	2,50	549,27	2,41	598,13	2,45	609,26	2,42
P	Jasa Pendidikan	128,41	0,66	135,26	0,66	145,52	0,64	160,92	0,66	165,72	0,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85,48	0,44	91,83	0,44	100,75	0,44	113,55	0,47	114,90	0,46
R,S,T,U	Jasa Lainnya	26,51	0,14	29,21	0,14	31,39	0,14	34,62	0,14	34,35	0,14
PDRB (Miliar Rupiah)		19.374,23	100	21.161, 68	100	22.749,93	100	24.378,34	100	25.191,24	100

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai	Laju Pertumbuhan (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.952,05	4,66	6.211,98	4,37	6,530,74	5,13	6.893,39	5,55	7.070,94	2,58
B	Pertambangan dan Penggalian	106,37	5,02	113,18	6,40	118,67	4,85	123,74	4,27	119,92	-3,09
C	Industri Pengolahan	3.992,55	4,82	4.161,22	4,22	4.364,66	4,89	4.532,71	3,85	4.534,19	0,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,16	2,37	13,8	4,87	14,10	2,18	14,72	4,42	15,20	3,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	2,63	4,91	2,72	3,47	2,78	2,09	2,90	4,34	2,84	-2,14
F	Konstruksi	984,39	6,07	1.054,73	7,15	1.117,15	5,92	1.118,74	6,05	1.117,80	-5,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motro	2.288,32	7,02	2.457,14	7,38	2.598,97	5,77	2.749,80	5,81	2.707,30	-1,55
H	Transportasi dan Pergudangan	170,29	5,09	180,07	7,51	190,45	4,03	202,15	6,0	188,55	-6,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	153,86	7,80	165,81	7,77	178,37	7,58	192,37	7,85	182,16	-5,31
J	Informasi dan Komunikasi	72,71	6,10	77,97	7,24	83,12	6,60	89,46	7,64	93,71	4,75
K	Jasa keuangan dan Asuransi	13,34	2,61	13,39	0,45	13,59	1,53	13,80	1,5	139,35	0,96
L	Real Estate	446,67	6,82	476,44	6,66	499,90	4,92	521,72	4,36	527,33	1,08
M,N	Jasa perusahaan	24,53	3,14	26,21	6,41	27,06	3,25	27,71	2,41	27,08	-2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	324,50	2,18	335,52	3,40	353,15	5,25	375,62	6,36	371,99	-0,97
P	Jasa Pendidikan	99,30	6,14	103,69	4,43	109,53	5,62	116,17	6,06	116,53	0,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,57	7,68	65,78	6,84	68,97	4,86	73,14	6,05	71,62	-2,09
R,S,T,U	Jasa Lainnya	17,54	4,20	18,78	6,46	19,64	4,60	20,74	5,59	20,07	-3,24
PDRB (Miliar Rupiah)		14.843,99	5,21	15.602,304	5,11	16.413,32	5,20	17.259,18	5,15	17.306,59	0,27

Sumber :Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2017-2021

Gambar 2.9
PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016 – 2020



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017 - 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelumnya, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB dengan rata-rata sebesar 33,86 persen pertahun selama periode 2016-2020. Berikutnya sektor industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 29,46 persen pertahun dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata 17,09 persen pertahun. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang diusahakan baik masyarakat maupun perkebunan swasta. Adanya perkebunan swasta besar diikuti dengan berdirinya industri pengolahan kelapa sawit meskipun belum optimal dengan hasil yang utama adalah minyak CPO dan minyak goreng.

Dari Tabel 2.14 dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan maka dapat disimpulkan bahwa Struktur perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Utara masih didominasi oleh sektor primer. Sehingga perlu dilakukan transformasi struktural terhadap sektor unggulan, dimana sektor-sektor sekunder yang mengandalkan sektor industri sebagai penggerak pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2016 - 2020

Kabupaten Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nias	5,03	5,01	4,95	5,04	1,8
Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,3	-0,94
Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19	5,23	0,39
Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,2	5,18	-0,76
Tapanuli Utara	4,12	4,15	4,35	4,62	1,5
Toba Samosir	4,76	4,9	4,96	4,88	-0,27
Labuhan Batu	5,06	5	5,06	5,07	0,09
Asahan	5,62	5,48	5,61	5,64	0,21
Simalungun	5,4	5,13	5,18	5,2	1,01
Dairi	5,07	4,93	5,01	4,82	-0,94
Karo	5,17	5,21	4,55	4,6	-0,8
Deli Serdang	5,32	5,1	5,15	5,18	-1,78
Langkat	4,98	5,05	5,02	5,07	-0,86
Nias Selatan	4,41	4,56	5,02	5,03	0,61
Humbang Hasundutan	5	5,02	5,04	4,94	-0,13
Pakpak Bharat	5,97	5,94	5,85	5,87	-0,18
Samosir	5,27	5,35	5,58	5,7	-0,59
Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17	5,28	-0,44
Batu Bara	4,44	4,11	4,38	4,35	-0,31
Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61	1,14
Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64	1,18
Labuhanbatu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35	0,8
Labuanbatu Utara	5,21	5,11	5,2	5,15	0,27
Nias Utara	4,59	4,43	4,42	4,65	1,58
Nias Barat	4,83	4,81	4,77	4,82	1,66
Sibolga	5,15	5,27	5,25	5,2	-1,36
Tanjungbalai	5,76	5,51	5,77	5,79	-0,47
Pematangsiantar	4,86	4,41	4,8	4,82	-1,89
Tebing Tinggi	5,11	5,14	5,17	5,15	-0,7
Medan	6,27	5,81	5,92	5,93	-1,98
Binjai	5,54	5,39	5,46	5,51	-1,83
Padangsidempuan	5,29	5,32	5,45	5,51	-0,73
Gunungsitoli	6,03	6,01	6,03	6,05	0,38
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2017-2021

Dalam lima tahun terakhir perekonomian Labuhanbatu Utara mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Pada Tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada urutan ke – 10. Walaupun adanya wabah Covid-19 pada tahun 2020, Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara masih dapat tumbuh sebesar 0,27 persen.

2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah.

Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan.

Dari gambar dibawah dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2016 – 2020 memiliki tren yang positif. Pada tahun 2016 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 54.654.596,64, dan pada tahun 2020 PDRB per kapita meningkat menjadi Rp. 68.715.324,82. Demikian juga PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 41.874.816,84 dan pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi Rp. 47.207.990,90.

Tabel 2.17
PDRB Per Kapita ADHB & ADHK Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 - 2020

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (milyar Rupiah)	19.374,23	21.161,68	22.749,93	24.378,34	25.191,24
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	54,65	59,16	63,03	67,01	68,71
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (milyar Rupiah)	14.843,99	15.602,30	16.413,32	17.259,18	17.306,59
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	41,87	43,62	45,48	47,44	47,21

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2017-2021

Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 posisi capaian PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp.54.654.596,64 berada dibawah PDRB perkapita ADHB kabupaten lain yang berada di sekitarnya kecuali Kabupaten Asahan Rp.40.981.266,68 sedangkan capaian PDRB perkapita Kabupaten Labuhanbatu Rp.56.333.296,86 dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp.65.559.964,02 masih lebih unggul dibanding capaian PDRB perkapita Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan
NasionalTahun 2016 – 2020

Kabupaten Kota	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nias	20.977,49	22.753,92	24.636,45	26.687,67	28.065,26
Mandailing Natal	24.488,78	26.649,32	28.451,71	30.281,99	30.692,11
Tapanuli Selatan	39.599,88	42.959,51	45.961,33	49.417,55	51.668,06
Tapanuli Tengah	21.992,87	23.495,36	24.934,37	26.433,91	26.477,88
Tapanuli Utara	21.312,63	22.718,45	24.332,25	26.140,95	27.246,48
Toba Samosir	33.891,05	36.499,64	39.204,43	41.779,47	42.524,22
Labuhan Batu	56.333,31	60.662,34	64.345,05	68.012,80	69.085,84
Asahan	40.981,26	44.551,81	47.854,66	51.302,64	52.640,07
Simalungun	35.252,51	38.211,20	41.038,39	43.848,91	45.247,61
Dairi	26.670,72	28.311,99	30.228,42	32.241,61	32.639,34

Karo	42.179,89	44.801,60	46.917,39	49.497,04	49.703,13
Deli Serdang	41.086,20	44.071,08	46.882,09	49.794,46	49.296,99
Langkat	33.396,69	36.012,76	38.504,18	40.810,33	41.225,07
Nias Selatan	16.679,90	18.116,51	19.694,74	21.448,69	22.213,41
Humbang Hasundutan	25.834,41	27.483,74	29.325,39	31.291,79	31.930,27
Pakpak Bharat	19.774,53	21.191,32	22.589,00	24.077,25	24.379,13
Samosir	27.651,65	29.989,29	32.469,64	35.143,75	35.852,34
Serdang Bedagai	36.198,40	39.310,89	42.294,27	45.359,54	46.299,38
Batu Bara	68.038,09	72.739,00	77.415,54	81.748,91	83.283,48
Padang Lawas Utara	35.196,17	37.651,91	40.154,16	42.607,91	43.938,97
Padang Lawas	33.392,17	35.971,19	38.458,41	40.435,32	41.856,14
Labuhanbatu Selatan	65.559,97	70.974,71	75.465,24	80.040,53	81.779,05
Labuanbatu Utara	54.654,58	59.161,90	63.032,12	67.007,33	68.715,31
Nias Utara	20.554,32	22.179,81	23.724,69	25.484,21	26.729,39
Nias Barat	17.500,77	18.995,93	20.490,43	22.115,17	23.324,72
Sibolga	49.117,40	53.331,84	57.994,89	63.126,70	63.850,17
Tanjungbalai	39.758,88	43.373,39	47.175,97	51.086,04	51.865,99
Pematangsiantar	46.409,05	49.476,41	51.979,13	54.572,36	54.140,60
Tebing Tinggi	29.738,33	31.882,18	33.906,30	36.034,84	36.418,78
Medan	82.896,02	90.341,50	98.263,69	105.918,24	105.532,86
Binjai	34.014,32	36.559,10	39.304,87	42.300,17	42.137,44
Padangsidempuan	23.029,07	24.870,17	26.765,89	28.730,18	28.860,36
Gunungsitoli	29.298,51	32.330,68	35.486,67	38.714,28	40.174,37
Sumatera Utara	44.725,97	48.339,31	51.427,49	54.908,58	55.176,05
Nasional	47.976,39	51.997,47	56.173,02	59.317,46	57.247,62

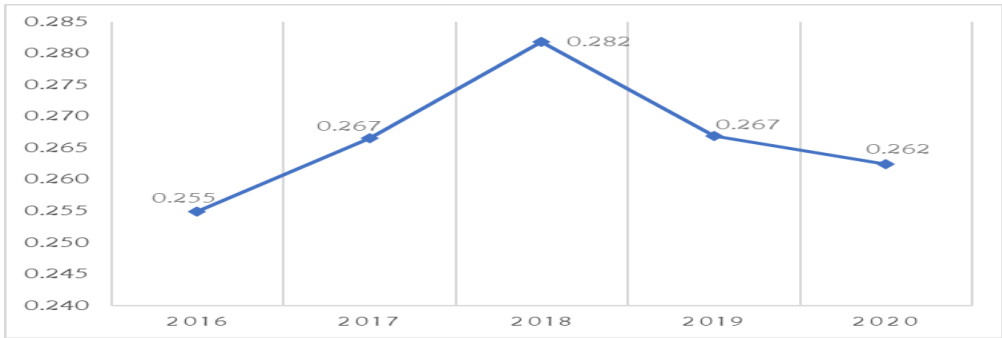
Sumber : Badan Pusat Statistik 2017 – 2021

Pada tahun 2020 capaian PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai Rp 68.715.324,82. Capaian tersebut berada di atas PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Rp. 69.085.835,50 dan dibawah capaian PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp. 81.779.044,37 sedangkan capaian PDRB per kapita Kabupaten Asahan hingga tahun 2020 masih bawah capaian PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara. PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016 – 2020 berada diatas angka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

3. Indeks Gini

Indeks gini menggambarkan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1 dimana nilai Indeks Gini yang semakin mendekati angka 0 berarti ketimpangan pendapatan di suatu daerah semakin kecil. Adapun Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Gini Kab.Labuhanbatu Utara, Thun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2017 – 2021

Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kenaikan pada periode 2016 – 2018. Indeks gini meningkat dari 0,255 pada tahun 2016 menjadi 0,282 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan ketimpangan pendapatan pada periode tersebut. Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 0,267 dan kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 0,262. Perbaikan pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja menyebabkan pendapatan penduduk semakin merata. Hal ini menyebabkan Indeks Gini/ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara terus menurun.

Tabel 2.19
Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

KABUPATEN/KOTA	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nias	0.274	0.249	0.265	0.274	0.251
Mandailing Natal	0.270	0.252	0.257	0.262	0.248
Tapanuli Selatan	0.273	0.253	0.273	0.247	0.202
Tapanuli Tengah	0.306	0.306	0.317	0.309	0.335
Tapanuli Utara	0.309	0.329	0.282	0.306	0.287
Toba Samosir	0.308	0.292	0.328	0.275	0.290
Labuhan Batu	0.308	0.279	0.294	0.277	0.271
Asahan	0.283	0.267	0.291	0.279	0.260
Simalungun	0.296	0.255	0.290	0.274	0.295
Dairi	0.301	0.240	0.265	0.287	0.271
Karo	0.328	0.268	0.268	0.264	0.271
Deli Serdang	0.282	0.281	0.293	0.273	0.312
Langkat	0.283	0.249	0.253	0.266	0.238
Nias Selatan	0.214	0.269	0.329	0.319	0.286
Humbang Hasundutan	0.275	0.298	0.291	0.289	0.246
Pakpak Bharat	0.264	0.256	0.239	0.279	0.248
Samosir	0.276	0.287	0.285	0.301	0.318
Serdang Bedagai	0.255	0.275	0.283	0.257	0.262
Batu Bara	0.268	0.234	0.249	0.277	0.259
Padang Lawas Utara	0.253	0.250	0.299	0.270	0.228
Padang Lawas	0.326	0.248	0.299	0.231	0.265

Labuhan Batu Selatan	0.244	0.220	0.243	0.250	0.193
Labuhan Batu Utara	0.255	0.267	0.282	0.267	0.262
Nias Utara	0.266	0.269	0.237	0.284	0.251
Nias Barat	0.290	0.247	0.283	0.258	0.234
Kota Sibolga	0.344	0.323	0.303	0.272	0.291
Kota Tanjung Balai	0.373	0.278	0.332	0.268	0.272
Kota Pematang Siantar	0.321	0.349	0.334	0.330	0.336
Kota Tebing Tinggi	0.358	0.304	0.340	0.324	0.334
Kota Medan	0.333	0.352	0.314	0.352	0.320
Kota Binjai	0.316	0.316	0.308	0.351	0.324
Kota Padangsidimpuan	0.334	0.324	0.359	0.310	0.354
Kota Gunungsitoli	0.357	0.346	0.361	0.318	0.322
Sumatera Utara	0.319	0.315	0.318	0.317	0.316
Nasional	0.397	0.393	0.389	0.38	0.381

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017 – 2021

Secara umum, Indeks Gini di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2020 mengalami penurunan. Adanya pandemi Covid-19 hanya berdampak terhadap Indeks Gini di beberapa Kota. Wilayah Kabupaten di Sumatera Utara lebih tahan terhadap pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2020 berada pada urutan ke – 12 terendah. Indeks Gini bernilai 0,262 pada tahun 2020. Angka tersebut berada di bawah angka Provinsi Sumatera Utara dan angka Nasional.

4. Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Angka kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Utara ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Indikator Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp)	361.017	378.024	395.696	422.063	471.678
Jumlah Penduduk Miskin	38.810	40.240	36.450	34.760	34.860
Angka Kemiskinan (%)	10,97	11,28	10,12	9,57	9.53

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017-2021

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki tren yang berfluktuasi.

Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin mencapai 10,97 % kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 11,28%. Selanjutnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara terus mengalami penurunan hingga 9,53% pada tahun 2020.

Tabel 2.21
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan
Nasional Tahun 2016 – 2020

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nias	17.64	18.11	16.37	15.94	16.6
Mandailing Natal	10.98	11.02	9.58	9.11	9.18
Tapanuli Selatan	11.15	10.6	9.16	8.6	8.47
Tapanuli Tengah	14.58	14.66	13.17	12.53	12.38
Tapanuli Utara	11.25	11.35	9.75	9.48	9.37
Toba Samosir	10.08	10.19	8.67	8.6	8.71
Labuhan Batu	8.95	8.89	8.61	8.44	8.44
Asahan	11.86	11.67	10.25	9.68	9.04
Simalungun	10.81	10.65	9.31	8.81	8.46
Dairi	8.9	8.87	8.2	7.7	8.04
Karo	9.81	9.97	8.67	8.23	8.7
Deli Serdang	4.86	4.62	4.13	3.89	3.88
Langkat	11.36	11.15	10.2	9.91	9.73
Nias Selatan	18.6	18.48	16.65	16.45	16.74
Humbang Hasundutan	9.78	9.85	9	8.75	9.36
Pakpak Bharat	10.72	10.53	9.74	9.27	9.28
Samosir	14.4	14.72	13.38	12.52	12.48
Serdang Bedagai	9.53	9.3	8.22	7.9	7.97
Batu Bara	12.24	12.48	12.57	12.14	11.88
Padang Lawas Utara	10.87	10.7	10.06	9.6	9.7
Padang Lawas	8.69	9.1	8.41	8.28	8.37
Labuhanbatu Selatan	11.49	11.63	10	8.94	8.34
Labuanbatu Utara	10.97	11.28	10.12	9.57	9.53
Nias Utara	30.92	29.06	26.56	24.99	25.07
Nias Barat	28.36	27.23	26.72	25.51	25.69
Sibolga	13.3	13.69	12.38	12.36	11.95
Tanjungbalai	14.49	14.46	14.64	14.04	13.33
Pematangsiantar	9.99	10.1	8.7	8.63	8.27
Tebing Tinggi	11.7	11.9	10.27	9.94	9.85
Medan	9.3	9.11	8.25	8.08	8.01
Binjai	6.67	6.75	5.88	5.66	5.71
Padangsidempuan	8.32	8.25	7.69	7.26	7.4
Gunungsitoli	23.43	21.66	18.44	16.23	16.41
Sumatera Utara	10.35	10.22	9.22	8.83	8.75
Nasional	10.86	10.64	9.82	9.41	9.78

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017 – 2021

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki tren yang negatif pada tahun 2017 – 2020. Persentase penduduk miskin turun dari 11,28 persen pada tahun 2017 menjadi 9,53 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara, persentase penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2020 berada pada urutan ke – 19 terendah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase

penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara dan lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin Nasional.

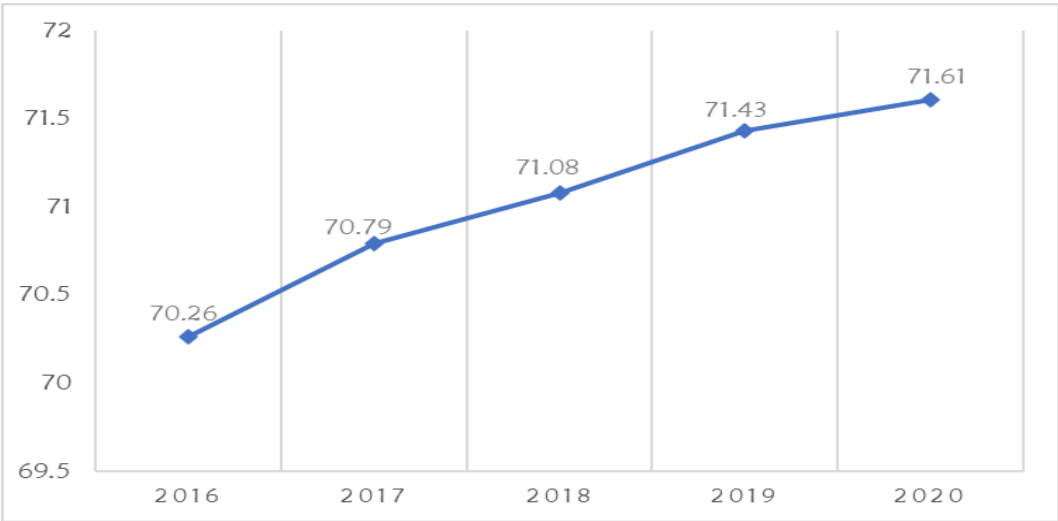
2.2.4.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Gambar 2.11

Perkembangan IPM Kab.Labuhanbatu Utara, Thun 2016 - 2020



Sumber :Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2017-2021

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa IPM/HDI Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016 mencapai 70,26 dan meningkat menjadi 71,61 pada tahun 2020, kondisi ini mencerminkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara semakin membaik.

Tabel 2.22

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Utara Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Kabupaten Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nias	59.75	60.21	60.82	61.65	61.93
Mandailing Natal	64.55	65.13	65.83	66.52	66.79
Tapanuli Selatan	68.04	68.69	69.1	69.75	70.12

Tapanuli Tengah	67.27	67.96	68.27	68.86	69.23
Tapanuli Utara	71.96	72.38	72.91	73.33	73.47
Toba Samosir	73.61	73.87	74.48	74.92	75.16
Labuhan Batu	70.5	71	71.39	71.94	72.01
Asahan	68.71	69.1	69.49	69.92	70.29
Simalungun	71.48	71.83	72.49	72.98	73.25
Dairi	69.61	70.36	70.89	71.42	71.57
Karo	73.29	73.53	73.91	74.25	74.43
Deli Serdang	73.51	73.94	74.92	75.43	75.44
Langkat	69.13	69.82	70.27	70.76	71
Nias Selatan	59.14	59.85	60.75	61.59	61.89
Humbang Hasundutan	66.56	67.3	67.96	68.83	68.87
Pakpak Bharat	65.81	66.25	66.63	67.47	67.59
Samosir	68.82	69.43	69.99	70.55	70.63
Serdang Bedagai	68.77	69.16	69.69	70.21	70.24
Batu Bara	66.69	67.2	67.67	68.35	68.36
Padang Lawas Utara	68.05	68.34	68.77	69.29	69.85
Padang Lawas	66.23	66.82	67.59	68.16	68.25
Labuhanbatu Selatan	70.28	70.48	70.98	71.39	71.4
Labuanbatu Utara	70.26	70.79	71.08	71.43	71.61
Nias Utara	60.23	60.57	61.08	61.98	62.36
Nias Barat	59.03	59.56	60.42	61.14	61.51
Sibolga	72	72.28	72.65	73.41	73.63
Tanjungbalai	67.09	67.41	68	68.51	68.65
Pematangsiantar	76.9	77.54	77.88	78.57	78.75
Tebing Tinggi	73.58	73.9	74.5	75.08	75.17
Medan	79.34	79.98	80.65	80.97	80.98
Binjai	74.11	74.65	75.21	75.89	75.89
Padangsidempuan	73.42	73.81	74.38	75.06	75.22
Gunungsitoli	66.85	67.68	68.33	69.3	69.31
Sumatera Utara	70	70.57	71.18	71.74	71.77
Nasional	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017 – 2021

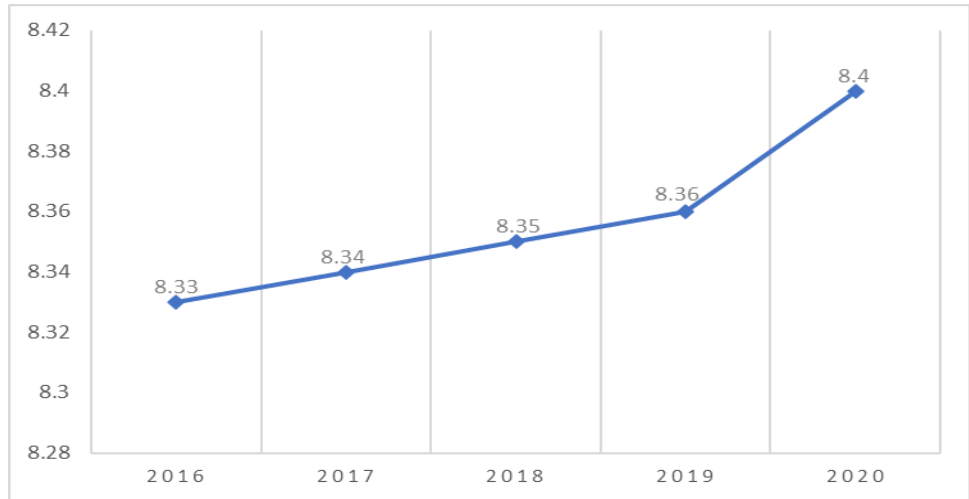
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara, IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2020 berada pada urutan ke-13 dengan nilai IPM sebesar 71,61. Nilai IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut berada diatas angka IPM Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara hingga saat ini sudah baik.

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefnisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Data perkembangan rata-rata

lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016 - 2020 disajikan pada **Gambar 2.12** berikut:

Gambar 2.12
Rata-Rata Lama Sekolah Siswa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka 2017 – 2021

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,33 tahun meningkat menjadi 8,40 tahun pada tahun 2020.

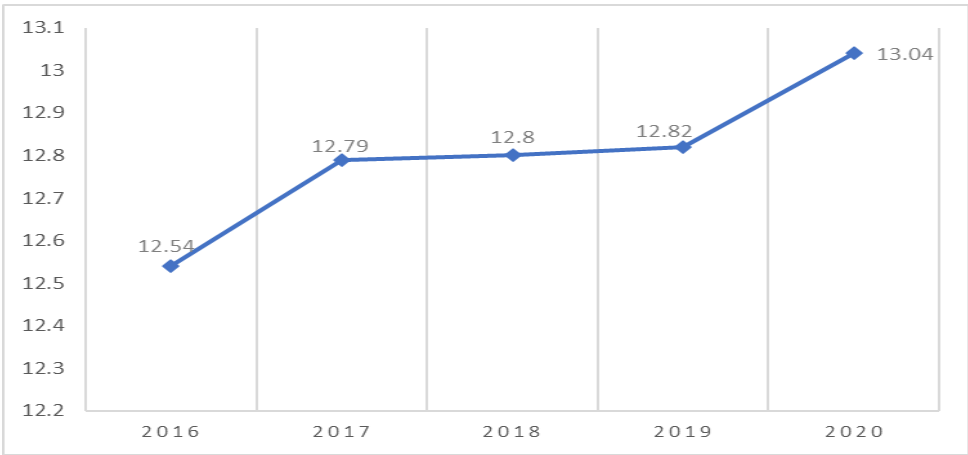
Hal ini disebabkan karena meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adanya pembangunan sekolah baru menyebabkan masyarakat lebih mudah menjangkau pendidikan untuk anak – anaknya serta peningkatan sarana dan prasarana menyebabkan minat masyarakat untuk bersekolah semakin tinggi.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 - 2020



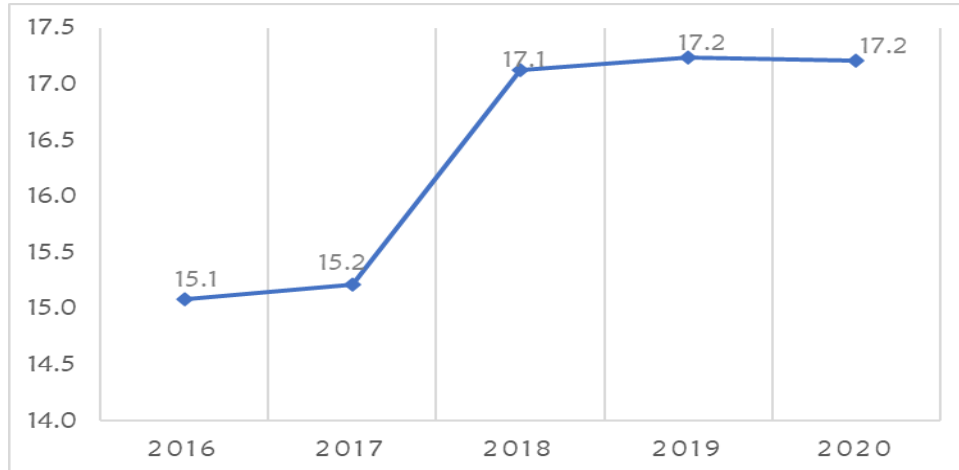
Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka 2017 – 2021

Harapan lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2016 – 2020 mengalami kenaikan dari 12,54 pada tahun 2015 menjadi 13,04 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan semakin mudahnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta semakin terbukanya wawasan masyarakat menganggap pentingnya pendidikan. Selain itu adanya beasiswa bagi siswa kurang mampu dan beasiswa siswa berprestasi menyebabkan pola pikir masyarakat bahwa pendidikan tinggi pasti bisa tercapai. Hal ini menyebabkan angka harapan lama sekolah semakin meningkat.

c. Rasio Murid dan Guru

Rasio Murid dan Guru menggambarkan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Gambar di bawah ini menunjukkan rasio murid dan guru pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Gambar 2.14
Rasio Murid dan Guru Pendidikan Dasar di Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016 – 2020

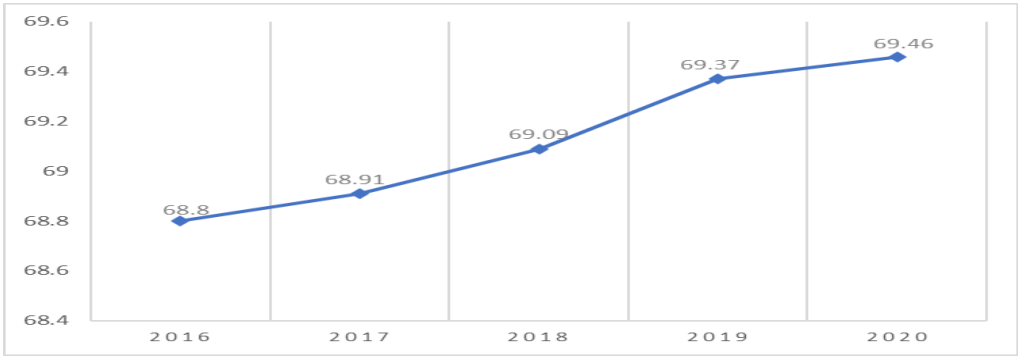
Rasio murid dan guru pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kenaikan dari 15,1 tahun 2016 menjadi 17,2 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan beban guru dari tahun 2016 – 2020 semakin meningkat. tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid dan mutu pengajaran perlu ditingkatkan seiring dengan penambahan jumlah peserta didik setiap tahunnya. Rasio murid dan guru pada tahun 2020 sebesar 17,1 berarti rata – rata seorang guru di tingkat pendidikan dasar mengawasi dan membimbing murid di kelasnya sebanyak 17 orang.

2. Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.15
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016-2020



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka 2017 –2021

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2016 – 2020 mengalami kenaikan, dari 68,8 pada tahun 2016 menjadi 69,46 pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

b. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu melahirkan

Di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih ditemukan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Hal ini menjadi sinyal, bahwa Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi ibu dan bayi yang baru lahir. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menyediakan tenaga kesehatan (bidan) yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang baik sehingga kematian bayi dan ibu melahirkan dapat dicegah.

Tabel 2.23
Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020

Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
Ibu Hamil	-	-	1	3	-
Ibu Bersalin	-	6	7	3	5
Ibu Nifas	-	-	-	1	2
Bayi	-	24	14	3	23

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2017 – 2021

c. Balita Gizi Buruk

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara selama periode 2016 sampai dengan 2020, berikut dapat dilihat tabel Balita Gizi Buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara periode tahun 2016 - 2020.

Tabel 2.24
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 - 2020

NO	TAHUN	Jumlah Balita Gizi Buruk
1	2016	15
2	2017	18
3	2018	18
4	2019	32
5	2020	22

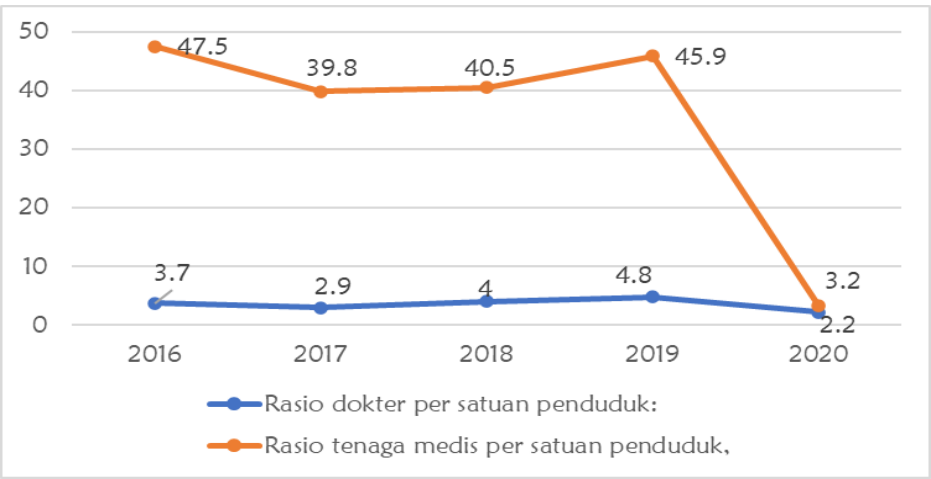
Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam angka tahun 2017 - 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai 15 bayi dan meningkat ditahun 2020 sebanyak 32 bayi.

d. Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kesehatan yang melayani kelompok masyarakat. Adapun Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Gambar 2.16
Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan di Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio dokter per satuan penduduk tahun 2017 mengalami penurunan dari 3,7

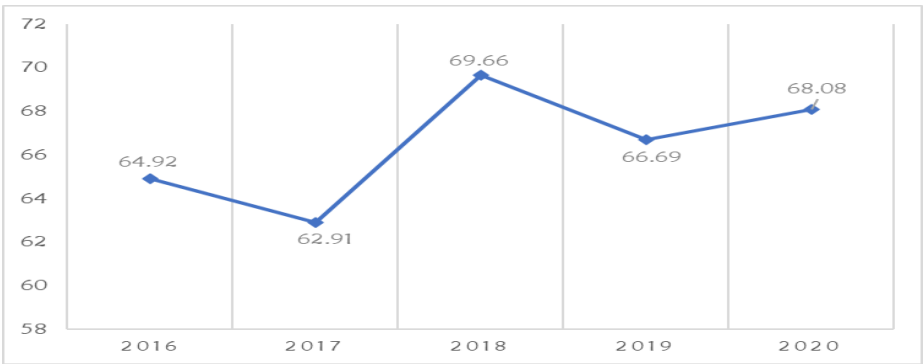
pada tahun 2016 menjadi 2,9 pada tahun 2017. Kemudian meningkat hingga tahun 2019 menjadi 4,8. Adanya pandemic Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan rasio dokter per satuan penduduk turun menjadi 2,2. Angka tersebut berarti dari 1000 penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat 2 orang dokter yang siap melayani penduduk untuk keluhan kesehatan mereka. Sejalan dengan rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk juga menurun pada tahun 2020 menjadi 3,2. Hal ini menunjukkan masih perlunya tenaga medis di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengingat adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya keluhan Kesehatan penduduk.

3. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kabupaten Labuhanbatu Utara TPAK periode 2016 – 2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif namun, Nilai TPAK Periode 2018 - 2020 berada dalam kisaran diatas 65 %. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65 penduduk yang tersedia untuk memproduksi pada waktu tertentu.

Gambar 2.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

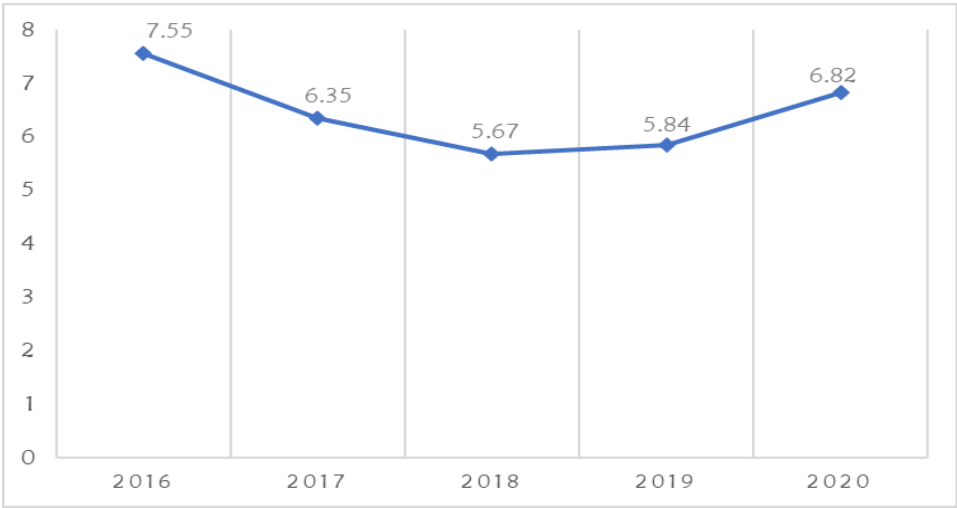


Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017 – 2021

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan TPT Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 - 2020



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017 - 2021

Dalam lingkup Kabupaten Labuhanbatu Utara, TPT dari tahun 2016 - 2020 mengalami penurunan. TPT turun dari 7,55 pada tahun 2016 menjadi 6,35 pada tahun 2017 dan kemudian turun hingga tahun 2018 menjadi 5,67. TPT kembali mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 5,84 dan di tahun 2020 TPT meningkat menjadi 6,82 akibat adanya dampak Covid – 19 di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

Kabupaten Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nias	1,055	1,19	1,62	1,09	3,49

Mandailing Natal	5,765	5,75	4,43	6,37	6,5
Tapanuli Selatan	5,855	5,8	5,28	4,17	4,42
Tapanuli Tengah	6,185	7,39	6,38	7,26	7,54
Tapanuli Utara	2,225	1,89	1,42	1,33	2,94
Toba Samosir	2,825	2,18	2,15	1,26	2,5
Labuhan Batu	9,24	7,09	6,98	5,7	6,05
Asahan	5,885	5,95	5,26	6,86	7,24
Simalungun	5,685	5,62	5,1	4,39	4,58
Dairi	1,34	1,42	1,69	1,58	1,75
Karo	1,785	1,34	1,5	1,09	1,83
Deli Serdang	6,27	6,16	7,06	5,74	9,5
Langkat	5,795	3,57	4,67	5,3	7,02
Nias Selatan	0,84	1,28	3,77	2,25	4,15
Humbang Hasundutan	0,765	0,31	0,34	0,33	0,84
Pakpak Bharat	1,685	0,49	0,43	0,19	1,93
Samosir	1,28	1,28	1,35	1,25	1,2
Serdang Bedagai	6,58	5,98	5,1	4,37	5,54
Batu Bara	5,66	5	5,39	6,69	6,48
Padang Lawas Utara	4,11	3,21	3,15	3,21	3,11
Padang Lawas	5,095	4,24	4,1	4,24	4,11
Labuhanbatu Selatan	4,915	5,68	4,79	4,8	4,9
Labuanbatu Utara	7,55	6,35	5,67	5,84	6,82
Nias Utara	3,345	2,67	2,4	3,07	4,54
Nias Barat	2,095	1,23	1,23	1,63	1,71
Sibolga	9,77	9,29	8,61	7,4	8
Tanjungbalai	7,78	5,5	5,58	6,82	6,97
Pematangsiantar	9,135	8,8	12,14	11,09	11,5
Tebing Tinggi	10,095	9,73	7,23	8,6	9,98
Medan	10,23	9,46	8,25	8,53	10,74
Binjai	7,975	5,95	7,4	6,14	8,67
Padangsidempuan	5,37	3,78	5,18	4,34	7,45
Gunungsitoli	8	6	5,92	5,59	5,94
Sumatera Utara	6,155	5,6	5,56	5,41	6,91
Nasional	5,61	5,5	5,3	5,23	7,07

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017 - 2021

Secara umum, pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 yang mewabah di masyarakat. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2020 berada pada urutan 12 tertinggi di Sumatera Utara, Nilai TPT Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun tersebut sebesar 6,82 persen. Angka tersebut masih di bawah angka TPT Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

c. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan misi pertama reformasi birokrasi yang

berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa.

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Perkembangan jumlah gedung kesenian dan grup kesenian di Kabupaten Labuhanbatu Utara selama periode 2016 s/d 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Jumlah Gedung, Grup Dan Kegiatan Kesenian
di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020

NO	TAHUN	Gedung Kesenian	Grup Kesenian	Kegiatan Kesenian
1	2016	0	50	5
2	2017	0	54	6
3	2018	0	25	5
4	2019	0	25	5
5	2020	0	25	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 - 2020

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 50 grup kesenian sampai dengan tahun 2020 mencapai jumlah 25 grup kesenian. Kemudian dengan semakin tingginya minat masyarakat terkait kegiatan kesenian setiap tahunnya, maka dibutuhkan pembangunan gedung kesenian di Kabupaten Labuhanbatu Utara karena sampai saat ini belum memiliki gedung kesenian.

Pembangunan dibidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun ke tahun berupaya untuk meningkatkan potensi kepemudaan dalam rangka mempersiapkan sarana gedung olah raga dan lapangan olah raga bagi generasi muda yang tangguh

2.2.5 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 disusun kedalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari :

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

A. Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi.

Pendidikan yang baik akan membentuk generasi bangsa yang terampil, cerdas, kreatif serta menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi guna menghadapi tantangan global.

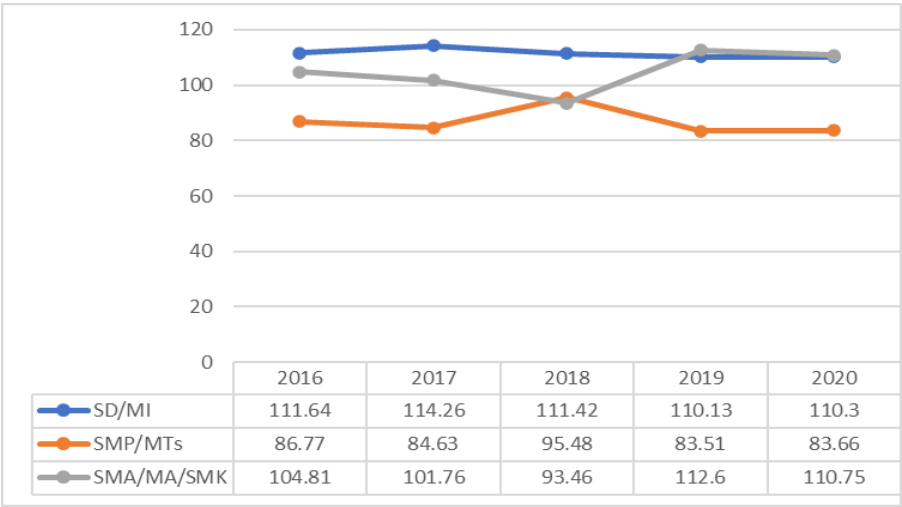
Masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang baik akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Kasar

APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Pada tabel berikut disajikan perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/MA/SMK di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Gambar 2.19
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2016 – 2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa perkembangan APK di Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut jenjang pendidikan

berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 capaian APK Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut jenjang pendidikan tercatat sebesar 110,3 untuk SD/MI, 83,66 untuk jenjang SMP/MTs dan 110,75 untuk jenjang SMA/MA/SMK.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020 dapat lihat dari Tabel dibawah ini.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1..	SD/MI	96,97	99,06	100	99,80	99,23
2.	SMP/MTs	75,22	73,82	73,74	74,57	77,17
3.	SMA/MA/SMK	67,29	67,24	63,39	64,27	64,68

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2016 - 2021

Dari tabel di atas di dapat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020 masih didominasi pendidikan SD/MI yaitu sebesar 99,23 pada tahun 2020 dan disusul APM SMP/MTs sebesar 77,17 pada tahun 2020, kemudian APM terkecil terdapat pada pendidikan SMA/MA/SMK yaitu 64,68 pada tahun 2020. Walaupun demikian semua jenjang pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini artinya bahwa program pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara berhasil dilaksanakan walaupun perlu peningkatan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

c. Data kondisi sekolah

Terkait dengan jumlah data kondisi sekolah Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikategorikan menjadi beberapa kategori seperti tabel berikut :

Tabel 2.28
Jumlah Gedung dan Keadaan Tahun 2016 – 2020

No.	Kab/ Kota	TAHU N	JUMLAH GEDUNG DAN KEADAAN (KONDISI)														
			RUANG KELAS			RUANG GURU			RUANG KEPALA SEKOLAH			PERPUSTAKAAN			RUMAH DINAS GURU & KEPSEK		
			BAIK	RR	RB	BAIK	RR	RB	BAIK	RR	RB	BAIK	RR	RB	BAIK	RR	RB
1.	Labuha nbatu Utara	2016	1332	812	277	110	59	25	103	60	23	130	48	9	56	119	34
		2017	1297	800	293	110	59	26	103	60	23	128	48	9	56	119	34
		2018	1314	807	289	110	59	26	103	60	23	128	48	9	56	119	34
		2019	1328	811	293	110	59	26	103	60	23	128	48	9	56	119	34
		2020	1328	811	293	110	59	26	103	60	23	128	48	9	56	119	34

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Jumlah Data Kondisi Sekolah Se-K abupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki beberapa jumlah yang berkualifikasi diantaranya di tahun 2016 jumlah Ruang Kelas dengan kondisi Baik berjumlah 1332 Ruang ditahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan Ruang Ruang Kelas dengan Kondisi baik sedangkan Rusak Ringan berjumlah 812 Ruang dan dengan jumlah rusak berat berjumlah 227 Ruang sedangkan pada Ruang Guru Ruang Kepala Sekolah, Perpustakaan Maupun Rumah Dinas Guru dan Kepala Sekolah Tidak ada peningkatan yang Signipikan pada tahun 2016 sampai dengan 2020. dari jumlah Kondisi Bagunan saat ini menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan Dasar (DIKDAS) berdasarkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) DIKDAS belum memadai.

2) Kesehatan

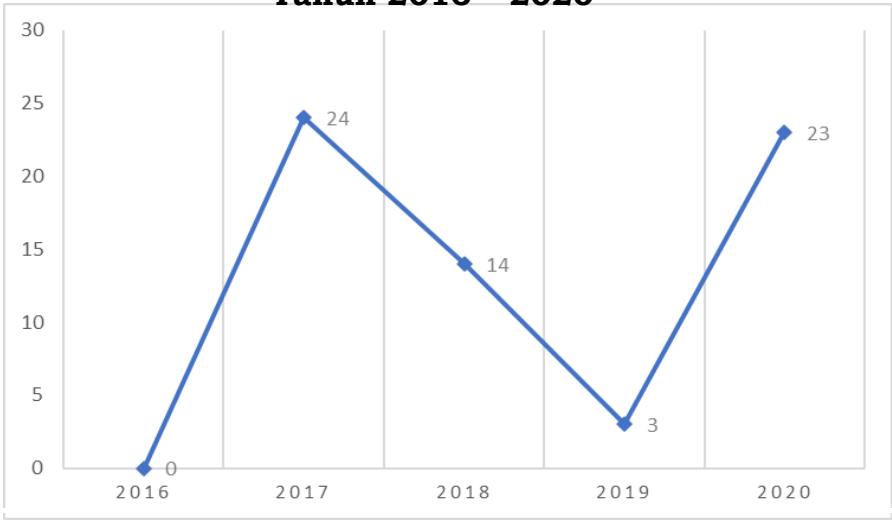
Kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Di samping itu, setiap individu

bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait urusan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan sebagai berikut:

a. Jumlah Kematian Bayi

Pada kurun waktu dari 2017 hingga 2019 Jumlah Kematian Bayi mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2017 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 24 bayi terus mengalami penurunan hingga tahun 2018 sebanyak 14 bayi dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 3 bayi. Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi kembali mengalami peningkatan menjadi 23 bayi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Gambar 2.20
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 – 2020

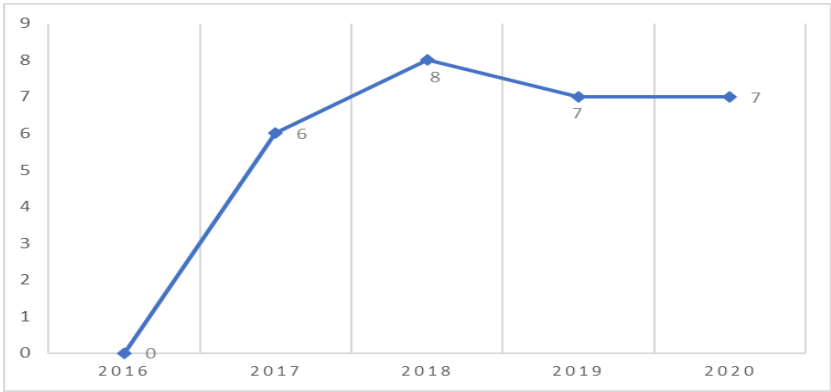


Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017 - 2021

b. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Labuhanbatu Utara kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 6 jiwa, pada tahun 2018 terjadi mengalami kenaikan sebanyak 8 jiwa dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 sebesar 7 jiwa.

Gambar 2.21
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 - 2020



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2016-2020

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat vital bagi perkembangan daerah, selain sebagai sarana mobilitas penduduk juga digunakan untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Status pengawasan jalan terbagi menjadi jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol, dan jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota Kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi, sementara jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten. Kondisi panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jalan Nasional	65	65	65	65	65
2.	Jalan Propinsi	34	34	34	34	34
3.	Jalan Kabupaten	906.886	1.023,34	1.023,34	1.023,34	1.023,34

Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam angka & labuhanbatu Utara dalam Angka Tahun 2017 - 2021

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan orang yang memadai. Hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat jaringan jalan yang belum dapat menghubungkan antar kawasan dengan baik. Secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 adalah 1.122 Km yang terdiri dari jalan Nasional 65 Km, jalan Provinsi 34 Km dan jalan Kabupaten 1.023,34 Km.

Kondisi baik jaringan jalan menggambarkan ruas jalan dengan permukaan kekerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020 (Km)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Baik	319,23	331,93	249,84	257,78	278,066
2.	Sedang	252,55	249,99	0	13,146	14,3
3.	Rusak	215,92	212,77	114,08	21,6	12,4
4.	Rusak Berat	235,64	228,65	659,416	730,81	718,57
5.	Panjang jalan kabupaten	1023,34	1023,34	1023,34	1023,34	1023,34
6.	Proporsi	0,312	0,324	0,24	0,25	0,27

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017 - 2021

Pada tahun 2016 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 0,312 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 0,324 pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 0,25 pada tahun 2019 dan

meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,27. Hal ini sejalan dengan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2016 panjang jalan dalam kondisi baik 319,23 Km meningkat menjadi 331,93 Km pada tahun 2018. Dan kemudian turun menjadi 257,78 Km pada tahun 2019 dan meningkat Kembali menjadi 278,066 Km pada tahun 2020.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik pemerintah selaku pemberi pelaayanan publik.

Unsur pelayanan publik pada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari unsur Perangkat Daerah:

- 1. Dinas kependudukan dan catatan sipil
- 2. RSUD
- 3. Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu
- 4. Dinas sosial
- 5. Dinas kearsipan dan perpustakaan
- 6. Badan pengelolaan pendapatan daerah

Indeks kepuasan masyarakat ini terdiri dari beberapa indikator diantaranya:

- 1. Pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan
- 2. Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu
- 3. Ketepatan pelaksanaan terhadap biaya
- 4. Ketepatan pelaksanaan terhadap sarana prasarana
- 5. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan

Pada tahun 2019 indeks kepuasan masyarakat pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	86,03
2	RSUD	61,50
3	PUSKESMAS GUNRING SAGA	80,11

4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	74,33
5	DINAS SOSIAL	76,94
6.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	74,83
7.	BADAN PENGELOLAH PENDAPATAN	82,36

Sumber : Kabag Orta

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan penilaian IKM dan juga adanya perubahan-perubahan sistem yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah.

B.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk berusia 15 (lima belas) tahun keatas terjadi peningkatan jiwa dari 234.150 menjadi 258.259 demikian juga pada angkatan kerja di usia yang sama meningkat dari 151.962 jiwa menjadi 175.830 jiwa, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	151.962	149.214	167.200	162.015	175.830
2.	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	234.150	237.180	240.016	242.935	258.259
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.925	62,91	69,66	66,69	68.08

Sumber: Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017 – 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara relatif mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada di posisi 43,22 %, maka pada tahun 2020 berada di 50,89 %.

Tabel 2.33
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	50.887	64.567	59.217	57.700
2	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	-	117.711	119.149	120.505	65.020
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	43,22	54,19	49,14	50,89

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017 – 2021

3. Perhubungan

Pembangunan di sektor perhubungan merupakan bagian integral dari pembangunan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pendorong pembangunan suatu kawasan. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi pelayanan umum transportasi harus ditujukan melalui penyediaan jasa transportasi, melayani kebutuhan masyarakat luas serta untuk kelancaran mobilitas distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi wilayah sekitarnya. Fungsi pembangunan transportasi tidak sebatas mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi dapat memperlancar kegiatan perdagangan dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah.

Transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau

udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.

Tabel 2.34
Jumlah Stasiun Kereta Api dan Terminal Bis Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terminal Bus	1	1	1	1	1
2.	Stasiun Kereta Api	3	3	3	3	3

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017 – 2021

4. Kepemudaan dan Olahraga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Perkembangan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.35
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	13	13	27	27	27

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara

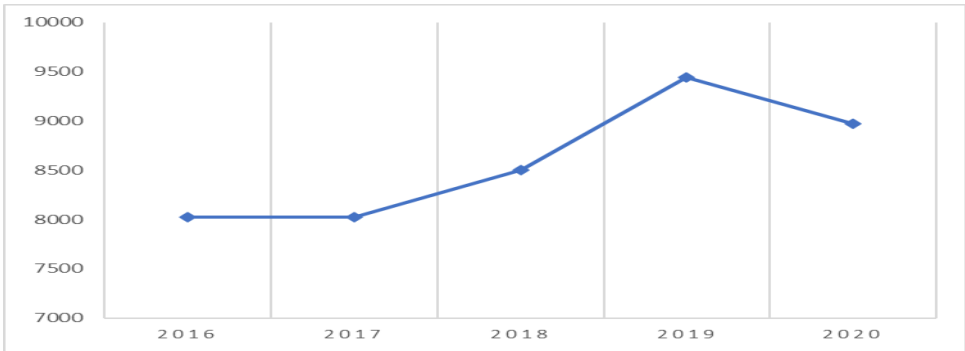
C. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Pelayanan urusan pilihan dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

1. Perikanan

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan samudera Indonesia sebelah timur. Kondisi ini memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat karena menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara. Potensi perikanan sangat besar baik itu perikanan laut maupun perikanan darat. Berikut produksi perikanan tahun 2016 – 2020

Gambar 2.16
Produksi Perikanan
di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016 – 2020



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017 - 2021

2. Pariwisata

Jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016 mencapai 120.120 pengunjung dan pada tahun 2020 sebanyak 13.650 pengunjung. Objek wisata ini tersebar di seluruh daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya pemandian sungai Aek Buru dan beberapa lagi objek wisata lainnya, dengan melihat kondisi wisata yang ada sekarang yang kurang tertata dengan baik maka perlu perhatian pemerintah terkait peningkatan pelayanan objek wisata sehingga dapat menarik minat pengunjung untuk datang dan berwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jumlah kunjungan wisata dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata	120.120	1.403	4.500	67.500	13.650

Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016 - 2020

3. Pertanian

a. Luas dan Produksi Padi

Dari tahun 2016 - 2020 luas panen mengalami tren peningkatan, hal ini berpengaruh terhadap hasil produksi padi pertahunnya. Pada tahun 2016 dengan luas panen padi sawah

43.789 Ha dan luas padi ladang 293 Ha menghasilkan produksi padi sawah sebesar 235.031 Ton dan padi ladang 1.388 ton. Pada tahun 2019 untuk luas padi sawah dan padi ladang 42.773,9 Ha menghasilkan 227.275,3 Ton padi. Adanya pandemic Covid – 19 menyebabkan produksi padi sawah dan padi ladang menurun menjadi 100.780,23 Ton padi sawah dan 4.971,25 padi ladang dengan luas panen masing – masing menurun menjadi 18.211,2 Ha padi sawah dan 1.280 Ha padi ladang. Luas panen dan produksi padi tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Luas Panen, Produksi Padi di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luas panen (Ha)		Produksi (Ton)		Total Produksi (Ton)
	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi sawah	Padi Ladang	
2016	43.789	293	235.031	1.388	236.419
2017	35.760,5	786	189.134,6	2.745	191.888,6
2018	37.970,4	14039	202.043,08	50.867,11	252.910,08
2019	39.798,9	2975,0	216.154,57	11.120,73	227.275,3
2020	18.211,2	1.280	100.780,23	4.971,25	105.751,48

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lauhanbatu Utara 2016 - 2020

b. Luas dan Produksi Perkebunan

Salah satu potensi andalan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan adalah sub sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet. Perkembangan sub sektor perkebunan dapat dilihat dari luas areal maupun produksi yang dihasilkan. Produksi perkebunan ini merupakan pilar utama dalam pengembangan sektor industri pengolahan. Kondisi diatas menggambarkan bahwa sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor unggulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Komoditi tanaman perkebunan kelapa sawit masih menjadi komoditi unggulan sekaligus primadona di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan merupakan bahan baku untuk Industri Kimia dan Minyak Goreng. Luas areal dan produksi tanaman karet perkebunan rakyat serta luas areal dan produksi tanaman kelapa sawit perkebunan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit
Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (ton)
1	2016	104.746	-
2	2017	78.399	712.409
3	2019	87.766,90	1.026.917,84
4	2020	91.608	1.026.917,84

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten labuhanbatu Utara 2016 - 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 - 2020 luas tanaman kelapa sawit bertambah dari tahun 2016 yang hanya seluas 104.746 Ha menjadi 91.608 ha pada tahun 2020.

D. Fokus Layanan Urusan Penunjang

1. SEKRETARIAT DAERAH

a. Data penilaian Sakip

Tujuan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun hasil penilaian SAKIP Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.39
Data penilaian SAKIP Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	CC	CC

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP oleh KEMENPAN

Hasil penilaian SAKIP menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memperoleh predikat CC dari tahun 2016 sampai dengan 2020, penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan cakpaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

2.2.6. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka terhadap persaingan dengan Provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Secara rinci aspek daya saing daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menjelaskan tentang pencapaian terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita perbulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk pengeluaran makanan sebesar Rp. 462.303 meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 567.544 perkapita.

Tabel 2.40
Angka Konsumsi RT Per Kapita di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Pengeluaran RT (Per bulan)	462.303	470.746	502.354	550.255	567.544

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka tahun 2017 - 2021

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara fluktuatif, ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah penduduk setiap tahun. Pengeluaran

per kapita untuk pengeluaran bukan makanan pada tahun 2020 sebesar Rp.462.309,- atau sebesar 44.89 persen dari pengeluaran perkapita perbulan.

Tabel 2.41
Jumlah Konsumsi RT Non Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Pengeluaran RT (Per bulan)	314.265	296.688	350.509	408.403	462.309

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka tahun 2017-2021

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan. Fokus wilayah/infrastruktur merupakan penjelasan mengenai pencapaian indikator-indikator seperti rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Baiknya pelayanan pemerintah daerah pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan.

Tabel 2.42
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan (Km)	1023,34	1023,34	1023,34	1023,34	1023,34
2	Jumlah Kendaraan	21.411	17.591	17.893	17.964	23.968

3	Rasio	20,9	17,1	17,4	17,5	23.42
---	-------	------	------	------	------	-------

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2017-2021

Rasio panjang jalan terhadap jumlah merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktifitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilitas yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatkan kebutuhan transport harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan). Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2020 mencapai 1:23 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan sebanyak 23 kendaraan.

2. Data Persentase Rumah Layak Huni

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Pendataan jumlah Rumah di kabupaten labuhanbatu utara sebanyak : 72.871 unit sedangkan untuk rumah layak huni sebanyak 58.682 unit dan Rumah Tidak Layak Huni 14.189 unit.

Tabel 2.43
Data Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Rumah	72.871	72.871	72.871	72.871
Rumah Layak Huni	58.831	58.831	58.831	58.682
Rumah Tidak Layak Huni	14.149	14.149	14.149	14.189
Capaian (%)	82,28	82,28	82,28	80,52

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

sehingga capaian rumah layak huni akhir RPJMD 2020 sebanyak 80,52 %.

3. Data Persentase Irigasi

Menurut Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 Daerah irigasi pada Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 6 Daerah Irigasi, akan tetapi setelah dilakukan sinkronisasi dengan kementerian Pekerjaan Umum ada Penambahan daerah irigasi baru, dimana pada penambahan ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan 4 Daerah Irigasi Baru. Sehingga Daerah Irigasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi 10 Daerah Irigasi. Adapun Daerah Irigasi tersebut meliputi :

1. Daerah Irigasi Aek Palia
2. Daerah Irigasi Kampung Lalang
3. Daerah Irigasi Sinar Toba
4. Daerah Irigasi Sinar Harapan
5. Daerah Irigasi Terang Bulan
6. Daerah Irigasi Pematang
7. Daerah Irigasi Kuala Beringin
8. Daerah Irigasi Pulo Dogom
9. Daerah Irigasi Parpaudangan
10. Daerah Irigasi Sidua - Dua

Adapun luas kesepuluh Daerah Irigasi ini adalah 551 Hektar dengan Total Panjang Jaringan Irigasi 31.980,854 Meter yang terdiri dari Panjang jaringan Irigasi Primer 13.446 Meter, Skunder sepanjang 15.755,854 Meter dan tersier sepanjang 2.779 Meter.

Kondisi Jaringan Irigasi pada Laporan Akhir Pertanggung jawaban Bupati Labuhanbatu Utara Periode 2016 – 2021 atau merupakan realisasi Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik atas RPJMD Periode 2016 – 2021 dapat kita jabar sebagai berikut :

Tabel 2.44
Data Persentase Irigasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	6%	12%	28%	35%	35%

Sumber : Data Kepala Bidang Perairan PUPR

Pada Tahun 2016 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik adalah 6 % atau 33, 06 Hektar, dengan Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik sebesar 21,74 % atau sepanjang 6.952 Meter.

Pada Tahun 2017 Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 12 % atau mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun sebelumnya sehingga luas daerah irigasi dalam kondisi baik menjadi 66, 12 Hektar. Sedangkan Rasio Kondisi Baik sebesar 37, 30 % atau sepanjang 11.928 Meter.

Pada Tahun 2018 Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 26 % atau mengalami kenaikan sebesar 116, 67 % dari tahun sebelumnya, sehingga luas daerah irigasi dalam kondisi baik menjadi 143,26 Hektar. Adapun Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 58,43 % atau sepanjang 18.685 Meter.

Pada tahun 2019 persentase Irigasi Kabupaten dalam Konsisi baik meningkat menjadi 33 % atau naik 7 % dari tahun sebelumnya. sehingga luas daerah irigasi dalam kondisi baik menjadi 181,83 Hektar. Adapun Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 128,76 % atau sepanjang 41.180 Meter. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada penambahan Jaringan irigasi dalam kondisi baik. Ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi. Hal ini dikarenakan oleh adanya Pandemi Covid – 19.

4. Data tentang Tempat Pembuangan Akhir

Saat ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memiliki Lahan TPA Sampah sendiri, Lahan TPA sampah yang

ada saat ini masih merupakan lahan yang berstatus pinjam pakai yang diberikan oleh PTPN III Membang Muda yang berlokasi di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun kapasitas TPA Sampah di Membang Muda tersebut adalah sekitar 300.000 m3. Pada lokasi TPA tersebut belum ada kegiatan pengelolaan sampah seperti pengurangan sampah, sortasi, kegiatan 3R (reduce,reuse, recycle), namun kegiatan yang ada di sana hanyalah sebatas penimbunan sampah yang sudah diangkut oleh truk pengangkut sampah. Oleh karena itu, Pengadaan lahan TPA dan pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan ini sangat penting untuk memaksimalkan pengolahan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih bersifat pengangkutan, namun untuk sarana dan prasarana yang bersifat pengelolaan sampah seperti kegiatan 3R (reduce,reuse, recycle), TPS Terpadu, kegiatan sortasi dan lain-lain belum tersedia. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini adalah sebagai berikut :

Truk Pengangkut Sampah	10 Unit
Truk Patroli Kebersihan	1 Unit
Mobil Pick Up Patroli Kebersihan	1 Unit
Becak Motor Sampah	5 Unit
Gerobak Sampah	7 Unit

Karena Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memiliki TPA sampah yang disertai dengan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, sehingga di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum terjadi penanganan sampah yang berupa kegiatan sortasi, reduce, recycle, reuse. Oleh karena itu kegiatan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih sebatas pengangkutan. Adapun persensetase pengangkutan persampahan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45
Persentase Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	2016	Satuan	2017	Satuan	2018	Satuan	2019	Satuan	2020	Satuan
Jumlah Penduduk Orang	387,413	Orang	389547	Orang	391729	Orang	394000	Orang	396000	Orang
Timbulan Sampah per hari Kg	116,224	Kg	116,864	Kg	117,519	Kg	118,200	Kg	118,800	Kg
Timbulan Sampah per hari Ton	116	Ton	117	Ton	118	Ton	118	Ton	119	Ton
Timbulan Sampah per Tahun Ton	42,422	Ton	42,655	Ton	42,894	Ton	43,143	Ton	43,362	Ton
Jumlah truk sampah	7	Unit	7	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit
Kapasitas Truk Ton	2.5	Ton	2.5	Ton	2.5	Ton	3	Ton	3	Ton
Jumlah Shift	3	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali
Jumlah Kapasitas Truk Sampah per Hari	52.5	Ton	52.5	Ton	75	Ton	90	Ton	90	Ton
Jumlah Kapasitas Truk Sampah Per Tahun	19,163	Ton	19,163	Ton	27,375	Ton	32,850	Ton	32,850	Ton
Jumlah Becak Motor Unit	2	Unit	2	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit
Kapasitas Becak Motor Ton	0.25	Ton	0.25	Ton	0.25	Ton	0.25	Ton	0.25	Ton
Jumlah Shift	3	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali
Jumlah Kapasitas Becak Motor Per Hari	1.5	Ton	1.5	Ton	3.75	Ton	3.75	Ton	3.75	Ton
Jumlah Kapasitas Becak Motor Per Tahun	547.5	Ton	547.5	Ton	1368.75	Ton	1368.75	Ton	1368.75	Ton
Total Angkut Sampah	19,710	Ton	19,710	Ton	28,744	Ton	34,219	Ton	34,219	Ton
Persentase	46.46	%	46.21	%	67.01	%	79.31	%	78.91	%

2.3. Penelaahan Terhadap Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan.

Hasil evaluasi dokumen rencana periode sebelumnya memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana periode sebelumnya, baik kinerja tahunan (RKPD), kinerja jangka menengah (RPJMD) maupun kinerja jangka panjang (RPJPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun.

2.3.1. Evaluasi Terhadap Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.

A. PROGRAM RPJMD TAHUN 2016-2019

1. Capaian Program Urusan Pendidikan

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Program Pendidikan Menengah, dengan indikator kinerja APK SMA/MA/SMK, APM SMA/MA/SMK, antara target dan realisasi mengalami peningkatan.
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1/D4, Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4, dan Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/D4 mengalami realisasi target mengalami peningkatan.

Sedangkan, Program-program yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Usia Dini, Indikator kinerja APK PAUD Non Formal.
2. Program wajib belajar sembilan tahun, dengan indikator kinerja APM SD/MI.
3. Sedangkan indikator kinerja APM SMP/MTS
4. Selanjutnya, indikator kinerja Angka kelulusan SMP/MTS.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.46** berikut ini :

Tabel 2.46
Capaian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	APK PAUD Non Formal	16,15%	50,14%	50,9%	15,74%	16,17%
2.	APM SD/MI	99,90%	96,71%	99,06%	75,61%	86,76%
	APK SD/MI	112,27%	111,64%	114,26%	119,09%	87,00%
	APK SPM/MTs	92,90%	86,77%	84,76%	86,76%	60,00%
	APM SMP/MTs	93,37%	75,22%	73,82%	75,61%	75,88%
	Angka Kelulusan SD/MI	98,57%	98,75%	98,73%	98,14%	98,08%
	Angka Kelulusan SMP/MTs	98,60%	98,90%	98,88%	98,28%	98,91%
4.	Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan non formal	97%	97%	97%	98%	98%
5.	Persentase Guru SD/ SLB Berkualifikasi Akademik S1 / D4	40,55%	85%	89%	95%	97%
	Persentase Guru SMP / SMPLB Berkualifikasi Akademik S1 / D4	60,23%	93%	95%	98%	99%

2. Capaian Program Urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Jumlah Pembinaan Kepemudaan
2. Terciptanya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
3. Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/masyarakat).

Sedangkan, Program-program yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sarana Olah raga yang terbangun
2. Jumlah kunjungan Wisatawan
3. Pengembangan Objek daya Tarik wisata.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.47** berikut ini :

Tabel 2.47
Capaian Program Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Jumlah Pembinaan Kepemudaan	85%	5 Organisasi Kepemudaan	5 Organisasi Kepemudaan	5 Organisasi Kepemudaan	5 Organisasi Kepemudaan
2.	Terciptanya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	85%	210 Orang	214 Orang	204 Orang	206 Orang
3.	Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/masyarakat)	85%	1 Kejuaraan (LPI Provinsi)	1 Kejuaraan (LPI Provinsi)	2 Kejuaraan (LPI Provinsi dan POSPEDAS U)	1 Kejuaraan (Turnamen Bola Kaki Piala Gubernur)
4.	Jumlah sarana Olah raga yang terbangun	85%	0	0	0	0
5.	Jumlah kunjungan Wisatawan	85%	120,120	1,410	45,000	67,800
6.	Pengembangan Objek daya Tarik wisata	85%	1 Objek Wisata	-	-	-

3. Capaian Program Urusan Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan indikator kinerja penguatan ketahanan pangan menggambarkan capaian pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan pencapaian, tapi pada tahun 2019 mengalami penurunan 10 % dari tahun 2018.
2. Untuk program yang lainnya tidak memiliki data pencapaian yang lengkap.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.48** berikut ini :

Tabel 2,48
Capaian Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Terlaksananya pembinaan kelembagaan usaha tani.	80%	91%	-	-	-
2.	Penguatan ketahanan pangan.	80%	63%	85%	82%	72%
3.	Persentase hasil penerapan teknologi tepat guna.	85%	86%	-	-	-
4.	Persentase produksi pertanian dan perkebunan	80%	76%	-	-	-
5.	Persentase pendampingan penyuluh.	80%	-	-	-	-
6.	Persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan.	80%	-	-	-	-
7.	Persentase Pemantapan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	80%	99%	-	-	-

4. Capaian Program Urusan Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi capaian dari tahun 2016 sd 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 meningkat 10%, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3 %, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3 % menjadi 80%.
2. Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Negara sesuai dengan standart, pencapaiannya dari tahun 2016 sd 2019 mengalami kenaikan.
3. Program kerja Jumlah Anjab dan ABK tidak diketahui pencapaiannya karena data pencapaian belum lengkap.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.49** berikut ini

Tabel 2.49
Capaian Program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70%	80%	77%	80%	84%
2.	Terpenuhinya Kompetensi SDM Aparatur Negara sesuai dengan Standart	70%	72%	72%	75%	78%
3.	Jumlah Anjab dan ABK*)	70%	-	-	-	-

5. Capaian Program Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan kesiapan penanggulangan korban bencana alam dan pasca bencana
2. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
3. Program kerja Persentase penanganan bencana kebakaran tidak di ketahui pencapaiannya karena data pencapaian belum ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.50** berikut ini

Tabel 2.50
Capaian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase penanganan bencana kebakaran	85%	-	-	-	-
2.	Peningkatan sarana dan kesiapan penanggulangan korban bencana alam dan pasca bencana	80%	-	94%	94%	95%
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	54%	63%	85%

6. Capaian Program Urusan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Meningkatkan hasil/Opini Laporan Keuangan Daerah capaian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mendapatkan WTP.
2. Program Tingkat Akuntabilitas Pemerintahan Desa dialihkan pada OPD PMD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.51** berikut ini :

Tabel 2.51
Capaian Program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Meningkatkan hasil/Opini Laporan Keuangan Daerah	100%	WTP	WTP	WDP	WTP
2.	Tingkat Akuntabilitas Pemerintahan Desa	80%	-	-	-	-

7. Capaian Program Urusan Dinas Perhubungan

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 dapat digambarkan bahwa semua kegiatan pencapaiannya mengalami peningkatan target, yaitu :

1. Program Persentase tingkat pencapaian pengadaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
2. Persentase tingkat pencapaian pengadaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
3. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai
4. Persentase Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
5. Persentase kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor
6. Persentase tingkat pencapaian pengadaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
7. Persentase tingkat pelayanan publik bidang perhubungan yang efektif dan efisien
8. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai
9. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.52** berikut ini :

Tabel 2.52
Capaian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase tingkat pencapaian pengadaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	85%	87%	90%	92%	93%
2.	Persentase tingkat pelayanan publik bidang perhubungan yang efektif dan efisien	85%	85%	87%	89%	90%
3.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai	80%	85%	88%	90%	90%
4.	Persentase Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	80%	83%	84%	86%	86%
5.	Persentase kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor	80%	80%	83%	83%	84%

8. Capaian Program Urusan Inspektorat

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Persentase capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Capaian program RPJMD 2016-2019 yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Persentase peningkatan SDM aparatur pengawas
2. Persentase pencapaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
3. Indeks kepuasan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.53** berikut ini :

Tabel 2.53
Capaian Program Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	90%	61,77%	70,42%	74,01%	64,16%	81,07%
2.	Persentase peningkatan SDM aparatur pengawas	80%	77,99%	91,35%	50,93%	78,44%	-
3.	Persentase pencapaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	85%	47,68%	24,33%	-	-	-
4.	Indeks kepuasan masyarakat	80%	-	-	-	-	-

9. Capaian Program Urusan Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
3. Kepemilikan Akta Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah
4. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Capaian program RPJMD 2016-2019 yang kinerjanya menurun, yaitu :

1. Kepemilikan Akta Kelahiran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.54** berikut ini :

Tabel 2.54
Capaian Program Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	74,46%	84,31%	87,09%	88,90%	96,08%
2.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	64,93%	66,57%	71,37%	73,37%	82,72%
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	24,24%	49,30%	49,69%	64,71%	63,16%
4.	Kepemilikan AKta Perkawinan Nagi Pasangan Yang Telah Menikah	1,80%	2,62%	16,92%	20,15%	24,64%
5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

10. Capaian Program Urusan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Tingkat pelayanan publik berbasis konten teknologi informasi
2. Cakupan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
3. Persentase kerjasama dengan media massa

Capaian program RPJMD 2016-2019 yang kinerjanya belum ada, yaitu :

1. Cakupan penelitian bidang komunikasi dan informasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.55** berikut ini :

Tabel 2.55
Capaian Program Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Tingkat pelayanan publik berbasis konten teknologi informasi	85%	85%	85%	90%
2.	cakupan penelitian bidang komunikasi dan informasi	-	-	-	-
3.	cakupan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	85%	85%	85%	90%
4.	Persentase kerjasama dengan media massa	90%	90%	90%	90%

11. Capaian Program Urusan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Persentase Penanganan Pencemaran Lingkungan
2. Persentase Perlindungan Sumber Daya Alam Daerah
3. Persentase Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Capaian program RPJMD 2016-2019 yang kinerjanya turun, yaitu :

1. Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
2. Persentase Sarana Dan Kinerja Pengolahan Sampah

Capaian program RPJMD 2016-2019 yang kinerjanya belum ada, yaitu :

1. Persentase Pengendalian Kebakaran Hutan
2. Persentase Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
3. Persentase Pemanfaatan Izin Ruang
4. Persentase Pengembangan Bibit
5. Cakupan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
6. Persentase Pemanfaatan Lahan
7. Cakupan Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan
8. Cakupan Perencanaan Dan Pengembangan Hutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.56** berikut ini :

Tabel 2.56
Capaian Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase Sarana Dan Kinerja Pengolahan Sampah	90%	54,21%	53,91%	76,58%	76,14%
2.	Persentase Penanganan Pencemaran Lingkungan	80%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Perlindungan Sumber Daya Alam Daerah	75%	83%	86%	87%	89%
4.	Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	80%	51%	60%	65%	69%
5.	Persentase Pengendalian Polusi dan Pencemaran	70%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Pengendalian Kebakaran Hutan	70%	0%	0%	0%	0%
7.	Persentase Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	70%	0%	0%	0%	0%
8.	Persentase Pemanfaatan Izin Ruang	80%	0%	0%	0%	0%
9.	Persentase Pengembangan Bibit	75%	0%	0%	0%	0%
10.	Cakupan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	75%	0%	0%	0%	0%
11.	Persentase Pemanfaatan Lahan	75%	0%	0%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
12.	Cakupan Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan	75%	0%	0%	0%	0%
13.	Cakupan Perencanaan Dan Pengembangan Hutan	75%	0%	0%	0%	0%

12. Capaian Program Urusan Badan Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang menunjukkan peningkatan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Cakupan data dan informasi penelitian dan pengembangan wilayah
2. Tersedianya Dokumen penelitian dan pengembangan wilayah
3. Cakupan Sistem Inovasi Daerah
4. Cakupan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.57** berikut ini :

Tabel 2.57
Capaian Program Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Cakupan data dan informasi penelitian dan pengembangan wilayah	-	-	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
2.	Tersedianya Dokumen penelitian dan pengembangan wilayah	-	-	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
3.	Cakupan Sistem Inovasi Daerah	-	-	0	1 dokumen	1 dokumen
4.	Cakupan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	10%	20%	25%

13. Capaian Program Urusan Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan evaluasi RPJMDtarget yang ditetapkan dan realisasi masing-masing programyang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Persentase penanganan bencana kebakaran

Berdasarkan evaluasi RPJMDtarget yang ditetapkan dan realisasi masing-masing programyang belum memenuhi target, yaitu :

1. Persentase perbaikan perumahan akibat bencana kebakaran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.58** berikut ini :

Tabel 2.58
Capaian Program Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase perbaikan perumahan akibat bencana kebakaran	0%	0%	0%
2.	Persentase penanganan bencana kebakaran	69,44%	60,41%	90%

14. Capaian Program Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Rasio Akseptor KB (%).

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)
2. Terlaksananya Pelatihan UPPKS dan Penerangan KIE melalui MUPEN KB serta Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB
3. Terlaksananya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.59** berikut ini :

Tabel 2.59
Capaian Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)	3,5	3,5	3,4	3,4	3,2
2.	Meningkatkan Pengetahuan Tentang kesehatan Reproduksi Remaja	-	-	-	-	-
3.	Rasio Akseptor KB (%)	78,3%	85%	88,0%	93,0%	97,0%
4.	Terlaksananya Pelatihan UPPKS dan Penerangan KIE melalui MUPEN KB serta Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB	-	-	-	-	-
5.	Terlaksananya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	-	-	-	-

15. Capaian Program Urusan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Persentase Komoditi Yang Peredarannya Diawasi
2. Pembinaan dan fasilitasi para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa
3. Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
4. Persentase peningkatan kemampuan iptek sistem produksi
5. Tingkat konektivitas, promosi dan integrasi Sistem Informasi Industri Potensial.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Persentase Peningkatan Perdagangan Internasional
2. Persentase ekspor produk daerah
3. Jumlah IKM yang difasilitasi
4. Jumlah pelaku Usaha (UMKM) yang berdaya saing dalam kualitas dan produk untuk pertumbuhan ekonomi daerah
5. Cakupan pembinaan terhadap UMKM
6. Persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
7. Persentase Koperasi Aktif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.60** berikut ini :

Tabel 2.60
Capaian Program Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase Komoditi Yang Peredarannya Diawasi	90%	90%	90%	90%	95%
2.	Persentase Peningkatan Perdagangan Internasional	-	-	-	-	-
3.	Persentase ekspor produk daerah	-	-	-	-	-
4.	Pembinaan dan fasilitasi para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa	40%	45%	50%	60%	75%
5.	Persentase pembinaan pedagang kakilima dan asongan	40%	40%	45%	45%	50%
6.	Persentase peningkatan kampuan iptek sistem produksi	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah IKM yang difasilitasi	60%	70%	80%	90%	95%
8.	Tingkat konektivitas, promosi dan integrasi Sistem Informasi Industri Potensial	-	-	-	-	-
9.	Jumlah pelaku Usaha (UMKM) yang berdaya saing dalam kualitas dan produk untuk pertumbuhan ekonomi daerah	85%	85%	85%	87%	87%
10.	Persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	85%	85%	85%	85%	87%
11.	Cakupan pembinaan terhadap UMKM	14.81%				
12.	Persentase Koperasi Aktif	64.52%	65.50%	66.80%	89.56%	53.75%

16. Capaian Program Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang kinerjanya naik, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan pelayanan investasi
2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan
3. Persentase Pemanfaatan Teknologi pelayanan Perizinan
4. Persentase Kualitas Pelayanan Perizinan
5. Persentase Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Tingkat realisasi kerjasama dan investasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.61** berikut ini :

Tabel 2.61
Capaian Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Tingkat realisasi kerjasama dan investasi	83%	93.16%	29.80%	11.00%	44.84%
2.	Meningkatkan kapasitas dan pelayanan investasi	85%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	0%	0%	0%	0%	74.33%
4.	Persentase Pemanfaatan Teknologi pelayanan Perizinan	0%	0%	0%	50.00%	50.00%
5.	Persentase Kualitas Pelayanan Perizinan	0%	0%	0%	0%	74.33%
6.	Persentase Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan	0%	0%	0%	100%	100%

17. Capaian Program Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang kinerjanya naik, yaitu :

1. Terlaksananya Prasarana Dasar Bagi Masyarakat
2. Terlaksananya Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Terlaksananya Pemberdayaan Komunitas Perumahan
2. Terlaksananya Penataan Dan Pembangunan Revitalisasi Areal Pemakaman Dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Informasi Data Kepemilikan Lahan
4. Tingkat Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Kepemilikannya
5. Tingkat Penyelesaian Konflik-konflik Kepemilikan Tanah
6. Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.62** berikut ini :

Tabel 2.62
Capaian Program Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Terlaksananya Prasarana Dasar Bagi Masyarakat	-	50%	-	61,30%	74,62%
2.	Terlaksananya Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat	-	-	-	89,9%	79,33%
3.	Terlaksananya Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	-	-	-	-
4.	Terlaksananya Penataan Dan Pembangunan Revitalisasi Areal Pemakaman Dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	80%	-	0,43%	-	0,86%
5.	Informasi Data Kepemilikan Lahan	-	-	-	-	-
6.	Tingkat Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Kepemilikannya	-	-	-	-	-
7.	Tingkat Penyelesaian Konflik-konflik Kepemilikan Tanah	-	-	-	-	-
8.	Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan	-	-	-	-	-

18. Capaian Program Urusan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang kinerjanya naik, yaitu :

1. Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip Pemerintah Daerah
2. Cakupan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kearsipan
3. Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan Perbaikan Sistem Administrasi Perkantoran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.63** berikut ini :

Tabel 2.63
Capaian Program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Cakupan Perbaikan Sistem Administrasi Perkantoran	82%	82%	85%	-	-
2.	Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip Pemerintah Daerah	83%	83%	85%	85%	85%
3.	Cakupan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kearsipan	85%	-	88%	-	88%
4.	Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	80%	-	85%	85%	85%

19. Capaian Program Urusan Pertanian

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang kinerjanya naik, yaitu :

1. Produksi Perikanan Tangkap
2. Persentase Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan
3. Penguatan Ketahanan Pangan
4. Persentase Hasil Penerapan Teknologi Tepat Guna
5. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan dan Semusim
6. Persentase Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan
7. Persentase Penurunan Penyakit Hewan
8. Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian
9. Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas
2. Cakupan Sistem Penyuluh Perikanan
3. Cakupan Budidaya Laut, Air Paya dan Tawar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.64** berikut ini :

Tabel 2.64
Capaian Program Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Produksi Perikanan Tangkap	85%	8.472.630 Kg	7.943.430 Kg	8.380.030 Kg	9.246.365 Kg
2.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	85%	2	0	0	0
3.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	85%	2	0	0	0
4.	Jumlah Produksi Ikan Hasil Budidaya	85%	23.570 Kg	54.800 Kg	62.600 Kg	198.000 Kg
5.	Jumlah Pendapatan Nelayan	85%	-	-	-	-
6.	Cakupan Sistem Penyuluh Perikanan	85%	-	-	-	-
7.	Cakupan Budidaya Laut, Air Paya dan Tawar	85%	-	-	-	-
8.	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani	80%	Tidak Terdata	13 Kegiatan	8 Kegiatan	11 Kegiatan
9.	Penguatan Ketahanan Pangan	80%	233.251,74 Ton	193.841,41 Ton	202.040,5 Ton	214.914,06 Ton
10.	Persentase Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan	80%	2.206.210,35 Ton	1.005.718,60 Ton	1.084.259,04 Ton	1.026.917,84 Ton
11.	Persentase Hasil Penerapan Teknologi Tepat Guna	80%	-	4 Jenis Pembangunan	3 Jenis Pembangunan	4 Jenis Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
				Fisik	Fisik	Fisik
12.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan dan Semusim	80%	181.768,26 Ton	105.221,18 Ton	43.814,66 Ton	44.890,90 Ton
13.	Persentase Penurunan Penyakit Hewan	80%	Brucelosis	Brucelosis	Rabies 1 Kasus, Brucelosis 20 Kasus	Rabies 1 Kasus, Brucelosis 25 Kasus
14.	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	80%	121.273	106.263 Kg	108.720 Kg	110.520 Kg
15.	Persentase Pengenalan Produk Peternakan	80%	-	-	-	-
16.	Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	80%	200	250	250	250

20. Capaian Program Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 target yang ditetapkan dan realisasi masing-masing program/kegiatan yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa
2. Persentase pelatihan masyarakat desa.
3. Persentase masyarakat dalam membangun desa
4. Tersedianya aparatur desa yang handal
5. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam
6. epembangunan di perdesaan
7. Persentase Pemberdayaan Keluarga
8. Tersedianya Profil Desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.65** berikut ini :

Tabel 2.65
Capaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa.	80%	81%	82%	83%	84%
2.	Persentase pelatihan masyarakat desa.	80%	82%	83%	84%	85%
3.	Persentase masyarakat dalam membangun desa	80%	82%	83%	84%	85%
4.	Tersedianya aparatur desa yang handal	80%	81%	81%	82%	84%
5.	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di perdesaan	60%	62%	63%	64%	66%
6.	Persentase Pemberdayaan Keluarga	80%	81%	83%	84%	84%
7.	Tersedianya Profil Desa	80%	82%	84%	85%	86%

21. Capaian Program Urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban
2. Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas
3. Persentase penanganan penyalahgunaan Narkoba.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.66** berikut ini :

Tabel 2.66
Capaian Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	80%	80%	85%	85%	85%
2.	Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas	80%	85%	85%	85%	85%
3.	Persentase penanganan penyalahgunaan Narkoba	80%	80%	80%	80%	80%

22. Capaian Program Urusan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkanpelatihankerja
2. Jumlah pencari Kerja yang ditempatkan
3. Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan Industrial.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.67** berikut ini :

Tabel 2.67
Capaian Program Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	RasioTenagaKerja yang mendapatkanpelatihankerja	60%	-	1,01%	0,50%	1,08%
2.	JumlahpencariKerja yang ditempatkan	20%	32,14%	39,52%	60,38%	78,40%
3.	Rasiopenyelesaiankasusperselisihanhubungan Industrial	80%	60%	40%	65%	50%

23. Capaian Program Urusan Dinas Kesehatan

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Tersedianya Obat dan Perbekalan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2. Cakupan Pemakaian Obat Generik di Masyarakat
3. Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin
4. Cakupan Tenaga Medis dan Paramedis yang mempunyai STR
5. Cakupan Izin Praktek Tenaga Kesehatan
6. Cakupan gizi buruk mendapat perawatan
7. Cakupan Pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin
8. Rasio Puskesmas/Jlh Penduduk
9. Cakupan Puskesmas Pembantu/Puskesmas
10. Cakupan Puskesmas Keliling/Puskesmas
11. Cakupan pelayanan gawat darurat yang ditangani sarana kesehatan
12. Pemantauan Kesehatan Lansia.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Anak Balita
2. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.68** berikut ini :

Tabel 2.68
Capaian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Tersedianya Obat dan Perbekalan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	91%	92%	93%	94%	95%
2.	Cakupan Pemakaian Obat Generik di Masyarakat	82%	85%	87%	89%	91%
3.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin	53%	55%	57%	59%	60%
4.	Cakupan Tenaga Medis dan Paramedis yang mempunyai STR	60%	70%	75%	80%	90%
5.	Cakupan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	75%	80%	80%	80%	85%
6.	Cakupan balita kurang gizi	-	1%	1%	1%	7%
7.	Cakupan gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Rasio Puskesmas/Jlh Penduduk	50.00%	53.00%	56.00%	58.00%	61.11%
10.	Cakupan Puskesmas Pembantu/Puskesmas	19.733 Orang	19.693 Orang	19.871 Orang	20.051 Orang	20.366 Orang
11.	Cakupan Puskesmas Keliling/Puskesmas	6.156 Orang	6.445 orang	6.505 Orang	6.562 Orang	6.665 Orang

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
12.	Cakupan pelayanan gawat darurat yang ditangani sarana kesehatan	75%	80%	85%	92%	100%
13.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Anak Balita	90%	94%	96%	99%	90%
14.	Pemantauan Kesehatan Lansia	80%	78%	86%	85%	92%
15.	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	5%	5%	5%	8%	7%

24. Capaian Program Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam hari besar keagamaan
2. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Forum keagamaan.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Meningkatkan keamanan lingkungan dan terlaksananya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah
2. Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap politik dan terlaksananya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.69** berikut ini :

Tabel 2.69
Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam hari besar keagamaan	80%	82%	82%	83%	85%
2.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Forum keagamaan	80%	85%	86%	86%	87%
3.	Meningkatkat keamanan lingkungan dan terlaksananya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	80%	–	–	80%	75%
4.	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap politik dan terlaksananya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	80%	–	–	67%	83%

25. Capaian Program Urusan Kecamatan Aek Kuo

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan layanan administrasi yang tertangani
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD
3. Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan
5. Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
6. Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan
7. Tingkat Pelayanan masyarakat di desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.70** berikut ini :

Tabel 2.70
Capaian Program Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	80%	80%	80%	85%	85%
2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD	80%	80%	85%	90%	90%
3.	Persentase tingkat kehadiran pegawai	80%	80%	80%	85%	85%
4.	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan	85%	85%	85%	85%	90%
5.	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan	80%	80%	80%	85%	85%
7.	Tingkat Pelayanan masyarakat di desa	80%	80%	80%	85%	85%

26. Capaian Program Urusan Kecamatan Aek Natas

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan layanan administrasi yang tertangani
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD
3. Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan
5. Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
6. Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan
7. Tingkat Pelayanan masyarakat di desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.71** berikut ini :

Tabel 2.71
Capaian Program Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	80%	80%	85%	85%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	80%	85%	90%	90%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	80%	80%	80%	85%	85%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85%	85%	85%	85%	90%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan	80%	80%	80%	85%	85%
7.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Desa/Kelurahan	80%	80%	80%	85%	85%

27. Capaian Program Urusan Kecamatan Kualuh Hulu

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan layanan administrasi yang tertangani
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD
3. Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Tingkat Pelayanan masyarakat di desa.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.72** berikut ini :

Tabel 2.72
Capaian Program Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani	80%	80%	80%	80%	85%
2.	Terpenuhnya Sarana dan Prasarana SKPD	80%	80%	85%	85%	90%
3.	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai	80%	80%	80%	80%	85%
4.	Persentase Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85%	85%	85%	0%	0%
5.	Tingkat Pelayanan Masyarakat Desa	80%	80%	80%	85%	85%

28. Capaian Program Urusan Kecamatan Kualuh Leidong

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Persentase SOP Pelayanan
2. Persentase Penambahan Anggaran
3. Tersedianya Bantuan Sosial
4. Persentase Penangan Masyarakat Miskin
5. Persentase Penangan Bencana Alam
6. Persentase Pengurusan IMB
7. Persentase Penangan Kejahatan dan Kriminal.

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan
2. Persentase Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.73** berikut ini

Tabel 2.73
Capaian Program Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase SOP Pelayanan	70%	72%	75%	75%	77%
2.	Persentase Penambahan ASN	0%	0%	0%	0%	1%
3.	Persentase Penambahan Anggaran	80%	85%	90%	95%	97%
4.	Terlaksananya Pelatihan Aparatur	0%	0%	0%	0%	1%
5.	Tersedianya Bantuan Sosial	55%	55%	55%	55%	55%
6.	Persentase Penangan Masyarakat Miskin	45%	45%	45%	50%	50%
7.	Persentase Penangan Bencana Alam	50%	50%	50%	60%	65%
8.	Persentase Pengurusan IMB	40%	42%	45%	45%	45%
9.	Persentase Penertiban Pedagang Kaki Lima	0%	0%	0%	0%	0%
10.	Persentase Penangan Kejahatan dan Kriminal	35%	40%	45%	47%	50%

29. Capaian Program Urusan Kecamatan Kualuh Hilir

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan layanan administrasi yang tertangani
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD
3. Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan
5. Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
6. Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan
7. Tingkat Pelayanan masyarakat di desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.74** berikut ini :

Tabel 2.74
Capaian Program Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	80%	80%	80%	85%	85%
2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD	80%	80%	85%	90%	90%
3.	Persentase tingkat kehadiran pegawai	80%	80%	80%	85%	85%
4.	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan	85%	85%	85%	85%	90%
5.	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan	80%	80%	80%	85%	85%
7.	Tingkat Pelayanan masyarakat di desa	80%	80%	80%	85%	85%

30. Capaian Program Urusan Kecamatan Kualuh Selatan

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan layanan administrasi yang tertangani
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD
3. Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan
5. Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
6. Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan
7. Tingkat Pelayanan masyarakat di desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.75** berikut ini :

Tabel 2.75
Capaian Program Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	80%	80%	80%	85%	85%
2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD	80%	80%	85%	90%	90%
3.	Persentase tingkat kehadiran pegawai	80%	80%	80%	85%	85%
4.	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan	85%	85%	85%	85%	90%
5.	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan	80%	80%	80%	85%	85%
7.	Tingkat Pelayanan masyarakat di desa	80%	80%	80%	85%	85%

31. Capaian Program Urusan Kecamatan NA IX-X

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan layanan administrasi yang tertangani
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD
3. Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan
5. Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
6. Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan
7. Tingkat Pelayanan masyarakat di desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.76** berikut ini :

Tabel 2.76
Capaian Program Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	80%	80%	80%	85%	85%
2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD	80%	80%	85%	90%	90%
3.	Persentase tingkat kehadiran pegawai	80%	80%	80%	85%	85%
4.	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan	85%	85%	85%	85%	90%
5.	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan	80%	80%	80%	85%	85%
7.	Tingkat Pelayanan masyarakat di desa	80%	80%	80%	85%	85%

32. Capaian Program Urusan Kecamatan Marbau

Berdasarkan capaian program RPJMD 2016-2019 yang sudah memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan layanan administrasi yang tertangani
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD
3. Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan
5. Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
6. Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan
7. Tingkat Pelayanan masyarakat di desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.77** berikut ini :

Tabel 2.77
Capaian Program Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	80%	80%	85%	85%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%	85%	90%	90%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	80%	80%	80%	85%	85%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85%	85%	85%	85%	90%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan	80%	80%	80%	85%	85%
7.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Desa/Kelurahan	80%	80%	80%	85%	85%

B. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR PER MISI

1. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Pada Misi Pertama : Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa.

Ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikator kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2016-2021, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan pada misi pertama yaitu : Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa. Berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD.

Pada misi ini, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5tahun, yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
5. Mengembangkan tatakelola pemerintahan berbasis e-government.

Untuk mencapai sasaran pembangunan diatas, maka program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pertama tersebut antara lain :

1. Program perencanaan pembangunan
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya
8. Program penataan peraturan perundang-undangan
9. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
10. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
11. Program peningkatan kapasitas aparaturnya
12. Program profil desa
13. Program penataan daerah otonomi baru
14. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Bidang Pembangunan
15. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
16. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
17. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana
18. Program pendidikan kedinasan
19. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya
20. Program pembinaan dan pengembangan aparaturnya
21. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
22. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
23. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
24. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
25. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
26. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
27. Program Penataan Administrasi Kependudukan
28. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
29. Program pengembangan data/informasi
30. Program pengembangan komunikasi, informasi dan Media massa
31. Program kerjasama informasi dan media massa

- 32. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- 33. Program perencanaan sosial dan budaya
- 34. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat Tumbuh
- 35. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja program pembangunan pada misi pertama : Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa, dapat dilihat pada **Tabel 2.78** berikut :

Tabel 2.78

**Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 1 :
Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan Guna
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih
dan Berwibawa Berlandaskan Iman dan Takwa.**

(Lihat di Tabel EXCEL)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu selama empat tahun efektif RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Periode 2016-2019), telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Mencermati realisasi kinerja di atas, maka kinerja program pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target.

Beberapa indikator kinerja yang diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun perencanaan, terdapat pada program dan kegiatan seperti :

1. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
2. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dalam pelaksanaan musrenbang
3. Jumlah dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD yang ditetapkan menjadi PERDA/PERKADA
4. Jumlah aparatur desa yang handal
5. Media informasi desa;
6. Kapasitas dan pelayanan investasi
7. Persentase indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan
8. Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi
9. Terpenuhinya kompetensi SDM aparatur sipil negara sesuai dengan standar.
10. Jumlah Anjab dan ABK SKPD
11. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
12. Sertifikasi aset pemerintah daerah
13. Cakupan perbaikan sistem administrasi kearsipan
14. Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip pemerintah daerah
15. Cakupan perbaikan sarana prasarana kearsipan
16. Peningkatan pengelolaan arsip daerah
17. Persentase cakupan tertib Administrasi Kependudukan
18. Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi

19. Integrasi data SKPD dalam Labuhanbatu utara dalam angka
20. Promosi daerah melalui mass media
21. Persentase kerjasama dengan media mass.

Sedangkan indikator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indikator :

1. Pesentase program legislasi Kab. Labuhan batu Utara
2. Persentase kunjungan/ pelaksanaan tugas KDH
3. Persentase capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4. Persentase pencapaian Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
5. Indeks kepuasan masyarakat
6. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat
7. Tingkat akuntabilitas pemerintahan desa
8. Fasilitasi Nama Rupa Bumi, Pilar, dan Pemantapan Otonomi Daerah
9. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah bidang pembangunan
10. Jumlah Anjab dan ABK SKPD
11. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
12. Sertifikasi aset pemerintah daerah
13. Cakupan perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
14. Persentase cakupan tertib Administrasi Kependudukan
15. Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi
16. Integrasi data SKPD dalam Labuhanbatu utara dalam angka
17. Promosi daerah melalui massa media
18. Persentase kerjasama dengan media massa
19. Persentase pengidentifikasian sumber daya ekonomi daerah
20. Persentase kesejahteraan masyarakat
21. Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis dan cepat Tumbuh
22. Meningkatkan kinerja perencanaan.

2. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Pada Misi Kedua : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat.

Ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikator kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2016-2019, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Program Pengelolaan areal pemakaman
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
5. Program peningkatan pelayanan angkutan
6. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
7. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
8. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
9. Program Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
11. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
12. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
13. Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh
14. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
15. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
16. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
17. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
18. Program pembangunan turap/talud/bronjong

19. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan turap/talud/bronjong
20. Program Lingkungan Sehat Perumahan
21. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
22. Program pengelolaan areal pemakaman
23. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
24. Program Pengembangan, dan pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
25. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
26. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
27. Program pengendalian banjir
28. Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Pada misi ini, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun, yaitu :

1. Pembangunan sarana perkantoran dan pelayanan umum lainnya
2. Perbaikan dan peningkatan jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan
3. Perbaikan dan peningkatan atas kebutuhan saluran irigasi, sarana air minum dan drainase.

Selama empat tahun efektif, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Mencermati realisasi kinerja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kinerja program pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target. Indikator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indikator :

1. Pembangunan Gedung pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Terlaksananya pembangunan Pagar Pembatas areal Pemakaman
3. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (KM)
4. Pesentase ketersediaan alat berat

5. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan angkutan Umum
6. Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik
7. Persentase kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik
8. Persentase tanggap darurat jalan dan jembatan
9. Persentase terbangunnya system informasi database jalan dan jembatan
10. Peningkatan infrastruktur perdesaan
11. Terselenggaranya perencanaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
12. Jumlah sarana pelabuhan
13. Tersedianya dokumen dan data pengembangan wilayah
14. Bertambahnya rambu-rambu lalu lintas
15. Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ
16. Meningkatnya prasaran peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
17. Rasio jaringan irigasi dengan luas lahan.
18. Tersedianya air untuk sentra-sentra tanaman pangan
19. Tersedianya Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat
20. Terlaksananya pemberdayaan Komunitas Perumahan
21. Terlaksananya Penataan dan pembangunan revitalisasi areal pemakaman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
22. Meningkatnya ketersediaan air bersih untuk masyarakat pesisir
23. Persentase sumber daya air berfungsi dengan baik
24. Persentase jaringan air bersih
25. Persentase Panjang drainase yang dibangun.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja program pembangunan pada misi kedua : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat, dapat dilihat pada **Tabel 2.79** berikut :

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 2 :
Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana,
Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat

(Lihat di Tabel EXCEL)

2. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Pada Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK).

Pada misi ini, ada beberapa target pembangunan yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikator kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2016-2019, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan non Formal
5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik
6. Program manajemen pelayanan pendidikan
7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
8. Program pendidikan anak usia dini
9. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
10. Program pendidikan menengah
11. Program pendidikan non formal
12. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
15. Program pengawasan obat dan makanan
16. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
18. Program pengembangan lingkungan sehat
19. Program lingkungan sehat perumahan
20. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
22. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
23. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
24. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
25. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
26. Program keluarga berencana
27. Program Pelayanan Kontrasepsi
28. Program kesehatan reproduksi remaja
29. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
30. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling/KRR
31. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
32. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
33. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak
34. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
35. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan
36. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
37. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
38. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
39. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
40. Program Pengembangan nilai budaya
41. Program pengelolaan kekayaan budaya
42. Program pengelolaan keragaman budaya

43. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
44. Program peningkatan peran serta kepemudaan
45. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
46. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
47. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya
48. Program Pembinaan dan pengembangan kegiatan kemasyarakatan
49. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
50. Program pembinaan anak terlantar
51. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
52. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
53. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
54. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
55. Program Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
56. program pembinaan kelembagaan keagamaan
57. Program pengembangan wawasan kebangsaan
58. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
59. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
60. Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama
61. Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
62. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
63. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Pada misi ini, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun, yaitu :

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya cakupan kualitas sarana dan prasaran kesehatan

5. Menciptakan implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal
6. Terwujudnya kehidupan harmoni sesama dan antar umat beragama.

Selama empat tahun efektif, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Mencermati realisasi kinerja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kinerja program pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target. Indikator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indikator :

1. Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/D4
2. Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/D4
3. Persentase Jumlah sekolah yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional
4. Persentase jumlah pemustaka
5. Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia dini
6. Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI
7. Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs
8. Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK
9. Cakupan Peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan Non-formal
10. Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
11. Cakupan pengawasan obat dan makanan
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
13. Tersedianya Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat
14. Penderita penyakit menular ditangani

15. Persentase sarana/prasarana kesehatan yang memiliki sertifikat izin (Kebutuhan Tenaga SDM dan Peralatan di Rumah Sakit);
16. Persentasi usia perkawinan
17. Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
18. Persentase tenaga pendamping yang mampu menggerakkan partisipasi
19. Indeks pembangunan gender
20. Persentase perempuan dalam kelembagaan
21. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
22. Persentase Pekerja Perempuan Pada Program Lembaga Pemerintah
23. Persentase Pekerja Perempuan Pada Program Lembaga Swasta
24. Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai (Tepenuhinya Peralatan dan Kebutuhan Rumah sakit)
25. Terpeliharanya Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Sakit
26. percepatan pembangunan rumah sakit daerah
27. Peningkatan pelestarian dan aktualisasi adat/budaya yang ada di Labuhanbatu Utara
28. Perlindungan bangunan cagar budaya
29. Persentase Pergelaran dan festival budaya
30. Cakupan misi seni budaya
31. Persentase Penanganan Keluarga Miskin
32. Persentase Pembinaan dan pengembangan kegiatan kemasyarakatan
33. Persentase partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
34. Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan
35. Persentase penanganan Penyandang cacat dan trauma
36. Persentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan Napza
37. Persentase Penanganan Panti asuhan dan panti jompo

- 38. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial
- 39. Tingkat kerukunan antar umat beragama
- 40. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Hari Besar Keagamaan
- 41. Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum keagamaan
- 42. Persentase penanganan penyalahgunaan Narkoba
- 43. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat
- 44. Meningkatnya rasa nyaman dan aman dalam bermasyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja program pembangunan pada misi ketiga : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK), dapat dilihat pada **Tabel 2.80** berikut :

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 3 :
Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Mandiri
Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan
Iman dan Taqwa (IMTAK)

(Lihat di Tabel EXCEL)

3. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Pada Misi Keempat : Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber daya Lokal Dan Berwawasan Lingkungan

Dalam RPJMD, ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikator kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2016-2019, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain :

1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
4. Program peningkatan produksi hasil peternakan
5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
7. Program pemantapan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
8. Program peningkatan kesejahteraan petani
9. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
10. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
11. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
12. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
13. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
14. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

15. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
16. Program peningkatan pelayanan pemerintah bidang ekonomi
17. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
18. Program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri
19. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
20. Program pengembangan industri kecil dan menengah
21. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
22. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
23. Program pengembangan pemasaran pariwisata
24. Program pengembangan destinasi pariwisata
25. Program pengembangan kemitraan
26. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
27. Program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri
28. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
29. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
30. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
31. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
32. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
33. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
34. Program pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
35. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
36. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
37. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
38. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
39. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
40. Program peningkatan pengendalian polusi
41. Program perencanaan tata ruang
42. Program pemberdayaan komunitas perumahan
43. Program pemanfaatan ruang
44. Program pengembangan perumahan

45. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
46. Program pengendalian kebakaran
47. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Mencermati realisasi kinerja di atas, maka kinerja program pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target.

1. Ada beberapa indikator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indikator
2. persentase jaringan irigasi
3. Persentase peningkatan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan
4. Persentase peningkatan produksi hasil peternakan
5. persentase penurunan penyakit hewan
6. peningkatan pengawasan subsidi barang untuk masyarakat (cakupan pelayanan pemerintah bidang ekonomi)
7. persentase peningkatan perdagangan internasional
8. pembinaan dan fasilitasi para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa
9. persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
10. jumlah IMKM yang difasilitasi
11. persentase peningkatan kemampuan teknologi industri
12. tingkat konektivitas promosi dan integrasi sistem informasi industri potensial
13. jumlah kunjungan wisatawan
14. pengembangan objek daya tarik wisata
15. persentase pengembangan kemitraan kepariwisataan
16. persentase peningkatan kemampuan iptek sistem produksi
17. persentase peningkatan pasar tradisional (pembinaan dan fasilitasi para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa)
18. persentase penanganan pencemaran lingkungan

19. persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam
20. persentase perlindungan sumber daya alam daerah
21. persentase perlindungan sumber daya hutan (cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan)
22. persentase pembinaan dan penerbitan hasil hutan (cakupan pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan)
23. persentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
24. persentase pemberian izin kegiatan pertambangan
25. pengembangan ketenagalistrikan
26. persentase peningkatan debit air dan penurunan luas lahan kritis
27. persentase pemanfaatan izin ruang
28. persentase sarana dan kinerja pengolahan sampah
29. persentase AMDAL
30. persentase pengendalian polusi dan pencemaran
31. persentase pemanfaatan ruang dan lahan yang telah selesai diproses sesuai peruntukan (terlaksananya pemberdayaan komunitas perumahan)
32. persentase masyarakat penyusunan dokumen tata ruang (terlaksananya prasarana dasar bagi masyarakat)
33. persentase penanganan bencana kebakaran
34. persentase pengendalian kebakaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja program pembangunan pada misi keempat : Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan, dapat dilihat pada **Table 2.81** berikut :

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 4 :
Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat
Melalui Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber daya Lokal
dan Berwawasan Lingkungan

(Lihat di Tabel EXCEL)

5. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Pada Misi Kelima : Meningkatkan Standar Hidup Layak, Keamanan dan Kenyamanan

Dalam RPJMD, ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikator kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2016-2019, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain :

1. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
2. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi pelayanan perizinan
3. Program peningkatan pelayanan perizinan
4. Program peningkatan pembinaan dan sosialisasi perizinan
5. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
6. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
9. Program pengendalian pemanfaatan ruang
10. Program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah
11. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
12. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
13. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
14. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
15. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
16. Program peningkatan kesempatan kerja

17. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
18. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
19. Pengembangan agribisnis
20. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
21. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
22. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
24. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
25. Program rehabilitasi hutan dan lahan
26. Program perencanaan dan pengembangan hutan
27. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
28. Program pemanfaatan kawasan hutan industri
29. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
30. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
31. Program pengembangan budidaya perikanan
32. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
33. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
34. Program pengembangan perikanan tangkap
35. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
36. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa
37. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
38. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

Mencermati realisasi kinerja di atas, maka kinerja program pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target.

Ada beberapa indikator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indikator :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Terlaksananya informasi pelayanan (persentase pemanfaatan teknologi pelayanan perizinan)
3. Peningkatan jumlah layanan perizinan
4. Peningkatan jumlah investasi yang diterbitkan (persentase pembinaan dan sosialisasi perizinan)
5. Meningkatnya kapasitas dan ketepatan pelayanan perizinan
6. Tingkat realisasi kerjasama dan investasi
7. Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban
8. Persentase nilai investasi (meningkatkan kapasitas dan pelayanan investasi)
9. Pemanfaatan peraturan tata ruang
10. Ketersediaan sarana prasarana yang mantap
11. Jumlah pelaku usaha (umkm) yang dapat berdaya saing dalam kualitas dan produk untuk pertumbuhan ekonomi daerah
12. Jumlah produk umkm yang dipromosikan pada pameran dalam daerah/luar daerah jumlah umkm yang diberi bantuan permodalan (persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif)
13. Jumlah pelatihan/magang diluar daerah dalam rangka peningkatan daya saing untuk menciptakan barang/jasa kualitas (cakupan pembinaan terhadap UMKM)
14. Persentase koperasi aktif
15. Rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja
16. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
17. Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial
18. Pengetahuan ketahanan pangan
19. Meningkatnya produksi komoditas (cakupan berkembangnya agribisnis)
20. Persentase pemasaran produksi pertanian dan perkebunan
21. Persentase hasil penerapan teknologi tepat guna

22. Persentase penurunan penyakit ternak (persentase penurunan penyakit hewan)
23. Persentase harga produksi pertanian dan perkebunan
24. Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan dan semusim
25. Persentase pengembangan bibit
26. Persentase pengembangan hutan
27. Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
28. Persentase pemanfaatan lahan
29. Persentase pengenalan produk peternakan
30. Persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan
31. Jumlah produksi ikan hasil budidaya dan tangkap
32. Persentase luas kawasan budi daya
33. Persentase peningkatan sistem penyuluhan
34. Jumlah pendapatan nelayan
35. Persentase terbedayakan masyarakat pesisir.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja program pembangunan pada misi kelima : Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan, dapat dilihat pada **Tabel 2.81** berikut :

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 5 :
Meningkatkan Standar Hidup Layak, Keamanan dan
Kenyamanan

(Lihat di Tabel EXCEL)

Tabel 2.78

Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 1 : Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Iman dan Takwa

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																					
Misi 1 : Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa.																					
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan																					
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	80.00	%	90	80	80	85	85	80	80	80		100	100	94.12	0.00	60.00	66.67	1. Data realisasi opd Bappeda tidak ada
			Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dalam pelaksanaan musrenbang	95.00	%	95	95	95	95	95	95	95	95		100	100	100.00		71.25	75.00	1. Data realisasi opd Bappeda tidak ada 2. Pada Bab VII, tidak ada indikator kinerja tsb 3. pada tabel 8 tidak ada indikator kinerja tsb
			Jumlah dokumen Perencanaan RPJMD dan RKPD yang ditetapkan menjadi PERDA/PERKADA	2.00	Buku	1	1	1	1		1	1	1		100.0	100.0	100.0		0.75	75.0	1. Data realisasi opd Bappeda tidak ada 2. Pada Bab VII, tidak ada indikator kinerja tsb 3. pada tabel 8 tidak ada indikator kinerja tsb
Tujuan 2 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi																					
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Hasil/opini Laporan Keuangan Daerah	100.00	%	100	100	100	100	100	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pesentase program legislasi Kab. Labuhan batu Utara	90.00	%	95	90	95	95	95					0	0	0.00	0.00	-	-	1. data realisasi sekretariat dprd tidak ada
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kunjungan/ pelaksanaan tugas KDH	90.00	%	95	80	85	85	90					0	0	0.00	0.00	-	-	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron (perbedaan capaian target) 2. data realisasi/capaian opd sekretariat daerah tidak ada
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	Persentase capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	90.00	%	95	90	90	92	92	61.77	70.42	74.01	64.16	68.6333	78.2444	80.45	69.74	67.59	71.15	
		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	Persentase pencapaian Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	85.00	%	90	85	85	85	88	47.68	24.33	0	0	56.0941	28.6235	0.00	0.00	18.00	20.00	1. data realisasi opd inspektorat untuk tahun 2018 dan 2019 kosong
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase peningkatan SDM aparatur pengawas	80.00	%	90	80	80	85	85	77.99	91.35	50.93	78.44	97.4875	114.188	59.92	92.28	74.68	82.98	
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program penataan peraturan perundang-undangan.	Indeks kepuasan masyarakat.	80.00	%	90	80	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. data realisasi opd inspektorat untuk tahun 2016- 2019 kosong
		Program mengintensifkan penangan pengaduan masyarakat.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	85.00	%	95									-	-	-	-	-	-	1. data pada tabel 8 (capaian/target) tidak ada indikator kinerja tsb. 2. data realisasi opd dinas pemberdayaan masyarakat tidak ada
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Tingkat akuntabilitas pemerintahan desa.	80.00	%	90	80	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. data realisasi opd badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kosong
		Program Peningkatan kapasitas aparatur desa	Jumlah aparatur desa yang handal	-	%	82	80	85	85	87	81	81	82	84	101.25	95.2941	96.47	96.55	82.00	100.00	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron (perbedaan capaian target)
		Program Profil desa	Media informasi desa	80.00	%	90	80	80	85	85	82	84	85	86	102.5	105	100.00	101.18	84.25	93.61	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	fasilitasi Nama Rupa Bumi, Pilar, dan Pemantapan Otonomi Daerah	-	%	80	80	85	85	90					0	0	0.00	0.00	-	-	1. data realisasi opd sekretariat daerah tidak ada 2.pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron (perbedaan capaian target)
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Bidang Pembangunan	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah bidang pembangunan	C		B	80	85	85	90					0	0	0.00	0.00	-	-	1. data realisasi opd sekretariat daerah tidak ada 2.pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron (perbedaan capaian target)

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																					
Misi 1 : Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa.																					
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	Realisasi kerjasama dan investasi	83.00	%	90	83	83	83	85	93.16	29.8	11	44.84	112.241	35.9036	13.25	52.75	44.70	49.67	
		Program peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi	Kapasitas dan pelayanan investasi	85.00	%	90	85	85	85	88	100	100	100	100	117.647	117.647	117.65	113.64	100.00	111.11	
		Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	-	%	90		83	83	85	0	0	0	74.33	-	0	0.00	87.45	18.58	20.65	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron (perbedaan capaian target) 2. data target 2016 kosong
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program pendidikan kedinasan	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	70.00	%	95	70	80	85	85	80	77	80	84	114.286	96.25	94.12	98.82	80.25	84.47	
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.	Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar.	70.00	%	95	70	75	80	85	72	72	75	78	102.857	96	93.75	91.76	74.25	78.16	
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Anjab dan ABK SKPD	70.00	%	95	70	75	80	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. data realisasi opd bkn kosong
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP		WTIP									-	-	-	-	-	-	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron (perbedaan capaian target) 2. data realisasi/capaian opd badan pengelolaan keuangan tidak ada
		Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah	Sertifikasi aset pemerintah daerah	-		80									-	-	-	-	-	-	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron 2. data realisasi/capaian opd tidak ada
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Cakupan perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	82.00	%	88	82	85	85	85	82	85	-	-	100	100	-	-	41.75	47.44	1. data realisasi /capaian opd dinas perpustakaan dan kearsipan hanya 2016-2017
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.	Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip pemerintah daerah	80.00	%	90	83	85	85	85	83	85	85	85	100	100	100.00	100.00	84.50	93.89	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 kearsipan(target)tidak sinkron
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan perbaikan sarana prasarana kearsipan	85.00	%	90	85	88	88	88	-	88	-	88	-	100	-	100.00	44.00	48.89	1. data realisasi opd perpustakaan dan kearsipan tahun 2016 dan 2018 kosong
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.	Peningkatan pengelolaan arsip daerah	80.00	%	90	80	85	85	85	-	85	85	85	-	100	100.00	100.00	63.75	70.83	1. data realisasi opd perpustakaan dan kearsipan tahun 2016 kosong
4.	Mengembangkan tatakelola pemerintahan berbasis e-govermant	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan tertib Administrasi Kependudukan	100.00	%	100									-	-	-	-	-	-	1. data tabel 8 (capaian/target)indikator kinerja tidak ada 2. data realisasi opd dinas kependudukan tidak ada
		Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi	75.00	%	90	-	85	85	85	-	85	85	85	-	100	100.00	100.00	63.75	70.83	1. data tabel 8 (target) opd dinas komunikasi tidak ada pada tahun 2016. 2. data realisasi 2015 dan 2016 tidak ada
		Program pengembangan data/informasi	Integrasi data SKPD dalam Labuhanbatu utara dalam angka	90.00	%	95									-	-	-	-	-	-	1. data capaian/ target tabel 8 untuk indikator ini tidak ada 2. data realisasi opd Bappeda tidak ada
		Program pengembangan komunikasi, informasi dan Media massa	Promosi daerah melalui mass media	80.00	%	90													-	-	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron 2. data realisasi dinas komunikasi tidak ada
		Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase kerjasama dengan media mass	85.00	%	90	85	90	90	90	-	90	90	90	-	100	100.00	100.00	67.50	75.00	1. data realisasi opd diskom tahun 2016 tidak ada
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase pengidentifikasian sumberdaya ekonomi daerah	80.00	%	90	85	85	85	85					0	0	0.00	0.00	-	-	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron 2. data realisasi opd bappeda tidak ada
		Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase kesejahteraan masyarakat	80.00	%	90	80	80	80	80					0	0	0.00	0.00	-	-	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron (capaian target) 2. data realisasi bappeda tikda ada
		Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat Tumbuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis dan cepat Tumbuh	75.00	%	80	70	70	70	70					0	0	0.00	0.00	-	-	1. pada bab vii (kebijakan strategi) dan pada tabel 8 (target)tidak sinkron (capaian target) 2. data realisasi bappeda tidak ada

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																					
Misi 1 : Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa.																					
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkat kinerja perencanaan	80.00	%	80	80	80	80					0	0	0.00	0.00	-	-	1. data realisasi bappeda tidak ada	
Rata-rata capaian kinerja (%)														62.4	61.7	54.0	54.3	30.9	37.1		
Predikat Kinerja														rendah	rendah	rendah	rendah	sangat rendah	sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara berikutnya :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara berikutnya :																					

Tabel 2.79

Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 2 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																					
Misi 2 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat																					
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
Tujuan 1 : Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik																					
1.	Pembangunan sarana perkantoran dan pelayanan umum lainnya	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan Gedung pemerintahan Kab. Labuhanbatu Utara	40.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data tabel 8 tidak ada indikator kinerja tersebut 2. tidak sinkron dengan bab VII kebijakan umum dan program 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program Pengelolaan areal pemakaman	Terlaksananya pembangunan Pagar Pembatas areal Pemakaman	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data tabel 8 tidak ada indikator kinerja tersebut 2. tidak sinkron dengan bab VII kebijakan umum dan program 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
2.	Perbaikan dan peningkatan jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (KM)	155,680.00	KM	155,700	155,660	155,670	155,670		0	236,522	236,522		0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data tabel 8 tidak ada indikator kinerja tersebut 2. tidak sinkron dengan bab VII kebijakan umum dan program 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pesentase ketersediaan alat berat	65.00	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja tersebut nilai nya kosong 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan angkutan Umum	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	88.00	88.00	90.00	106.25	103.53	103.53	105.88	87.75	97.50	
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	60.00	%	80.00	60.00	60.00	75.00	75.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 nilai nya tidak sinkron dengan bab VII 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik	70.00	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja tersebut nilai nya kosong 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase tanggap darurat jalan dan jembatan		%	60.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja tersebut nilai nya kosong 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program Pembangunan system informasi/ data base jalan dan jembatan	Persentase terbangunnya system informasi database jalan dan jembatan		%	60.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja tersebut nilai nya kosong 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan.	Peningkatan infrastruktur perdesaan.	70.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja tersebut nilai nya kosong 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terselenggarannya perencanaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	85.00	%	80.00	85.00	88.00	88.00	88.00	87.00	90.00	92.00	93.00	102.35	102.27	104.55	105.68	90.50	113.13	1. data pada tabel 8 dengan bab VII Kebijakan umum dan program nilainya(capaian indikator kinerja) dan penulisan tidak sinkron. 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Jumlah sarana pelabuhan	85.00	%	80.00	85.00	88.00	88.00	88.00	85.00	87.00	89.00	90.00	100.00	98.86	101.14	102.27	87.75	109.69	1. data pada tabel 8 dengan bab VII Kebijakan umum dan program nilainya(capaian indikator kinerja) dan penulisan tidak sinkron.
		Program Pegembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen dan data pengembangan wilayah	40.00	%	70.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja tersebut nilai nya kosong 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	Bertambahnya rambu-rambu lalu lintas	80.00	%	70.00	80.00	85.00	85.00	85.00	83.00	84.00	86.00	86.00	103.75	98.82	101.18	101.18	84.75	121.07	1. data pada tabel 8 dengan bab VII Kebijakan umum dan program nilainya(capaian indikator kinerja) dan penulisan tidak sinkron.
		Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	85.00	%	90.00	85.00	88.00	88.00	88.00	85.00	87.00	89.00	90.00	100.00	98.86	101.14	102.27	87.75	97.50	1. penulisan indikator program berbeda
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatnya prasaran peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	85.00	%	90.00	85.00	88.00	88.00	88.00	80.00	84.00	84.00	84.00	94.12	95.45	95.45	95.45	83.00	92.22	1. data tabel 8 pada kondisi tidak sinkron dengan data kondisi realisasi opd
3.	Perbaikan dan peningkatan atas kebutuhan saluran irigasi, sarana air minum dan drainase	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi dengan luas lahan.	70.00	%	80.00	70.00	70.00	75.00	75.00	0.00	40.34	40.34		0.00	57.63	53.79	0.00	20.17	25.21	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja tersebut nilai nya kosong 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program pembangunan turap/talud/bronjong.	Tersedianya air untuk sentra-sentra tanaman pangan	70.00	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja tersebut nilai nya kosong 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan turap/talud/bronjong		80.00	%	95.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat	0.00	%	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	94.07	94.07		0.00	0.00	0.00	0.00	47.04	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Terlaksananya pemberdayaan Komunitas Perumahann	0.00	%											0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																					
Misi 2 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat																					
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
		Program pengelolaan areal pemakaman	Terlaksananya Penataan dan pembangunan revitalisasi areal pemakaman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Meningkatnya ketersediaan air bersih untuk masyarakat pesisir.	40.00	%	70.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program Pengembangan, dan pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.	Persentase sumberdaya air berfungsi dengan baik	40.00	%	70.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program penyediaan dan pengelolaan air baku.	Persentase jaringan air bersih	40.00	%	70.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Panjang drainase yang dibangun.	60.00	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program pengendalian banjir		-	%	60.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
		Program Pegembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh		60.00	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data pada tabel 8 pada indikator kinerja dengan tabel VII tidak sinkron 2. data opd realisasi dinas pupr tidak ada
Rata-rata capaian kinerja (%)														21.7	23.4	23.6	21.9	21.0	23.4		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara berikutnya :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara berikutnya :																					

Tabel 2.80

Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK)

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																						
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK)																						
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas	
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019					
Tujuan 1 : Meningkatkan Cakupan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan																						
1.	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD Non Formal	16.15	%	80.00	25.20	35.25	55.50	68.70	50.14	50.90	15.74	16.17	198.97	144.40	28.36	23.54	33.24	41.55		Dinas pendidikan
			APK PAUD Non Formal												0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI	99.90	%	99.98	99.91	99.93	99.95	99.96	96.71	99.06	75.61	86.76	96.80	99.13	75.65	86.79	89.54	89.55	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	Dinas pendidikan
			APK SD/MI	112.27	%	114.86	113.57	113.81	113.96	114.00	111.64	114.26	119.09	87.00	98.30	100.40	104.50	76.32	108.00	94.03	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	Dinas pendidikan
			APK SMP/MTs	92.90	%	94.50	92.90	93.10	93.40	93.70	86.77	84.76	86.76	60.00	93.40	91.04	92.89	64.03	79.57	84.20	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	Dinas pendidikan
			APM SMP/MTs	93.37	%	94.50	93.50	93.90	94.20	94.60	75.22	73.82	75.61	75.88	80.45	78.62	80.27	80.21	75.13	79.51	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	Dinas pendidikan
			Angka Kelulusan SD/MI	98.57	%	99.35	98.76	98.85	98.97	99.10	98.75	98.73	98.14	98.08	99.99	99.88	99.16	98.97	98.43	99.07	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii	Dinas pendidikan
			Angka Kelulusan SMP/MTs	98.60	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.90	98.88	98.28	98.91	98.90	98.88	98.28	98.91	98.74	98.74	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii	Dinas pendidikan
		Program Pendidikan Menengah	APK SMA/MA/SMK	60.01	%	62.50	60.10	60.50	60.90	61.50	104.81	101.76	93.46		174.39	168.20	153.46	0.00	75.01	120.01	1. data realisasi tabel capaian opd tidak ada	Dinas pendidikan
			APM SMA/MA/SMK	58.53	%	62.50	59.20	60.10	60.50	61.50	67.29	67.24	63.39		113.67	111.88	104.78	0.00	49.48	79.17	1. data realisasi tabel capaian opd tidak ada	Dinas pendidikan
			Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99.19	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. realisasi tabel capaian opd tidak ada	Dinas pendidikan
		Program Pendidikan non Formal	Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal	97.00	%	99.00	97.63	99.00	99.00	99.00	97.00	97.00	98.00	98.00	99.35	97.98	98.99	98.99	97.50	98.48	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	Dinas pendidikan
		Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru SD/ SDLB Berkualifikasi Akademik S1/ D4	40.55	%	60.30	43.65	48.90	52.70	55.20	85.00	89.00	95.00	97.00	194.73	182.00	180.27	175.72	91.50	151.74	1. indikator berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii	Dinas pendidikan
			Persentase Guru SMP/ SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/ D4	60.23	%	75.10	62.20	64.35	67.30	70.50	93.00	95.00	98.00	99.00	149.52	147.63	145.62	140.43	96.25	128.16	1. indikator berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii	Dinas pendidikan
			Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/ D4	51.40	%	84.15	53.25	55.60	57.80	80.10	-	78.91	70.93		0.00	141.92	122.72	0.00	37.46	44.52	1. indikator berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas pendidikan
			Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/ D4	40.50	%	70.10	43.20	46.70	50.51	53.23	-	78.91	70.93		0.00	168.97	140.43	0.00	37.46	53.44	1. indikator berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas pendidikan
		Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase Jumlah sekolah yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional	-	%	90.00		90.00	90.00	90.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas pendidikan
		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase jumlah pemustaka	40.00	%	70.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target pada tabel 81 kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pendidikan /Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Meningkatkan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Program pendidikan anak usia dini	Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia dini	60.00	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target pada tabel 81 kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pendidikan
		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target pada tabel 81 kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pendidikan
			Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target pada tabel 81 kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pendidikan
		Program pendidikan menengah	Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target pada tabel 81 kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pendidikan
		Program pendidikan non formal	Cakupan Pening katan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan Non-formal	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target pada tabel 81 kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pendidikan
3	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat dan Perbekalan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	91	%	95.00	90.00	90.00	95.00	95.00	92.00	93.00	94.00	95.00	102.22	103.33	98.95	100.00	93.50	98.42	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	Dinkes
			Cakupan Pemakaian Obat Generik di Masyarakat	80	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	87.00	89.00	91.00	106.25	102.35	104.71	107.06	88.00	97.78	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii	Dinkes

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																							
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK)																							
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas	
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019					
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	100.2	per 100.000 kelahiran	98,9	100,1	99,8	99,7	99.50	5.00	5.00	8.00	7.00	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	7.04	6.25	#VALUE!	1.indikator berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii 2. realisasi menggunakan persentase sedangkan capaian tidak	Dinkes	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	55.00	57.00	59.00	60.00	55.00	57.00	59.00	60.00	57.75	57.75	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii	Dinkes/RSUD	
			Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulungan Masalah Kesehatan	80	%	90.00	82.00	82.00	85.00	85.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes/RSUD	
		Program pengawasan obat dan makanan	cakupan pengawasan obat dan makanan		%	85.00		70.00	75.00	75.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. indikator berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Tenaga Medis dan Paramedis yang mempunyai STR	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	75.00	80.00	90.00	70.00	75.00	80.00	90.00	78.75	78.75	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii	Dinkes	
			Persentase penyuluhan dan kesadaran masyarakat	85	%	93.00	87.00	87.00	89.00	89.00	0.00	98.00	96.00		0.00	112.64	107.87	0.00	48.50	52.15	1. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	75	%	90.00	75.00	80.00	80.00	85.00	80.00	80.00	80.00	85.00	106.67	100.00	100.00	100.00	81.25	90.28	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii	Dinkes	
			Cakupan balita kurang gizi	95	%	100.00	95.00	95.00	96.00	96.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1.05	1.05	1.04	7.29	2.50	2.50	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii 2	Dinkes	
			Cakupan gizi buruk mendapat perawatan	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. tidak ada indikator ini pada laporan bab vii 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes	
			Persentase cakupan partisipasi masyarakat	85	%	93.00	87.00	87.00	89.00	89.00	0.00	18.00	58.00		0.00	20.69	65.17	0.00	19.00	20.43	1. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes/RSUD	
		Program pengembangan lingkungan sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sehat	65	%	80.00										0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1.nilai pada tabel 81 kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes
		Program lingkungan sehat perumahan	Tersedianya Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat													0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1.nilai pada tabel 81 kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	dinas pupr
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Penderita penyakit menular ditangani	70	%	80.00										0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada indikator kinerja tsb pada tabel 81, nilai kosong	dinkes
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana/prasarana kesehatan yang memiliki sertifikat izin (Kebutuhan Tenaga SDM dan Peralatan di Rumah Sakit)	85	%	93.00	87.00	87.00	89.00	89.00						0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. penulisan nama berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii, 2. capaian target berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii 3. tidak ada data realisasi indikator tersebut	dinkes
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin	90	%	95.00	90.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	111.11	105.26	105.26	105.26	100.00	105.26	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	dinkes	
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat yang ditangani sarana kesehatan	75	%	90.00	75.00	80.00	80.00	85.00	80.00	85.00	92.00	100.00	106.67	106.25	115.00	117.65	89.25	99.17		Dinkes/RSUD	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Anak Balita	75	%	90.00	75.00	80.00	80.00	85.00	94.00	96.00	99.00	90.00	125.33	120.00	123.75	105.88	94.75	105.28		Dinkes	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Pemantauan Kesehatan Lansia	80	%	87.00	80.00	85.00	85.00	85.00	78.00	86.00	85.00	92.00	97.50	101.18	100.00	108.24	85.25	97.99	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	Dinkes	
		Program keluarga berencana.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)	3.5	org	3.0	3.5	3.5	3.3	3.3	3.5	3.4	3.4	3.2	100.00	97.14	103.03	96.97	3.38	112.50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pelayanan Kontrasepsi	rasio akseptor kb (%)	78.3	%	96.6	79.20	82.67	87.30	91.92	85.00	88.00	93.00	97.00	107.32	106.45	106.53	105.53	90.75	93.99		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Program kesehatan reproduksi remaja	Persentasi usia perkawinan													0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada indikator kinerja tsb pada tabel 81	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri	Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-	%	90.00			90.00	90.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan konseling/KRR													0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada indikator kinerja tsb pada tabel 81	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase tenaga pendamping yang mampu menggerakkan partisipasi						80.00		-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target pada tabel 81 kosong	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																							
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK)																							
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas	
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019					
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Indeks pembangunan gender	65.00	%	90.00	65.00	70.00	70.00	85.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target pada laporan bab vii kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan dalam kelembagaan												0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada indikator kinerja tsb pada tabel 81	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu												0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada indikator kinerja tsb pada tabel 81	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase Pekerja Perempuan Pada Program Lembaga Pemerintah	22.97	%	25.00	22.97	22.97	23.31	23.31						0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase Pekerja Perempuan Pada Program Lembaga Swasta	77.02	%	75.00	77.02	77.03	76.63	76.63						0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Meningkatnya cakupan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan ketersediaan sarana prasarana puskesmas (rasio puskesmas/jlh penduduk)	0.24	%	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	53.00	56.00	58.00	61.11					-	-		Dinkes	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai (Tepenuhnya Peralatan dan Kebutuhan Rumah sakit)	80	%	90.00	82.00	82.00	85.00	85.00	0.00	95.00	94.00		0.00	115.85	110.59	0.00	47.25	52.50	tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes	
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpeliharanya Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Sakit	89	%	90.00	82.00	82.00	85.00	85.00	0.00	93.00	0.00		0.00	113.41	0.00	0.00	23.25	25.83	tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	percepatan pembangunan rumah sakit daerah	50	%	70.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada indikator kinerja tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinkes	
5.	Menciptakan implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal	Program Pengembangan nilai budaya	Peningkatan pelestarian dan aktualisasi adat/budaya yang ada di Labura	85	%	90.00	85.00	85.00	88.00	90.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	KesbangPol/Dinas Kebudayaan,Pemuda,Olah raga dan Pariwisata	
		Program pengelolaan kekayaan budaya	Perlindungan bangunan cagar budaya		%	90.00		85.00	88.00	90.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Kebudayaan,Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
		Program pengelolaan keragaman budaya.	Persentase Pergelaran dan festival budaya	80	%	90.00	80.00	85.00	88.00	90.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada data realisasi indikator tersebut	Sekretariat/ Dinas Kebudayaan,Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata	
		Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	cakupan misi seni budaya		%	90.00		85.00	88.00	90.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Kebudayaan,Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kepemudaan	85	%	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	85.00	85.00	85.00	85.00	100.00	100.00	94.44	94.44	85.00	94.44		Dinas Kebudayaan,Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata	
		Program pembinaan dan pemyarakatan olah raga	Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/ masyarakat)	85	%	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.50	97.22	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Kebudayaan,Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata	
		Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana olahraga yang terbangun	85	%	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas Kebudayaan,Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Penanganan Keluarga Miskin	75	%	85.00					0	94.39	95.13		0.00	0.00	0.00	0.00	47.38	55.74	1. data capaian target kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Sosial	
		Program Pembinaan dan pengembangan kegiatan kemasyarkatan	Persentase Pembinaan dan pengembangan kegiatan kemasyarkatan	80	%	90.00	80.00	85.00	85.00	90.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data realisasi indikator tersebut (sekretariat daerah)	Sekretariat Daerah	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80	%	90.00					0.00	69.61	69.76		0.00	0.00	0.00	0.00	34.84	38.71	1. data capaian target kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Sosial	
		Program pembinaan anak terlantar	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	80	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Sosial	

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																						
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK)																						
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penanganan Penyandang cacat dan trauma	75	%	85.00					0.00	96.05	96.23		0.00	0.00	0.00	0.00	48.07	56.55	1. data capaian target kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Sosial
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Persentase penanganan Gelandangan,Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan Napza	75	%	85.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada indikator ini pada tabel 81	Dinas Sosial
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Penanganan Panti asuhan dan panti jompo	75	%	85.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian target kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial	80	%	90.00						97.94			0.00	0.00	0.00	0.00	24.49	27.21	1. data capaian target kosong 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Sosial
		Program Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pemberdayaan keluarga	80.00	%	88.00	80.00	80.00	83.00	83.00	81.00	83.00	84.00	84.00	101.25	103.75	101.20	101.20	83.00	94.32	1. data capaian target pada tabel 81 dan lap bab vii berbeda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tujuan 2 : Membentuk SDM yang berahlak mulia berlandaskan pada perwujudan toleransi dan pembinaan umat beragama																						
1.	Terwujudnya kehidupan harmoni sesama dan antar umat beragama	program pembinaan kelembagaan keagamaan	tingkat kerukunan antar umat beragama	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada nilai di indikator kinerja tsb	Sekretariat Daerah
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Hari Besar Keagamaan	80.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	82.00	82.00	83.00	85.00	102.50	102.50	97.65	100.00	83.00	92.22		KesbangPol
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum keagamaan	80.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	86.00	86.00	87.00	106.25	107.50	101.18	102.35	86.00	95.56	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	Kesbangpol
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penanganan penyalahgunaan Narkoba	70.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	94.12	94.12	80.00	88.89		Satpol PP/KESBANGPOL
		Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat	70.00	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada nilai di indikator kinerja tsb	Sekretariat Daerah
		Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	Meningkatnya rasa nyaman dan aman dalam bermasyarakat.	75.00	%	88.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	tidak ada nilai di indikator kinerja tsb	Satpol PP
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatkan keamanan lingkungan	80.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	-	-	80.00	75.00	0.00	0.00	94.12	88.24	38.75	43.06	1. capaian target antara tabel 81 dan laporan bab vii beda	SatPol PP/KESBANGPOL
		Program Pendidikan Politik Masyrakat	Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah (Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap politik dan terlaksananya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah)	80.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	-	-	67.00	83.00	0.00	0.00	78.82	97.65	37.50	41.67	1. penulisan nama berbeda antara tabel 81 dan laporan bab vii,	KESBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	36.2	36.0	#VALUE!		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd Kabupaten Labuhanbatu Utara berikutnya :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara berikutnya :																						

Tabel 2.81

Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 4 : Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber daya Lokal dan Berwawasan Lingkungan

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																						
Misi 4 : Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan																						
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
Tujuan 1 : Pembangunan ekonomi daerah yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi																						
1.	peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perikanan, industri kecil menengah, koperasi, UMKM, dan pariwisata	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	persentase penerapan teknologi tepat guna	85.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	86.00	-	-	-	107.50	0.00	0.00	0.00	21.50	23.89		Dinas Pertanian/Dinas Lingkungan Hidup
		program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	persentase jaringan irigasi	75.00	%	85.00	70.00	70.00	75.00	75.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron 2. tidak ada data realisasi dinas pupr	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran produksi pertanian/perkebunan	80.00	%	85.00	80.00	85.00	85.00	85.00	2.206.210,35 Ton	1.005.718,60 Ton	1.084.259,04 Ton	1.026.917,84 Ton					-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Pertanian
		program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data realisasi data indikator tersebut	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persentase penurunan penyakit hewan	80.00	%	85.00	80.00	85.00	85.00	85.00	brucellosis	brucellosis	Rabies 1 Kasus, Brucelosis 20 Kasus	Rabies 1 Kasus, Brucelosis 25 Kasus					-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase pendampingan penyuluh	80.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas Ketahanan Pangan
		Program pemantapan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan	persentase pemantapan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	80.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	99.00	-	-	-	123.75	0.00	0.00	0.00	24.75	27.50		Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan kesejahteraan petani	pembinaan kelembagaan usaha tani	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	91.00	-	-	-	113.75	0.00	0.00	0.00	22.75	25.28		Dinas Pertanian/ Dinas Ketahanan Pangan
		program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing, meningkatnya daya tawar, daya tarik produk UMKM (Jumlah pelaku usaha (UMKM) yang dapat berdaya saing dalam kualitas dan produk untuk pertumbuhan ekonomi daerah)	85.00	%	90.00	85.00	85.00	88.00	88.00	85.00	85.00	87.00	87.00	100.00	100.00	98.86	98.86	86.00	95.56		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	persentase jumlah wirausaha (persentase pengembangan kewirausahaan keunggulan kompetitif)	85.00	%	90.00	85.00	85.00	88.00	88.00	85.00	85.00	85.00	87.00	100.00	100.00	96.59	98.86	85.50	95.00	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron 2. penulisan nama yang berbeda tabel 81 dan bab vii	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	(Terciptanya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda)	85.00	%	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	210 orang	214 orang	204 orang	206 orang					-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron 2.penulisan nama yang berbeda tabel 81 dan bab vii	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		program pengembangan sistem pendukung usaha bagu usahi mikro kecil menengah	persentase jumlah wirausaha (cakupan pembinaan terhadap UMKM)	14.81	%	20.00	14.81	15.00	15.00	17.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		
		program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	persentase jumlah lapangan pekerjaan (persentase koperasi aktif)	64.52	%	70.00	64.52	65.00	67.00	67.00	65.50	66.80	89.56	53.75	101.52	102.77	133.67	80.22	68.90	98.43	1.penulisan nama yang berbeda tabel 81 dan bab vii	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.	meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan	program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	persentase komoditas barang yang peredarannya diawasi	90.00	%	95.00	90.00	92.00	92.00	92.00	90.00	90.00	90.00	95.00	100.00	97.83	97.83	103.26	91.25	96.05	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		program peningkatan dan pengembangan ekspor	persentase ekspor produk daerah	-	%	60.00	-	55.00	55.00	55.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		program peningkatan pelayanan pemerintah bidang ekonomi	peningkatan pengawasan subsidi barang untuk masyarakat (cakupan pelayanan pemerintah bidang ekonomi)	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	90.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron 2. tidak ada data realisasi sekretariat daerah	Sekretariat Daerah
		program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	persentase peningkatan perdagangan internasional	-	%	60.00	-	10.00	20.00	30.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri	pembinaan dan fasilitasi para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa	40.00	%	70.00	40.00	40.00	40.00	50.00	45.00	50.00	60.00	75.00	112.50	125.00	150.00	150.00	57.50	82.14	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	40.00	%	70.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	45.00	45.00	50.00	100.00	112.50	112.50	100.00	45.00	64.29	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/
		program pengembangan industri kecil dan menengah	jumlah IMKM yang difasilitasi	60.00	%	90.00	60.00	70.00	80.00	90.00	70.00	80.00	90.00	95.00	116.67	114.29	112.50	105.56	83.75	93.06	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																						
Misi 4 : Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan																						
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
		program peningkatan kemampuan teknologi industri	persentase peningkatan kemampuan teknologi industri	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		program pengembangan sentra-sentra industri potensial	tingkat konektivitas promosi dan integrasi sistem informasi industri potensial	-	%	60.00	-	40.00	50.00	50.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		program pengembangan pemasaran pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan	85.00	%	90.00	85.00	85.00	85.00	90.00	120,120.00	1,410.00	45,000.00	67,800.00					-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		program pengembangan destinasi pariwisata	pengembangan objek daya tarik wisata	85.00	%	90.00	88.00		88.00	90.00	1 objek wisata	-	-	-					-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		program pengembangan kemitraan	persentase pengembangan kemitraan kepariwisataan	75.00	%	84.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	
		program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	persentase peningkatan kemampuan iptek sistem produksi	1,000.00	org	1000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00					100.00	10.00	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri	persentase peningkatan pasar tradisional (pembinaan dan fasilitasi para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa)	40.00	%	70.00	40.00	40.00	40.00	50.00	45.00	50.00	60.00	75.00	112.50	125.00	150.00	150.00	57.50	82.14		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah /PASKEB
3	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	persentase penanganan pencemaran lingkungan	80.00	%	88.00	80.00	80.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	125.00	125.00	117.65	117.65	100.00	113.64	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Lingkungan Hidup
		program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	51.00	60.00	65.00	69.00	63.75	70.59	76.47	81.18	61.25	68.06		Dinas Lingkungan Hidup
		program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	persentase perlindungan sumberdaya alam daerah	75	%	85.00		75.00	75.00	80.00	83.00	86.00	87.00	89.00	0.00	114.67	116.00	111.25	86.25	101.47	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Lingkungan Hidup
		program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	persentase perlindungan sumber daya hutan (cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan)	75	%	85.00	75.00	75.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Lingkungan Hidup
		program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	persentase pembinaan dan penerbitan hasil hutan (cakupan pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan)	80	%	90.00	75.00	75.00	85.00	85.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	18.75	20.83		Dinas Lingkungan Hidup
		program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	persentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	60	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Penanaman Modal
		program pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	persentase pemberian izin kegiatan pertambangan	70	%	80.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Penanaman Modal
		program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	pengembangan ketenagalistrikan	75	%	85.00	-	-	-	-					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. data capaian kosong pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Penanaman Modal
		program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	persentase peningkatan debit air dan penurunan luas lahan kritis	75	%	85.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	-
		program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	persentase pemanfaatan izin ruang	80	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	persentase sarana dan kinerja pengolahan sampah	90	%	95.00	90.00	90.00	93.00	93.00	54.21	53.91	76.58	76.14	60.23	59.90	82.34	81.87	65.21	68.64	1. capaian target pada tabel 81 dengan lap bab vii tidak sinkron	Dinas Lingkungan Hidup/DPKP
		program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	persentase AMDAL	80	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.82

Capaian Kinerja Program Pembangunan MISI 5 : Meningkatkan Standar Hidup Layak, Keamanan dan Kenyamanan

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																						
Misi 4 : Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan																						
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas	
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019					
Tujuan 1 : meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat																						
1.	membaiknya iklim investasi dan usaha serta kemudahan pelayanan perizinan	program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	indeks kepuasan masyarakat	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	dinas penanaman modal
		program optimalisasi pemanfaatan teknologi pelayanan perizinan	terlaksananya informasi pelayanan (persentase pemanfaatan teknologi pelayanan perizinan)	50.00	%	90.00		85.00	85.00	88.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	58.82	56.82	25.00	27.78	1. penulisan nama antara tabel 81 dan bab vii berbeda	dinas penanaman modal
		program peningkatan pelayanan perizinan	peningkatan jumlah layanan perizinan	85.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	dinas penanaman modal
		program peningkatan pembinaan dan sosialisasi perizinan	peningkatan jumlah investasi yang diterbitkan (persentase pembinaan dan sosialisasi perizinan)	-	%	90.00		85.00	85.00	88.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	117.65	113.64	50.00	55.56	1. penulisan nama antara tabel 81 dan bab vii berbeda	dinas penanaman modal
		program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	meningkatnya kapasitas dan ketepatan pelayanan perizinan	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	dinas penanaman modal
		program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	tingkat realisasi kerjasama dan investasi	80.00	%	90.00	83.00	83.00	83.00	85.00	93.16	29.80	11.00	44.84	112.24	35.90	13.25	52.75	44.70	49.67		dinas penanaman modal
		program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	80.00	%	95.00	80.00	85.00	85.00	85.00	80.00	85.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.75	88.16	1. capaian target antara tabel 81 dengan laporan bab vii tidak sinkron	satpol pp
		program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	persentase nilai investasi (meningkatkan kapasitas dan pelayanan investasi)	85.00	%	90.00	85.00	85.00	85.00	88.00	100.00	100.00	100.00	100.00	117.65	117.65	117.65	113.64	100.00	111.11	1. penulisan nama antara tabel 81 dan bab vii berbeda	dinas penanaman modal
		program pengendalian pemanfaatan ruang	pemanfaatan peraturan tata ruang	75.00	%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target antara tabel 81 dengan laporan bab vii tidak sinkron 2. data realisasi indikator tersebut pada dinas pupr/bappeda tidak ada	Sekretariat/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/BAPPEDA
		program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah	ketersediaan sarana prasarana yang mantap	80.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Penanaman Modal
2	menurunnya tingkat pengangguran	program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	jumlah pelaku usaha (UMKM) yang dapat berdaya saing dalam kualitas dan produk untuk pertumbuhan ekonomi daerah	85.00	%	90.00	85.00	85.00	88.00	88.00	85.00	85.00	87.00	87.00	100.00	100.00	98.86	98.86	86.00	95.56		Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan Menengah
		program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	jumlah produk UMKM yang dipromosikan pada pemeran dalam daerah/luar daerah jumlah UMKM yang diberi bantuan permodalan (persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif)	85.00	%	90.00	85.00	85.00	88.00	88.00	85.00	85.00	85.00	87.00	100.00	100.00	96.59	98.86	85.50	95.00	1. penulisan nama antara tabel 81 dan bab vii berbeda	Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan Menengah
		program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	jumlah pelatihan/magang diluar daerah dalam rangka peningkatan daya saing untuk menciptakan barang/jasa kualitas (cakupan pembinaan terhadap UMKM)	14.81	%	20.00	14.81	15.00	15.00	17.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. penulisan nama antara tabel 81 dan bab vii berbeda 2. capaian target antara tabel 81 dan bab vii berbeda 3. data realisasi kosong	Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan Menengah
		program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	persentase koperasi aktif	64.52	%	70.00	64.52	65.00	67.00	68.00	65.50	66.80	89.56	53.75	101.52	102.77	133.67	79.04	68.90	98.43	1. capaian target pada tabel 81 dan bab VII berbeda	Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan Menengah
		program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	60.00	%	75.00	60.00	65.00	65.00	70.00	-	1.01	0.50	1.08	0.00	1.55	0.77	1.54	0.65	0.86	1. capaian target pada tabel 81 dan bab VII berbeda	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian
		program peningkatan kesempatan kerja	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	20.00	%	35.00	20.00	25.00	25.00	30.00	32.14	39.52	60.38	78.40	160.70	158.08	241.52	261.33	52.61	150.31	1. capaian target pada tabel 81 dan bab VII berbeda	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian
		program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	80.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	60.00	40.00	65.00	50.00	75.00	50.00	76.47	58.82	53.75	59.72	1. capaian target pada tabel 81 dan bab VII berbeda	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																						
Misi 4 : Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan																						
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)		Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
3	terjaminnya ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan bahan pangan	program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	pengetahuan ketahanan pangan	80.00	%	90.00	80.00	80.00	85.00	85.00	63.00	85.00	82.00	72.00	78.75	106.25	96.47	84.71	75.50	83.89		Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		pengembangan agribisnis	meningkatnya produksi komoditas (cakupan berkembangnya agribisnis)	80.00	%	90.00			85.00	88.00					0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. penulisan nama antara tabel 81 dan bab vii berbeda 2. realisasi pada indikator tersebut tidak ada	Dinas Pertanian
		program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase pemasaran produksi pertanian dan perkebunan	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	2,206,210.35	1,005,718.60	108,425,904.00	1,026,917.84								Dinas Pertanian
		program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	persentase hasil penerapan teknologi tepat guna	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	-	4 jenis pembangunan fisik	3 jenis pembangunan fisik	4 jenis pembangunan fisik					-	-		Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persentase penurunan penyakit ternak (persentase penurunan penyakit hewan)	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	brucelosis	brucelosis	Rabies 1 Kasus, Brucelosis 20 Kasus	Rabies 1 Kasus, Brucelosis 25 Kasus					-	-	1. capaian target pada tabel 81 dan bab VII berbeda	Dinas Pertanian
		program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase harga produksi pertanian dan perkebunan	85.00	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan produksi tanaman tahunan dan semusim	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	181,768.26	10,522,118.00	43,814.66	44,890.90					-	-		Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		program rehabilitasi hutan dan lahan	persentase pengembangan bibit	75.00	%	85.00	75.00	75.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dan bab VII berbeda	Dinas Lingkungan Hidup
		program perencanaan dan pengembangan hutan	persentase pengembangan hutan	75.00	%	90.00	75.00	75.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dan bab VII berbeda	Dinas Lingkungan Hidup
		program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	82.00	%	88.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pertanian
		program pemanfaatan kawasan hutan industri	persentase pemanfaatan lahan	75.00	%	90.00	75.00	75.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas Lingkungan Hidup
		program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	persentase pengenalan produk peternakan	80.00	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas Pertanian
		program peningkatan penerapan teknologi peternakan	persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan	80	%	90.00	80%	80%	85%	85%	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas Pertanian /Dinas Ketahana Pangan
		program pengembangan budidaya perikanan	jumlah produksi ikan hasil budidaya dan tangkap	85	%	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	23,570.00	54,800.00	62,600.00	198,000.00					-	-		Dinas Pertanian
		program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar	persentase luas kawasan budi daya	80	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pertanian
		program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	persentase peningkatan sistem penyuluhan	85	%	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. capaian target pada tabel 81 dan bab VII berbeda	Dinas Pertanian
		program pengembangan perikanan tangkap	jumlah pendapatan nelayan	85	%	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		Dinas Pertanian
		program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	persentase terbedayakan masyarakat pesisir	75	%	90.00									0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1. tidak ada data capaian target indikator tersebut pada tabel 81 2. tidak ada data realisasi indikator tersebut	Dinas Pertanian
		program peningkatan keberdayaan masyarakat desa	persentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa	80	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	81.00	82.00	83.00	84.00	101.25	96.47	97.65	98.82	82.50	91.67		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	persentase masyarakat dalam membangun desa	80	%	90.00	80.00	83.00	83.00	88.00	82.00	83.00	84.00	85.00	102.50	100.00	101.20	96.59	83.50	92.78		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		program pengembangan lembaga ekonomi perddesaan	persentase pelatihan masyarakat desa	80	%	90.00	80.00	85.00	85.00	85.00	82.00	83.00	84.00	85.00	102.50	97.65	98.82	100.00	83.50	92.78		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi : “KABUPATEN YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MENUJU LABUHANBATU UTARA YANG SEJAHTERA”																					
Misi 4 : Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan																					
No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal (Tahun 2015)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Realisasi/Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Keterangan	Dinas
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
Rata-rata capaian kinerja (%)										37.9	35.3	43.9	42.9	27.9	33.1						
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara berikutnya :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara berikutnya :																					

BAB III**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan kapasitas riil keuangan daerah, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah serta memperhatikan prinsip kesejahteraan masyarakat.

Kerangka pengelolaan keuangan daerah secara garis besar terdiri dari perencanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kapasitas fiskal Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026) perlu dianalisis melalui capaian kinerja keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasar kanalisis tersebut maka dapat diproyeksikan komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan

yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Kinerja keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara periode Tahun Anggaran 2016-2020 bisa dilihat dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2016-2020.

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

A. PENDAPATAN

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai program dan kegiatan daerah. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat dilihat dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang.

Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,06% atau Rp. 980.169.601.534,21 pada tahun 2016 menjadi Rp. 968.329.052.089,23 pada tahun 2020. Penurunan pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 sehingga pendapatan

danaperimbangan mengalami penurunan yang menyebabkan penurunan rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun perkembangan dan posisi pendapatan daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel. 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

URAIAN		Realisasi Tahun Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	
4	PENDAPATAN	980,169,601,534.21	1,050,277,014,266.20	1,033,343,832,203.81	1,082,495,846,011.08	968,329,052,089.23	-0.06%
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42,296,115,862.21	52,690,086,354.20	57,010,690,545.81	70,122,562,532.08	55,494,095,702.23	8.72%
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	16,855,203,967.72	24,578,664,147.00	23,777,583,631.43	26,316,419,960.00	22,137,549,427.00	9.34%
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5,354,736,212.00	7,785,261,500.00	9,480,812,321.40	14,881,014,664.50	13,713,581,114.00	29.07%
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	611,525,858.00	1,473,679,216.00	2,866,451,770.00	2,732,595,137.00	2,215,622,549.00	52.98%
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19,474,649,824.49	18,852,481,491.20	20,885,842,822.98	26,192,532,770.58	17,427,342,612.23	-0.14%
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	816,898,927,802.00	839,472,606,186.00	864,256,204,242.00	817,231,451,960.00	719,527,169,929.00	-2.92%
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38,089,549,027.00	24,754,073,039.00	41,118,873,952.00	36,192,034,760.00	23,959,983,336.00	-3.67%
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	592,813,148,000.00	588,021,836,000.00	588,021,836,000.00	611,629,351,000.00	560,374,058,000.00	-1.29%
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	185,996,230,775.00	226,696,697,147.00	235,115,494,290.00	169,410,066,200.00	135,193,128,593.00	-5.64%
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	120,974,557,870.00	158,114,321,726.00	112,076,937,416.00	195,141,831,519.00	193,307,786,458.00	18.69%
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1,359,323,700.00	3,429,627,100.00	2,000,000,000.00	12,000,000,000.00	8,000,000,000.00	144.32%
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61,601,496,676.00	42,344,984,709.00	32,541,776,416.00	56,836,065,938.00	37,526,461,431.00	-3.43%
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9,597,637,494.00	0.00	9,793,161,000.00	0.00	0.00	-25.00%
4 . 3 . 6	Pendapatan Dana Desa dari APBN	48,416,100,000.00	68,646,939,000.00	67,742,000,000.00	78,844,864,200.00	82,689,984,000.00	15.43%
4 . 3 . 7	Dana BOS	0.00	43,692,770,917.00	0.00	47,460,901,381.00	51,676,170,027.00	27.22%

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 8,72%, dari Rp. 42.296.115.862,11 pada tahun 2016 menjadi Rp. 55.494.702.089,23 pada tahun 2020.

- a. Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kenaikan sebesar 9,34%, dari Rp. 16.855.203.967,72 pada tahun 2016 menjadi Rp. 22.137.549.427,00 pada tahun 2020.
- b. Rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kenaikan sebesar 29,07%, dari Rp. 5.354.735.212,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 13.713.581.114,00 pada tahun 2020.
- c. Rata-rata pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 52,98%, dari Rp. 611.525.858,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.215.622.549,00 pada tahun 2020.
- d. Rata-rata pertumbuhan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar -0,14%, dari Rp. 19.474.649.824,49 pada tahun 2016 menjadi Rp. 17.427.342.612,23 pada tahun 2020.

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menganalisa dari data 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2020), dana perimbangan menduduki peringkat pertama sebagai komponen pendapatan daerah. Dana perimbangan yang paling besar terjadi pada tahun 2018 yaitu Rp. 864.256.204.242,00. Dana Perimbangan Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2016 sebesar Rp. 816.898.927.802,00 terus mengalami kenaikan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 719.527.169.929,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan transfer. Pendapatan jenis ini meliputi *hibah*, atau pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Desa Dari APBN, Dana Bos, DID. Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,69%, dari Rp. 120.974.557.870,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 193.307.786.458,00 pada tahun 2020.

B. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Secara garis besar, belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun maksud dan klasifikasi masing-masing belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi

- a. Belanja pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah;
- b. Belanja bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
- c. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan /lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- d. Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue;
- e. Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, dan bantuan partai politik;
- f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa/ Kelurahan;
- g. Bantuan Keuangan, yang bersifat umum maupun khusus kepada Desa/Kelurahan;
- h. Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.

2. **Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur;
- b. Belanja Barang dan Jasa, Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- c. Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Dalam 5 (lima) terakhir 2016-2020 rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kenaikan 0,06%, dari Rp. 976.368.478.081,34 pada tahun 2016 menjadi Rp. 977.399.204.792,68 pada tahun 2020. Dengan komposisi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung.

Belanja tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 sebesar 4,46%, sebesar Rp. 507.600.281.194,00 pada tahun 2016 dan sebesar Rp. 607.722.896.346,00 pada tahun 2020. Dari bagian belanja tidak langsung yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu pada jenis belanja tak terduga antara lain untuk keperluan terhadap adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020.

Sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan sebesar -3,25%, sebesar Rp. 468.768.196.887,34 pada tahun 2016 dan sebesar Rp. 369.676.308.446,68 pada tahun 2020, belanja pegawai pada belanja langsung mengalami penurunan antaranya dikarenakan kebijakan tidak lagi dianggarkan honorarium-honorarium panitia kegiatan, sedangkan pada belanja modal terjadinya penurunan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran terkait pandemi covid-19 pada tahun 2020.

Adapun perkembangan belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2020 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

URAIAN		Realisasi Tahun Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	
5	BELANJA	976,368,478,081.34	984,471,799,541.73	976,397,417,371.41	1,136,528,034,057.86	977,399,204,792.68	0.60%
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	507,600,281,194.00	516,385,584,267.00	526,473,758,078.00	571,522,406,297.00	607,722,896,346.00	4.64%
5 .1 . 1	Belanja Pegawai	394,083,863,104.00	365,707,663,241.00	379,960,909,295.00	396,707,276,267.00	383,483,446,937.00	-0.56%
5 .1 . 4	Belanja Hibah	16,922,504,100.00	10,060,921,736.00	16,634,136,693.00	21,736,550,900.00	42,509,475,240.00	37.76%
5 .1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3,928,500,000.00	5,425,000,000.00	5,798,000,000.00	6,566,500,000.00	7,292,000,000.00	17.32%
5 .1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,310,155,200.00	2,599,211,700.00	3,233,292,800.00	3,924,352,800.00	3,520,364,500.00	12.00%
5 .1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	89,859,061,590.00	132,251,413,590.00	120,847,419,290.00	142,545,726,330.00	143,896,076,700.00	14.36%
5 .1 . 8	Belanja Tidak Terduga	496,197,200.00	341,374,000.00	0.00	42,000,000.00	27,021,532,969.00	16026.45%
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	468,768,196,887.34	468,086,215,274.73	449,923,659,293.41	565,005,627,760.86	369,676,308,446.68	-3.25%
5 .2 . 1	Belanja Pegawai	63,855,323,530.00	68,148,154,745.00	12,363,754,360.00	17,461,654,990.00	22,046,516,094.00	-1.91%
5 .2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148,655,854,037.00	195,374,922,521.73	214,522,272,845.68	289,430,594,689.49	244,213,549,316.09	15.13%
5 .2 . 3	Belanja Modal	256,257,019,320.34	204,563,138,008.00	223,037,632,087.73	258,113,378,081.37	103,416,243,036.59	-13.84%

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari:

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA),
- (b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain berasal dari,

- (a) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah,
- (b) Pemberian Pinjaman Daerah.

Realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama tahun 2016-2020 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

URAIAN		Realisasi Tahun Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30,724,877,746.59	31,258,089,882.46	93,808,778,606.93	151,977,181,349.33	96,096,590,302.55	56.77%
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30,254,219,746.59	31,057,097,882.46	93,063,304,606.93	151,493,300,349.33	95,944,993,302.55	57.11%
6 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	470,658,000.00	200,992,000.00	745,474,000.00	483,881,000.00	151,597,000.00	27.46%
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	-37.50%
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	-25.00%
6 . 2 . 3	Pemberian Pinjaman Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-25.00%
PEMBIAYAAN NETTO		26,724,877,746.59	27,258,089,882.46	91,808,778,606.93	149,977,181,349.33	96,096,590,302.55	66,56%

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Secara lebih detail perkembangan neraca dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	30,494,094,969.46	90,153,901,055.93	144,413,028,314.01	88,662,498,503.03	84,660,814,902.19	53.18%
Kas di Bendahara Penerimaan	31,906,230.00	0	82,013,025.00	0	0	-50.00%
Kas di Bendahara Pengeluaran	139,024,663.00	0	0	0	0	-25.00%
Kas di BLUD	0	0	0	0	0	0.00%
Kas di Bendahara FKTP	0	255,673,159.00	1,606,421,708.32	758,105,531.52	1,426,437,002.91	140.92%
Kas di Bendahara BOS	0	2,653,730,392.00	5,994,099,091.00	6,538,973,446.00	939,185,694.00	12.33%
Kas Lainnya	755,236,561.00	0	0	0	0	-25.00%
Setara Kas	0	0	0	0	0	0.00%
Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0.00%
Piutang Pendapatan	36,936,408,850.48	50,014,801,401.09	59,636,453,302.08	43,644,492,807.00	40,814,216,332.00	5.34%
Piutang Lainnya	5,882,937,935.66	7,681,667,935.66	986,889,925.00	6,809,233,147.66	6,626,741,947.66	132.68%
Penyisihan Piutang	-22,687,926,290.72	-21,496,826,846.86	-12,028,092,243.50	-14,749,780,270.23	-16,243,433,000.82	-3.84%
Beban Dibayar Dimuka	339,566,666.00	288,733,333.00	260,400,000.00	225,816,666.67	54,916,667.00	-28.44%
Persediaan	10,198,473,441.51	15,980,519,407.71	17,582,205,953.01	17,996,164,145.47	22,144,737,685.35	21.53%
JUMLAH ASET LANCAR	62,089,723,026.39	145,532,199,837.53	218,533,419,074.92	149,885,503,977.12	140,419,657,180.29	36.50%

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%
Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0	0.00%
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	0.00%
Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0.00%
Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0.00%
Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	6,285,667,712.66	0	0	-25.00%
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	6,285,667,712.66	0	0	-25.00%
Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0	0	0	0	0.00%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	14.58%
Investasi Permanen Lainnya	4,000,000,000.00	0	0	0	0	-25.00%
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	27.08%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	14,285,667,712.66	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	39.52%
ASET TETAP						
Tanah	525,989,731,906.00	519,540,047,756.00	521,970,866,096.00	414,457,400,143.00	418,470,172,540.68	-5.10%
Peralatan dan Mesin	298,043,737,133.38	317,748,932,292.83	346,989,884,027.58	387,659,486,324.88	431,857,407,678.27	9.73%
Gedung dan Bangunan	703,277,831,822.65	667,014,384,692.05	819,878,696,129.50	856,236,821,499.17	856,412,226,380.62	6.53%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,084,917,098,390.89	1,165,285,931,945.89	1,249,880,183,637.93	1,350,458,827,971.12	1,388,696,760,555.80	6.36%
Aset Tetap Lainnya	65,375,117,397.00	58,725,034,519.00	72,754,075,478.00	75,115,543,036.00	82,929,806,033.00	6.84%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	92,486,985,739.00	101,592,795,722.00	54,294,503,121.00	25,602,612,243.25	55,642,246,438.89	-24.54%

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021-2026

Akumulasi Penyusutan	-675,514,101,124.03	-657,143,851,908.34	-1,056,363,178,411.61	-1,497,281,168,268.67	-1,608,194,353,172.47	26.84%
JUMLAH ASET TETAP	2,094,576,401,264.89	2,172,763,275,019.43	2,009,405,030,078.40	1,612,249,522,948.75	1,625,534,566,454.79	-5.73%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0.00%
JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0	0.00%
Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0.00%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0.00%
Aset Tidak Berwujud	1,035,889,000.00	1,285,964,000.00	1,358,784,000.00	1,644,484,000.00	1,388,784,000.00	2.78%
Aset Lain-lain	28,354,212,647.00	49,167,718,819.00	39,585,382,944.00	130,653,409,304.00	130,913,797,604.00	52.69%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-1,357,410,426.00	-1,048,670,767.00	-728,856,677.00	0	0	-32.62%
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	0	0	0	-1,581,965,250.00	-1,366,284,000.00	-3.41%
JUMLAH ASET LAINNYA	28,032,691,221.00	49,405,012,052.00	40,215,310,267.00	130,715,928,054.00	130,936,297,604.00	51.65%
JUMLAH ASET	2,188,698,815,512.28	2,373,700,486,908.96	2,282,439,427,132.98	1,902,850,954,979.87	1,906,890,521,239.08	-2.66%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	139,024,663.00	0	602,261,789.00	14,584,178.00	0	-74.39%
Utang Bunga	0	0	0	0	0	0.00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0.00%
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	0	0.00%
Utang Beban	660,591,206.50	564,067,492.00	1,263,482,785.00	5,750,571,129.00	5,073,649,395.00	113.19%

Utang Jangka Pendek Lainnya	9,340,847,904.00	1,768,091,954.00	2,648,525,703.77	3,799,547,930.24	775,132,792.49	-16.85%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,140,463,773.50	2,332,159,446.00	4,514,270,277.77	9,564,703,237.24	5,848,782,187.49	22.40%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0.00%
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	0.00%
JUMLAH KEWAJIBAN	10,140,463,773.50	2,332,159,446.00	4,514,270,277.77	9,564,703,237.24	5,848,782,187.49	22.40%
EKUITAS						
EKUITAS	2,178,558,351,738.78	2,371,368,327,462.96	2,277,925,156,855.21	1,893,286,251,742.63	1,901,041,739,051.59	-2.95%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,188,698,815,512.28	2,373,700,486,908.96	2,282,439,427,132.98	1,902,850,954,979.87	1,906,890,521,239.08	-3.01%

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, APBD mempunyai fungsi :

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 – 2026 yang digunakan adalah APBD Tahun

2016-2026 yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD.

3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran. Pengelolaan anggaran daerah berorientasi pada pencapaian kinerja yang efisien dan efektif.

Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang. Belanja aparatur adalah merupakan belanja rutin seperti belanja pegawai/gaji, belanja barang dan jasa yang digunakan untuk penunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Rata-rata realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 63,16%, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Labuhanbatu Utara 5 tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan, pada tahun 2016 realisasi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran sebesar 61,87% mengalami kenaikan 63,66% pada tahun 2017 kemudian mengalami penurunan menjadi 62,02% pada tahun 2018 dan 61,80% pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan 66,48% pada tahun 2020.

Meskipun sebagian besar APBD digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur namun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tetap memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat/publik karena belanja aparatur merupakan bagian dari pendukung utama dalam menciptakan pelayanan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Secara lebih terinci Belanja Aparatur Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
		A	B	A/B*100%
1	2020 (Audited)	649,743,512,347.09	977,399,204,792.68	66.48%
2	2019 (Audited)	703,599,525,946.49	1,138,528,034,057.86	61.80%
3	2018 (Audited)	606,846,936,500.68	978,397,417,371.41	62.02%
4	2017 (Audited)	629,230,740,507.73	988,471,799,541.73	63.66%
5	2016 (Audited)	606,595,040,671.00	980,368,478,081.34	61.87%

3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah adalah untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit dalam penganggaran. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 mengalami defisit riil yang naik turun, pada tahun 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 198.876.547,13, tahun 2019 sebesar Rp. 56.032.188.046,78 dan tahun 2020 sebesar Rp. 9.097.341.387,45, sedangkan surflus anggaran paling besar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 61.805.214.724,47, secara lebih rinci defisit rill anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.6
Defisit Rill Anggaran
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	980,169,601,534.21	1,050,277,014,266.20	1,033,343,832,203.81	1,082,495,846,011.08	968,329,052,089.23
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	976,368,478,081.34	984,471,799,541.73	976,397,417,371.41	1,136,528,034,057.86	977,399,204,792.68
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0
Defisit Rill		-198,876,547.13	61,805,214,724.47	54,946,414,832.40	-56,032,188,046.78	-9,097,341,387.45

Defisit riil anggaran ditutup dengan penerimaan pembiayaan, pada tahun 2016 defisit riil setelah ditutup terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp. 30.254.219.746,59, tahun 2019 sebesarRp.

151.493.300.349,33 dan tahun 2020 sebesar Rp. 95.944.993.302,55, secara rinci komposisi penutupan defisit riil sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Rill				
		2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	30,254,219,746.59	30.526.001.199,46	93,063,304,606.93	148.755.193.439,33	95,944,993,302.55
2	Pencairan Dana Cadangan	496,197,200.00	341,374,000.00	0.00	42,000,000.00	27,021,532,969.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	611,525,858.00	1,473,679,216.00	2,866,451,770.00	2,732,595,137.00	2,215,622,549.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	470,658,000.00	200,992,000.00	745,474,000.00	483,881,000.00	151,597,000.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00

Realisasi Silpa terbesar yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 148.755.193.439,33 pemberi kontribusi berasal dari pelampauan penerimaan PAD sebesar 3,99% atau Rp. 5.941.569,81, pelampauan penerimaan dana perimbangan sebesar 111,91% atau RP. 166.476.936.242,00, pelampauan penerimaan lai-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16,06% atau Rp. 23.894.562.191,00, penghemaran belanja dan akibat lainnya sebesar 70,43% atau Rp. 104.770.770.479,41 dan kewajiban kepada pihak ketiga dengan akhir tahun belum terselesaikan sebesar 1,78% atau Rp. 2.648.525.703,77, secara rinci realisasi SiLPA disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Audited)		2017 (Audited)		2018 (Audited)		2019 (Audited)		2020 (Audited)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	30,526,001,199.46	0.00%	93,063,304,606.93	0.00%	148,755,193,439.33	0.00%	95,944,993,302.55	0.00%	87,026,437,599.10	0.00%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	5,457,183,004.21	17.88%	0	0.00%	5,941,569,593.81	3.99%	7,316,854,064.08	7.63%	0	0.00%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0.00%	0	0.00%	166,476,936,242.00	111.91%	0	0.00%	0	0.00%
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0.00%	0	0.00%	23,894,562,191.00	16.06%	0	0.00%	6,122,412,477.00	7.04%
5	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	0	0.00%	0	0.00%	104,770,770,479.41	70.43%	0	0.00%	0	0.00%
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	9,340,847,904.00	30.60%	1,768,091,954.00	1.90%	2,648,525,703.77	1.78%	3,799,547,930.24	3.96%	775,132,792.49	0.89%
7	Kegiatan Lanjutan	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Muatan ini dipedomankan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun ke depan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Namun rata-rata pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya menjadi pedoman karena terdapat kondisi-kondisi khusus sehingga memakai kebijakan sendiri. Adapun proyeksi untuk lima tahun ke depan, meliputi : proyeksi pendapatan, proyeksi belanja yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Adapun proyeksi pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.9
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026

URAIAN	RINCIAN	Pertumbuhan Tanpa Asumsi Covid-19	Distribusi Terhadap Total Pendapatan	PROYEKSI					
				APBD 2021 (Kondisi Awal)	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN	3.43%	100%	1.025.289.903.745	1.064.529.837.349	1.101.149.379.277	1.138.990.648.686	1.178.095.579.007	1.218.507.542.955
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5,84%	59.827.534.430	62.859.799.361	65.098.139.997	67.378.111.937	69.701.143.134	72.068.710.521
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah		2,50%	25.615.000.000	27.473.775.000	28.498.375.000	29.522.975.000	30.547.575.000	31.572.175.000
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah		1,70%	17.438.840.000	18.036.992.212	18.655.661.045	19.295.550.219	19.957.387.592	20.641.925.986
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,25%	2.592.000.000	2.680.905.600	2.772.860.662	2.867.969.783	2.966.341.147	3.068.086.648
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		1,38%	14.181.694.430	14.668.126.549	15.171.243.290	15.691.616.935	16.229.839.396	16.786.522.887
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER		89,13%	913.853.269.315	945.198.436.452	977.618.742.822	1.011.151.065.701	1.045.833.547.254	1.081.705.637.925

4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		86,14%	883.165.878.000	913.458.467.615	944.790.093.054	977.196.393.246	1.010.714.229.534	1.045.381.727.607
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		2,99%	30.687.391.315	31.739.968.837	32.828.649.768	33.954.672.455	35.119.317.720	36.323.910.318
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		5,03%	51.609.100.000	53.379.292.130	55.210.201.850	57.103.911.774	59.062.575.947	61.088.422.302
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		5,03%	51.609.100.000	53.379.292.130	55.210.201.850	57.103.911.774	59.062.575.947	61.088.422.302

Sesuai Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Pendapatan Transfer,
3. Lain- lain Pendapatan Daerah Yang SAH:

Pertumbuhan tanpa asumsi Covid-19 yang dimaksud pada tabel 3.9 adalah rata-rata pertumbuhan pendapatan pada tahun 2016 – 2019, dengan asumsi bahwa pada tahun 2022 telah terjadi pemulihan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga pertumbuhan pendapatan sesuai dengan kondisi pada tahun 2016 – 2019. Distribusi terhadap total pendapatan diperoleh dari rasio rata-rata nilai rincian pendapatan pada tahun 2016 – 2019 terhadap rata-rata total pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016 – 2019.

Sesuai APBD 2021 Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.025.289.903.745,- yaitu terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.59.827.534.430,-, pendapatan transfer sebesar Rp. 913.853.269.315 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 51.609.100.000,-.

Diproyeksikan Pendapatan Daerah untuk 5 Tahun kedepan terus mengalami peningkatan, Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 diperkirakan sebesar RP.1,064,529,837,349,- dan pada tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 1,102,149,379,277,- selanjutnya pada tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp. 1,138,990,648,686,- dan pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 1,178,095,579,007,- dan pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp. 1,218,507,542,955,-.

Tabel. 3.10
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026

URAIAN	Uraian	Pertumbuhan Tanpa Asumsi Covid-19	Distribusi Terhadap Total Belanja	PROYEKSI					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Belanja	5.47%		1,025,274,903,745	1,081,357,162,347.69	1,140,507,105,254.84	1,202,892,533,964.22	1,268,690,428,669.94	1,338,087,450,334.59
5 . 1	BELANJA OPERASI		64.64%	720,484,336,448	699,005,777,657.13	737,241,203,730.81	777,568,097,219.73	820,100,860,823.12	864,960,155,036.77
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai		41.69%	463,616,754,873	450,800,724,190.04	475,459,401,292.11	501,466,901,330.34	528,897,004,552.77	557,827,526,966.98
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa		20.82%	240,269,409,735	225,092,272,870.57	237,404,759,024.76	250,390,734,825.49	264,087,039,973.42	278,532,529,290.78
5 . 1 . 5	Belanja Hibah		1.60%	6,222,271,840	17,347,865,180.69	18,296,788,691.56	19,297,618,060.60	20,353,192,524.12	21,466,506,623.94
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial		0.53%	10,375,900,000	5,764,915,415.82	6,080,254,722.38	6,412,843,003.30	6,763,623,772.80	7,133,592,155.07
5 . 2	BELANJA MODAL		23.12%	151,500,372,177	250,040,708,387.84	263,717,867,184.75	278,143,162,850.90	293,357,518,269.72	309,404,094,795.25
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah		0.02%	150,000,000	247,564,449.64	261,106,157.76	275,388,593.63	290,452,274.86	306,339,935.36
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		6.97%	45,682,189,199	75,395,240,182.52	79,519,339,330.84	83,869,025,581.79	88,456,638,488.58	93,295,192,574.63
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		7.88%	51,660,841,940	85,262,586,018.59	89,926,426,302.56	94,845,377,382.60	100,033,393,749.93	105,505,193,202.64
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		7.19%	47,133,766,638	77,790,966,647.82	82,046,111,382.72	86,534,011,378.22	91,267,398,283.84	96,259,700,166.83
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.05%	6,873,574,400	11,344,351,089.28	11,964,884,010.89	12,619,359,914.66	13,309,635,472.52	14,037,668,915.79
5 . 3	Belanja Tidak Terduga		0.02%	8,135,415,920	233,477,003.88	246,248,132.54	259,717,838.47	273,924,333.65	288,907,920.26
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga		0.02%	8,135,415,920	233,477,003.88	246,248,132.54	259,717,838.47	273,924,333.65	288,907,920.26
5 . 4	Belanja Transfer		12.21%	145,154,779,200	132,077,199,298.84	139,301,786,206.74	146,921,556,055.13	154,958,125,243.45	163,434,292,582.32
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil		0.30%	3,560,364,500	3,203,117,523.91	3,378,327,181.97	3,563,120,760.72	3,758,022,498.01	3,963,585,307.36
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan		11.92%	141,594,414,700	128,874,081,774.93	135,923,459,024.77	143,358,435,294.41	151,200,102,745.44	159,470,707,274.96

Komponen belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari empat jenis yaitu :

1. belanja operasi,
2. belanja modal dan,
3. belanja tak terduga,
4. belanja transfer:

Pertumbuhan tanpa asumsi Covid-19 yang dimaksud pada tabel 3.10 adalah rata-rata pertumbuhan belanja pada tahun 2016 – 2019, dengan asumsi bahwa pada tahun 2022 telah terjadi pemulihan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga pertumbuhan belanja sesuai dengan kondisi pada tahun 2016 – 2019. Distribusi terhadap total belanja diperoleh dari rasio rata-rata nilai rincian belanja pada tahun 2016 – 2019 terhadap rata-rata total belanja Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016 – 2019.

Total belanja Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021 sebesar Rp. 1.025.274.903.745, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 720.484.336.448,- dan belanja modal sebesar Rp. 151.500.372.177,- dan belanja tak terduga sebesar Rp. 8.135.415.920,-, dan belanja transfer sebesar Rp. 145.154.779.200,-.

Belanja operasi diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat rutin misalnya belanja gaji Aparat Sipil Negara. Adapun belanja modal diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas produksi daerah yang bersifat produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk pembangunan dan perluasan jalan daerah Kabupaten. Pembangunan irigasi atau peningkatan kapasitas produksi perusahaan daerah. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja operasi daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 699,005,777,657.13,- pada tahun 2023 sebesar Rp. 737,241,203,730.81,-, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 777,568,097,219.73,-, pada tahun 2025 sebesar Rp. 820,100,860,823.12,-, dan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 864,960,155,036.77,-.

Belanja modal daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2022 di proyeksi Rp. 250,040,708,387.84,- pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 263,717,867,184.75,- dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 278,143,162,850.90,- pada tahun 2025 sebesar Rp. 293,357,518,269.72,- dan pada tahun 2026 sebesar Rp. 309,404,094,795.25.

Belanja Transfer Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 132,077,199,298.84 terus mengalami peningkatan dan pada akhir tahun perkiraan 2026 sebesar Rp. 163,434,292,582.32,-

Pendapatan daerah yang masih bertumpuh dari dana transfer memerlukan alternative sumber pendanaan lain untuk mengejar dan mempercepat pembangunan daerah. Selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di setiap pajak daerah dan retribusi daerah, maka dipeprlukan sumber PAD lain seperti BUMD untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah. Apabila memungkinkan, dapat dilakukan pendanaan melalalui pinjaman daerah.

3.2.1. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Analisis yang dilakukan dan proyeksi pendapatan serta belanja daerah diperoleh proyeksi kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat pada **Tabel.3.11** dibawah ini.

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1,025,289,903,745,-	1,064,529,837,349,-	1,101,149,379,277,-	1,138,990,648,686,-	1,178,095,579,007,-	1,218,507,542,955,-
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	31,669,104,940,-	37,116,036,638,-	43,499,814,042,-	50,981,570,045,-	59,750,151,615,-	70,026,886,478,-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-	-
Total Penerimaan		1,056,959,008,685,-	1,101,645,873,987,-	1,144,649,193,319,-	1,189,972,218,731,-	1,237,845,730,622,-	1,288,534,429,433,-
Dikurangi :		463,616,754,873.00	450,800,724,190,-	475,459,401,292,-	501,466,901,330,-	528,897,004,552,-	557,827,526,966,-
4	Belanja Operasi (belanja Pegawai)	463,616,754,873.00	450,800,724,190,-	475,459,401,292,-	501,466,901,330,-	528,897,004,552,-	557,827,526,966,-
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		593,342,253,812,-	650,845,149,797,-	669,189,792,027,-	688,505,317,401,-	708,948,726,070,-	730,706,902,467,-

Berdasarkan hasil **Tabel 3.11** tersebut diperoleh rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dengan menggunakan informasi data pendapatan. Sisa lebih riil perhitungan anggaran dan data total belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai

program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan data pada tabel diatas tampak bahwa dari mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, sehingga hal ini merupakan modal utama bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah baik secara fisik maupun non fisik. Pada tahun 2022 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperkirakan sebesar Rp. 650.845.149.797,- pada tahun 2023 sebesar Rp. 669.189.792.027,- pada tahun 2024 sebesar Rp. 688.505.317.401,- pada tahun 2025 sebesar Rp. 708.948.726.070,- dan pada akhir tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp. 730.706.902.467,-.

Berdasarkan tabel diatas maka rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah dikurangi belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2021-2026 akan diperoleh surplus/defisit anggaran riil atau berimbang.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini akan mengacu pada program prioritas Kepala Daerah, baik itu prioritas I, prioritas II, maupun prioritas III. Dari total dana alokasi pagu indikatif pada tabel tentang rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan tertentu prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II, Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

1. Prioritas I

Prioritas I merupakan kegiatan pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat /Kebijakan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dari total anggaran program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi/ daerah. Disamping itu, prioritas I juga diperuntukan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prioritas II

Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kegiatan kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

3. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PAD, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan presentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaanya. Besarnya persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Basis total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu Perangkat Daerah, secara persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (I dan II) telah dirumuskan, sisanya dialokasikan untuk persentase final prioritas III.

BUMD

Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal dengan minimnya anggaran tahunan yang diterima Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Program/Kegiatan sangat dibutuhkan sumber-sumber lain selain alokasi DAU salah satunya dengan adanya BUMD di Labuhanbatu Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya BUMD dengan pengelolaan yang baik akan meningkatkan Pendapatan Asli pada suatu daerah. Berangkat dari hal ini maka pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 mulai dibangun *mind set* untuk mendirikan BUMD di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selain itu tujuan lahirnya BUMD adalah sebagai sarana pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara dan salah satu bagian dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Labuhanbatu Utara. Sampai dengan saat ini belum ada BUMD di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Oleh sebab itu, di periode RPJMD Tahun 2021-2026 akan dilakukan persiapan penataan kelembagaan yang mampu mengelola potensi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Pendirian BUMD. Adapun rencana pendirian BUMD di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pendirian BUMD terkait pengolahan migas untuk mengakomodir keikutsertaan melalui BUMD.

Selain itu melihat potensi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu didirikan BUMD yang bergerak dibidang usaha industry pengolahan hasil pertanian, SPBU, hotel, pusat jajanan, industry air minum kemasan, dan lain lain

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan pokok permasalahan dihasilkan dari evaluasi dokumen RPJMD periode 2016-2021. Pokok permasalahan ini akan menjadi fokus utama yang harus diatasi oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun permasalahan utama di Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir akibat adanya akar masalah yang terjadi pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut rincian Pokok masalah, masalah dan akar masalah di Kabupaten Labuhanbatu Utara :

Tabel 4.1

Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah
di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pendidikan dan Kesehatan	a. Tidak meratanya ketersediaan guru dan kualitas SDM Tenaga Pendidik. b. Tidak meratanya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. c. Masih rendahnya kesehatan ibu dan anak serta rendahnya status gizi masyarakat. d. Tidak meratanya ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan.	a. Belum meratanya akses pendidikan dan distribusi guru dan rendahnya mutu Manajemen Sekolah. b. Masih rendahnya identifikasi kebutuhan untuk sarana dan prasarana sekolah. c. Masih rendahnya pelatihan bagi tenaga pendidik. d. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk pemenuhan gizi. e. Masih terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2.	Kemisikinan, Pengangguran dan Sosial	a. Masih mengandalkan sektor Pertanian b. Minimnya Ketersediaan Lapangan Kerja dan Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja yang ada	a. Sektor ekonomi kreatif belum digali secara maksimal b. Lapangan pekerjaan yang masih terbatas c. Minimnya eksploitasi sumber daya alam. d. Masih minimnya pelatihan dan ruang

			Balai Latihan Kerja. e. Masih terdapat penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
3.	Peningkatan Reformasi, Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Rendahnya kualitas Pelayanan Publik.	a. Belum maksimalnya pelaksanaan SAKIP. b. Rendahnya kualitas Pelayanan Publik.	a. Capaian Kinerja belum terukur. b. Belum optimalnya pelaksanaan penerapan Standard Pelayanan Publik.
4.	Tingginya Ketimpangan Wilayah dan Pendapatan	a. Kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan pesisir pantai. b. Belum meratanya ekonomi di Kawasan Pesisir Pantai dan Daratan.	a. Secara geografis struktur tanah di wilayah pesisir pantai dan wilayah daratan berbeda. b. Pertumbuhan Ekonomi masih bertumpu pada sektor Perkebunan dan Pertanian, sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum berkembang secara maksimal.
5.	Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan	Kerjasama Pemerintah seperti dengan Perusahaan melalui CSR masih belum optimal.	a. Kurangnya Kerjasama dengan Non Pemerintah. b. Belum maksimalnya penerimaan PAD.
6.	Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	a. Masih adanya perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang terkendali. b. Masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. c. Penanganan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan.	a. Regulasi tentang alih fungsi lahan masih minim. b. Masih adanya rumah tidak layak huni. c. Belum adanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah.
7.	Infrastruktur Wilayah	a. Belum Optimalnya operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi dan rawa. b. Adanya kondisi rawan bencana pada beberapa daerah. c. Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan	a. Sumber Daya Manusia yang tidak memadai. b. Kemampuan anggaran yang belum mencukupi.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi permasalahan yang harus diselesaikan atau bisa juga potensi keunggulan yang perlu ditingkatkan baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Isu strategis lahir akibat adanya permasalahan pembangunan yang belum tercapai dan harus segera diselesaikan mengingat permasalahan pembangunan tersebut bersinggungan dengan menyangkut kehidupan khalayak ramai. Isu strategis tidak hanya sebatas yang terjadi di dalam satu Kabupaten/Kota, isu strategis diadopsi dari isu internasional, isu nasional dan isu regional. Berikut beberapa isu strategis yang harus dipedomani melalui dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 :

4.2.1. Telaahan Isu Internasional

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)*).

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Tahun 2016-2030 antara lain :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment* yang berfokus pada :

1. Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak;
2. Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial;
3. Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana;
4. Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan keadilan bagi semua orang.

4.2.2. Telaahan Isu Strategis Regional

a. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC)

Diberlakukannya *Masyarakat Ekonomi ASEAN* (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia, satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkan dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beranekaragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

4.2.3. Telaahan Isu Nasional

Di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin tergambar beberapa Arah Pembangunan Nasional yang ingin dicapai selama periode 2020-2024. Arah pembangunan tersebut tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 yang lebih dikenal dengan prioritas nasional (PN). Adapun 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

4.2.4. Telaahan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Selain mempertimbangkan isu strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat perlu mengakomodir perencanaan berdasarkan isu strategis Provinsi Sumatera Utara, dimana di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dijabarkan isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Pendidikan

Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, belum optimalnya kualitas tenaga pendidik; yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Kesehatan

Peningkatan Usia Harapan Hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit, puskesmas, ketersediaan obat, Gerakan masyarakat Sehat (Germas) dan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin. Selanjutnya, penurunan prevalensi stunting juga menjadi hal yang penting, selain itu diperlukan pula percepatan penanganan pandemik covid 19.

3. Ketenagakerjaan

Sumatera Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk usia kerja, sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020 dan terdapat sekitar 1,23 juta orang penduduk usia kerja di Sumatera Utara yang terdampak Covid-19 atau sebesar 11,51 persen dari total penduduk usia kerja di Sumut. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan penanganan yang lebih serius. Untuk itu, Pengelolaan Balai

Latihan Kerja, Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM baru serta pemasaran hasil produksi melalui model e-commerce serta pembangunan aplikasi bursa lowongan kerja online yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

4. Agraris

Terbatasnya Sarana dan Prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan populasi ternak sapi, pencapaian swasembada komoditas pangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris.

5. Pariwisata

Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability) atau 4 K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi Wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pembangunan desa – desa wisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

6. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Dalam upaya membangun pergaulan masyarakat yang kondusif ditengah maraknya penyakit masyarakat yaitu judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, perlu dilakukan penanganan lebih serius untuk membangun peningkatan

kualitas sosial kemasyarakatan dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan serta kondisi kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berkeyakinan.

7. Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), mempertahankan Nilai laporan kinerja keuangan daerah serta peningkatan pelayanan publik dan penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

8. Infrastruktur

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara sepanjang ± 3.000 km tentunya memerlukan penentuan prioritas penanganan ruas jalan yang menjadi jalan strategis Provinsi yang mendukung Fungsi Daya Dukung Lingkungan, Susur Pantai Timur, Kawasan Strategis Prioritas Nasional Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Nasional Mebidangro, Kawasan Daerah Tertinggal dengan tentunya tetap memperhatikan peningkatan kemantapan jalan secara keseluruhan. Selanjutnya kebutuhan pembangunan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh menjadi sesuatu yang urgensi dalam upaya pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

4.2.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan

diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Penanggulan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia.
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana.
3. Peningkatan ketahanan pangan melalui konektivitas distribusi dan ketahanan air (*Food and Water Security*) serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
4. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui tata kelola kesehatan yang baik serta pola hidup bersih dan sehat.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4.3. Isu – isu Strategis berdasarkan Analisis permasalahan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah dan isu strategis yang berkembang yang telah disajikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Pembangunan SDM Lambat

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Kinerja bidang kesehatan cukup baik jika melihat Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 (68,7) sampai dengan Tahun 2019 (69,46). Namun di sisi lain masih rendahnya kesehatan ibu dan anak serta rendahnya status gizi masyarakat hal ini dibuktikan dari terdapat beberapa kasus stunting di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ketersediaan Puskesmas/Pustu dan Posyandu sudah cukup terpenuhi namun rasio ketersediaan dokter belum tersebar secara merata.

Satu permasalahan yang mungkin baru kita hadapi namun memiliki efek yang sangat signifikan baik dari segi kesehatan maupun perekonomian yaitu pandemi Covid-19. Ini juga menjadi fokus Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui pola hidup sehat kepada masyarakat.

- Lambatnya kinerja bidang pendidikan dalam hal rata-rata lama sekolah. Dimana sampai dengan tahun 2020 rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu Utara 8,4 Tahun jauh tertinggal dengan Provinsi Sumatera Utara diangka 9,54 Tahun. Ini disebabkan belum terpenuhinya kemudahan akses pendidikan, ketersediaan Kompetensi Guru / tenaga pendidik yang masih kurang terutama di wilayah yang jauh dari Ibukota Kabupaten (Aek Kanopan).

2. Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Perlambatan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak mencerminkan keberhasilan, bahkan di tahun 2015 diangka 5,18% sedangkan di tahun 2019 menurun menjadi 5,15%. Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada permasalahan yang dihadapi daerah, yaitu : Sektor yang menyokong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk itu maka diharapkan sektor lain seperti perdagangan, jasa, pariwisata dan industri pengolahan agar dieksplor secara optimal.

3. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal yang disebabkan oleh tingkat pengawasan masih rendah dan manajemen sumber daya manusia belum optimal.
- Kinerja pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen (E-Government) pelayanan publik belum terintegrasi.
- Masih rendahnya inovasi yang dikembangkan dalam mempermudah akses pelayanan publik.
- *Mindset* aparaturnya belum berbasis kinerja.

4. Infrastruktur

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada permasalahan yang dihadapi daerah adalah ketimpangan wilayah yang disebabkan oleh belum terpenuhinya infrastruktur dasar dan sarana prasarana pemukiman yang layak, ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah. Kondisi jalan di Wilayah Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong masih sangat memprihatinkan. Hal ini menjadikan 2 kecamatan ini menjadi tertinggal dari segi aksesibilitas pelayanan. Namun dibalik keterbatasan akan infrastuktur jalan di 2 kecamatan tersebut, ada beberapa potensi yang perlu didorong Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu sektor pertanian dan perikanan. Oleh sebab itu peningkatan infrastuktur irigasi dan sarana bagi para nelayan juga harus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

5. Kemiskinan dan Pengangguran

Isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselasaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multi dimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat lapangan kerja yang masih kurang, pendidikan yang rendah, dan kurangnya keterampilan. Salah satu syarat keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan wilayah sasaran dengan tepat.

Sampai dengan Tahun 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara berada di peringkat ke 8 (delapan) dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota sekawasan pantai timur Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,57% masih berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara yaitu 8,83%. Problematika ini disebabkan oleh masih kurangnya lapangan kerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara hal ini ditandai dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 5,84% di Tahun 2019, yang berarti di bawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Selain itu, Penggunaan Dana Desa belum bisa dimaksimalkan dengan baik untuk memberdayakan sumber daya lokal dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di masing-masing desa.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu Utara berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

BAB V**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN****5.1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode RPJMD 2021 – 2026 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT
DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA
DAN RELIGIUS”**

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya – upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor - faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021 – 2026 sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal;**
- Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi;**
- Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahan;**
- Misi 4 : Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan;**
- Misi 5 : Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.**

5.3. Tujuan dan Sasaran

Berangkat daripada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

5.3.1. Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal**, maka tujuan pembangunan adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat

Dengan sasaran pembangunan adalah

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dan Peningkatan Implementasi Kabupaten Layak Anak;
4. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Anak/Perempuan Korban Kekerasan/KDRT Termasuk TPPO;
5. Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
6. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga.

5.3.2. Dalam rangka pencapaian misi **Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggung jawab Berbasis Pengembangan Teknologi**, maka tujuan pembangunan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik;
5. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembangunan;
6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

5.3.3. Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahan**, maka tujuan pembangunan adalah ,ewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur;
2. Tersedianya Air Minum dan Sanitasi;
3. Tersedianya Perumahan dan Permukiman Yang Tertata;
4. Meningkatnya Penataan Ruang;
5. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten;
6. Meningkatnya Ketersediaan tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;
7. Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan;
8. Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman.

5.3.4. Dalam rangka pencapaian misi **Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan**

Berkelanjutan, maka tujuan pembangunan adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif.

5.3.5 Dalam rangka pencapaian misi **Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan**, maka tujuan pembangunan adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat;
2. Meningkatnya pelestarian budaya;
3. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat Dengan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sejahtera Dan Religius”

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal									
		Tujuan 1	Indeks Pembangunan Manusia	71,73	71,86	71,98	72,08	72,17	72,26	72,26
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat								
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,52	6,21	5,91	5,61	5,30	5,00	5,00
			Indeks Pembangunan Gender	90,12	90,27	90,42	90,57	90,72	90,86	90,86
			Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	90,72	90,98	91,23	91,49	91,74	92	92
		Sasaran 1.1	Indeks Pendidikan (%)	64,29	64,48	64,65	64,81	64,94	65,07	65,07
		Meningkatnya kualitas pendidikan								
		Sasaran 1.2	Indeks Kesehatan (%)	76,34	76,59	76,84	77,09	77,34	77,59	77,59
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
		Sasaran 1.3	Persentase Partisipasi	5,48	5,50	5,52	5,58	5,60	5,63	5,63

		Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dan Peningkatan Implementasi Kabupaten Layak Anak	Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)							
			Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR (%)	2.9	2.9	2.9	8.8	8.8	8.8	8.8
			Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	93.40	93.70	94	94.50	94.70	95	95
			Indeks Kabupaten/Kecamatan /Desa/Kelurahan Layak Anak	57	68	78	87	94	100	100
		Sasaran 1.4								
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Anak/Perempuan Korban Kekerasan/KDRT Termasuk TPPO	Rasio KDRT (Rasio)	0.019	0.017	0.015	0.013	0.011	0.0083	0.0083
			Persentase Anak Korban Kekerasan (%)	0,045	0,041	0,037	0,034	0,030	0,026	0,026
			Rasio Perempuan Korban Kekerasan	0,26	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,17

			Termasuk TPPO (Rasio)							
		Sasaran 1.5								
		Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	90,72	90,98	91,23	91,49	91,74	92	92
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,18	70,18	70,83	71,48	72,14	72,79	72,79
			Rasio penduduk Yang Bekerja		93,48	93,79	94,39	94,70	95	95
		Sasaran 1.6								
		Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif (%)	29,47	32,36	32,36	35,20	39,50	39,50	39,50
			Jumlah Prestasi Keolahragaan (Medali)	20	30	35	40	45	45	45
		Sasaran 1.7 Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran	75,46	75,38	75,18	74,86	74,42	73,86	73,86
II.	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi									
		Tujuan 2								
		Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

		meningkatkan pelayanan publik								
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	A	A
			Nilai SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB	BB
			Reformaasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B	B	B
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	6,80	7,87	8,93	10	11,07	12,14	12,14
		Sasaran 2.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) Yang Tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Sasaran 2.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	CC	B	B	B	BB	BB	BB
		Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat								
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah								
			Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Sasaran 2.3								
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	Sedang (71,7)	Sedang (71,7)	Sedang (72)	Sedang (73)	Sedang (74)	Sedang (75)	Sedang (75)
		Sasaran 2.4	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	A	A
		Meningkatnya Kinerja								

		Pelayanan dan Informasi Publik								
		Sasaran 2.5								
		Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembangunan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
		Sasaran 2.6								
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	6,80%	7,87%	8,93%	10%	11,07%	12,14%	12,14%
			Jumlah BUMD Yang Terbentuk	-	-	1	2	2	2	2
III.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahan									
		Tujuan 3								
		Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang (%)	66,18	68,94	71,71	74,47	77,24	80	80
		Sasaran 3.1								
		Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	25,34	30, 23	35,11	40,00	44,89	50,00	50,00
			Persentase jaringan irigasi kondisi baik	41,58	46,58	51,58	56,58	61,58	66,58	66,58

			Persentase Penanganan Tata Ruang		20	30	35	40	45	45
			Ketersediaan Bangunan Sarana Umum	3	2	3	4	5	6	6
			Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia	38%	38%	57%	64%	67%	73%	73 %
			Persentase fasilitas keselamatan jalan dan penyebrangan yang tersedia	5%	5%	20%	22,5%	25%	27,5%	27,5%
		Sasaran 3.2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan Sanitasi		20	25	30	35	40	40
		Tersedianya Air Minum dan Sanitasi								
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		3	6	9	13	16	16
		Sasaran 3.3	Rasio Rumah Layak Huni		5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Tersedianya Perumahan dan Permukiman Yang Tertata								
			Rasio Permukiman Layak Huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
		Sasaran 3.4	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW		30%	35%	40%	50%	50%	50%
		Meningkatkan Penataan Ruang								

		Sasaran 3.5									
		Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Kabupaten	Persentase Pengelolaan Persampahan Yang Tertangani		78%	78,5%	79%	80%	82%	82%	
			Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan		15%	17%	20%	22%	25%	25%	
		Sasaran 3.6									
		Meningkatnya Ketersediaan tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
			Penyelesaian Kasus Tanah Negara	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
			Penyelesaian Izin Lokasi	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
		Sasaran 3.7									
		Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sasaran 3.8									
		Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman	Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

IV. Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan										
		Tujuan 4								
		Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	1,06	1,85	2,64	3,42	4,21	5,00	5,00
			Gini Rasio	0,262	0,259	0,255	0,251	0,247	0,244	0,240
		Sasaran 4.1				115.86				
		Meningkatkan Ketahanan Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	103.107,38 ton	105.524,50 ton	7,20 ton	119.263,42 ton	123.079,54 ton	127.420,26 ton	127.420.26 ton
			Penguatan Cadangan Pangan	50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran 4.2								
		Meningkatnya perekonomian masyarakat	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	17.87	18.13	18.39	18.65	18.91	19.17	19.17
			Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	29.75	29.80	29.85	29.89	29.93	29.97	29.97
			Nilai Investasi	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar
		Sasaran 4.3								
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	59,6	61,3	62,1	62,7	64,6	64,6
			emisi gas rumah kaca	N/A						
		Sasaran 4.4								

		Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
V.	Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan									
		Tujuan 5								
		Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	71,73	71,86	71,98	72,08	72,17	72,26	72,26
		Sasaran 5.1								
		Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas (%)	4,14	3,91	3,68	3,45	3,23	3	3
		Sasaran 5.2								
		Meningkatnya Pelestarian Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	3	3	3	3	3	3	3
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	30	30	36	43	50	57	30
		Sasaran 5.3								
		Menjaga Stabilitas Politik di Daerah	Persentase Hak Pemilih Suara	76,29	76,49	76,69	78,69	80	80	80
			Jumlah Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	0

5.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran umum yang ingin dicapai Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Utara yang menjadi cerminan janji-janji Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Utara selama masa kampanye. Peranan prioritas pembangunan daerah sangat signifikan terhadap keberhasilan visi misi Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Utara selama periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Utara. Berikut prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara :

1. **Sumber Daya Manusia Yang Hebat Dan Berkualitas**
 2. **Pemerintahan Hebat Dan Pelayanan Prima**
 3. **Infrastruktur Hebat dan Terkonektivitas**
 4. **Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing**
 5. **Masyarakat Labuhanbatu Utara Yang Religius**
1. **Sumber Daya Manusia Yang Hebat Dan Berkualitas, dengan fokus :**
- a. Peningkatan SDM Pendidik Hebat Melalui pelatihan dan pendidikan dan Pemenuhan sarana/prasarana pendidikan.
 - b. Penguatan keterampilan sumber daya manusia di bidang Teknologi dan Informasi.
 - c. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan.
 - e. Pemenuhan gizi bagi anak sekolah dasar melalui pemberian sarapan bergizi ke sekolah dasar.
 - f. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Kasus Stunting serta Kasus TBC.
 - g. Menjaga kesadaran masyarakat untuk tetap menjalankan pola hidup sehat dan bersih.
 - h. Peningkatan Pelayanan RSUD.
 - i. Bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi.
 - j. Memberikan kesempatan dan kemudahan pelayanan pendidikan, kesehatan bagi masyarakat miskin.

- k. Penguatan data masyarakat miskin dan pengalokasian bantuan tunai dan non tunai yang tepat sasaran.

2. Pemerintahan Hebat Dan Pelayanan Prima, dengan fokus :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada *e-government*.
- b. Peningkatan tata lembaga Pemerintahan melalui IT.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam perumusan kebijakan publik melalui Musrenbang.
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sarana prasarana pemerintahan.
- e. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai yang disertai dengan merit sistem.
- f. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Infrastruktur Hebat dan Terkonektivitas, dengan fokus :

- a. Peningkatan akses jaringan jalan kawasan pesisir Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir serta pembangunan jalan Kabupaten menuju Kecamatan Aek Kuo.
- b. Peningkatan Akses jaringan jalan menuju sentra-sentra produksi (Pertanian, Industri dan Pariwisata) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Penguatan kelembagaan dalam rangka perbaikan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat.
- d. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Kawasan Kumuh.
- e. Peningkatan dan penanganan sanitasi dan persampahan (Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir).
- f. Peningkatan Jalan Lingkungan di seluruh Desa/Kelurahan.
- g. Pemantapan Keseimbangan Wilayah Ibukota Kecamatan.

4. Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing, dengan fokus :

- a. Mengembangkan potensi pariwisata daerah dataran tinggi.

- b. Mengembangkan potensi pariwisata daerah pertanian dan pesisir.
- c. Peningkatan Lapangan Usaha Melalui Sektor Pariwisata.
- d. Peningkatan jaringan irigasi dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas produksi pertanian.
- e. Menjaga ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga pangan.
- f. Peningkatan Produksi Pertanian dengan Pemberian Pupuk Bersubsidi, Bibit Atau Benih.
- g. Mengembangkan hilirisasi produk.
- h. Pengembangan Akses Informasi Produk Unggulan Daerah dan hasil industri kreatif berbasis online.
- i. Peningkatan promosi dan kemudahan pelayanan investasi dalam menumbuhkan wisausaha baru.

5. Masyarakat Labuhanbatu Utara Yang Religius, dengan fokus :

- a. Pemberian bantuan bagi guru ngaji dan sekolah minggu sebagai stimulus pendidikan karakter masyarakat untuk taat beragama serta menjunjung solidaritas antar beragama.
- b. Menghidupkan kembali sekolah sore (mda)/sekolah minggu.
- c. Menerapkan program mengaji dan tahfiz Al-Quran dalam pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak hanya mengakomodir janji-janji politik Kepala Daerah terpilih, namun dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 juga mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di dalam dokumen RPJMN yang dikenal dengan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Tabel 5.2
Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten
Labuhanbatu Utara

Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP4	Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP3	Infrastuktur Hebat dan Terkonektivitas
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP1	Sumber Daya Yang Hebat dan Berkualitas
		PP5	Masyarakat Labuhanbatu Utara Yang Religius
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP2	Pemerintahan Hebat dan Pelayanan Prima
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP3	Infrastuktur Hebat dan Terkonektivitas
		PP4	Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP3	Infrastuktur Hebat dan Terkonektivitas
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP2	Pemerintahan Hebat dan Pelayanan Prima

Tabel 5.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara

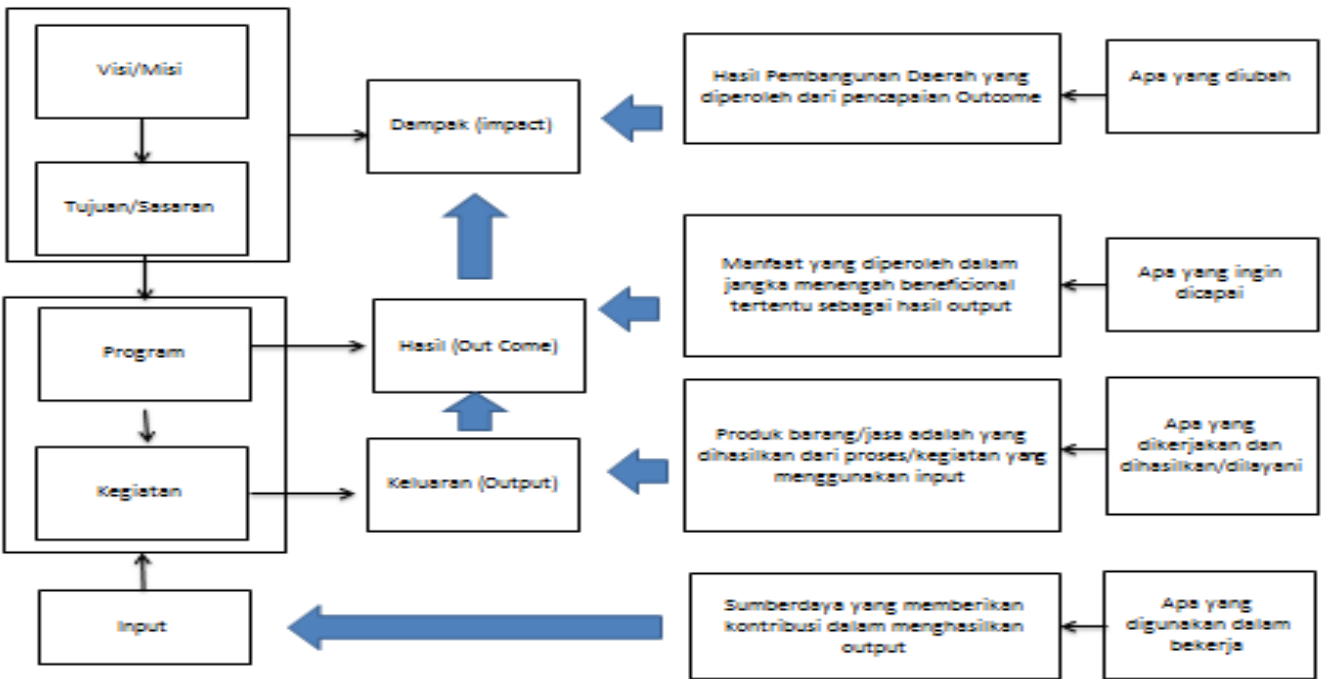
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara	
PP1	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	PP1	Sumber Daya Yang Hebat dan Berkualitas
PP2	Peningkatan akses dan mutu Pendidikan	PP1	Sumber Daya Yang Hebat dan Berkualitas
PP3	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PP3	Infrastuktur Hebat dan Terkonektivitas
PP4	Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	PP1	Sumber Daya Yang Hebat dan Berkualitas
		PP2	Pemerintahan Hebat dan Pelayanan Prima
PP5	Peningkatan daya saing sektor agraris	PP3	Infrastuktur Hebat dan Terkonektivitas
		PP4	Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing
PP6	Peningkatan daya saing sektor pariwisata	PP3	Infrastuktur Hebat dan Terkonektivitas
		PP4	Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing
PP7	Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga	PP5	Masyarakat Labuhanbatu Utara Yang Religius
PP8	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	PP2	Pemerintahan Hebat dan Pelayanan Prima

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh Pemerintah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara,langka atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan Pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai visi, misi kepala daerah. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pemcapaian pembangunan daerah.

Secara skematik kinerja pembangunan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.1 :
Kinerja Pembangunan Daerah



Perumusan Tujuan dan Sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan rensta perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun dimasing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan penetapan RKPD.

Perumusan prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji – janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji – janji Bupati terpilih. Janji – janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri 90 Tahun 2019 atau kedalam kebijakan umum maupun strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas.

Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan umum maupun strategi.

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 berdasarkan masing-masing sasaran serta tema pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rumusan Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026

VISI	MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS	
MISI 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal	
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Strategi 1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun
		Strategi 1.1.2. Meningkatkan Pemenuhan SPM
		Strategi 1.1.3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal
	Sasaran 1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Strategi 1.2.1. Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat
		Strategi 1.2.2. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan
		Strategi 1.2.3. Peningkatan Anggota Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Strategi 1.2.4. Meningkatkan Kesertaan Peserta KB
	Sasaran 1.3. Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dan Peningkatan Implementasi Kabupaten Layak Anak	Strategi 1.3.1. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
		Strategi 1.3.2. Meningkatnya Capaian Kabupaten Layak Anak

	Sasaran 1.4. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Anak/Perempuan Korban Kekerasan/KDRT Termasuk TPPO	Strategi 1.4.1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pencegahan dan Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan/KDRT dan Anak Termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
	Sasaran 1.5. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	Strategi 1.5.1. Meningkatkan Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Strategi 1.5.2. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
		Strategi 1.5.3. Meningkatkan Kualitas, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
		Strategi 1.5.4. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
		Strategi 1.5.5. Peningkatan Kelembagaan Desa Menuju Desa Berkembang
	Sasaran 1.6. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga	Strategi 1.6.1. Peningkatan Pembinaan Organisasi Pemuda dan Wirausaha Muda Yang Mandiri, Inovatif dan Berkarakter
		Strategi 1.6.2. Meningkatkan Kompetensi dan Prestasi Keolahragaan
MISI 2	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab	

	Berbasis Pengembangan Teknologi	
Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik	Sasaran 2.1. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Strategi 2.1.1. Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik
		Strategi 2.1.2. Meningkatkan Penegakan Hukum Dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Ketenteraman Masyarakat
	Sasaran 2.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Strategi 2.2.1. Optimalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
		Strategi 2.2.2. Meningkatkan Integrasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dengan Penganggaran
		Strategi 2.2.3. Optimalisasi Implementasi SAKIP
		Strategi 2.2.4. Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan
		Strategi 2.2.5. Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah Dan Pengelola Barang Milik Daerah Serta Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		Strategi 2.2.6. Peningkatan Pemahaman Dan Penerapan SPIP Oleh OPD
		Strategi 2.2.7. Meningkatkan Pembangunan Dan Pemanfaatan <i>E-Government</i> Dalam Tata Kelola Pemerintah
		Strategi 2.2.8. Penguatan Produk Hukum Dan Peningkatan Kapasitas Legislatif
		Strategi 2.2.9.

		Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah
		Strategi 2.2.10. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Penataan Kearsipan Pemerintah Daerah
	Sasaran 2.3. Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Strategi 2.3.1. Meningkatkan Kualitas Penataan ASN Sesuai Dengan Kualifikasi
		Strategi 2.3.2. Meningkatkan Kompetensi ASN
	Sasaran 2.4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dan Informasi Publik	Strategi 2.4.1. Peningkatan Mutu SDM Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pelayanan Publik
		Strategi 2.4.2. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik
		Strategi 2.4.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
		Strategi 2.4.4. Perluasan Data Dan Informasi Publik Melalui Media Elektronik Dan Non Elektronik
	Sasaran 2.5. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembangunan	Strategi 2.5.1. Melaksanakan Penelitian Pengembangan Yang Berkualitas
	Sasaran 2.6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Strategi 2.6.1. Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari PAD Sesuai Dengan Potensi Daerah
		Strategi 2.6.2. Pembentukan BUMD
MISI 3	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahan	
Tujuan 3 Mewujudkan Pembangunan	Sasaran 3.1. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana	Strategi 3.1.1. Meningkatkan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan	Infrastruktur	Kondisi Baik
		Strategi 3.1.2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Jembatan Lingkungan Kondisi Baik
		Strategi 3.1.3. Meningkatkan Kualitas Sarana Infrastruktur Irigasi
		Strategi 3.1.4. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Serta Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP)
		Strategi 3.1.5. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung
		Strategi 3.1.6. Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Infrastruktur
	Sasaran 3.2. Tersedianya Air Minum dan Sanitasi	Strategi 3.2.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dan Masyarakat Tentang Air Bersih Dan Sanitasi
		Strategi 3.2.2. Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Akses Dan Kualitas Air Minum
		Strategi 3.2.3 Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Akses dan Kualitas Sanitasi
	Sasaran 3.3. Tersedianya Perumahan Dan Permukiman Yang Tertata	Strategi 3.3.1. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Strategi 3.3.2. Peningkatan Kualitas dan Akses Rumah Layak Huni
	Sasaran 3.4. Meningkatkan Penataan Ruang	Strategi 3.4.1. Penataan dan Pemanfaatan Tata Ruang

		Strategi 3.4.2. Pengendalian Tata Ruang
		Strategi 3.4.3. Pemanfaatan dan Pengendalian Fungsi Ruang Terbuka Hijau
	Sasaran 3.5. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Kabupaten	Strategi 3.5.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Kualitas Penanganan Sampah Yang dihasilkan Masyarakat
	Sasaran 3.6. Meningkatnya Ketersediaan tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Strategi 3.6.1. Meningkatkan Ketersediaan Tanah Untuk Program Prioritas Pembangunan daerah
		Strategi 3.6.2. Menyelesaikan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Pertanahan
	Sasaran 3.7. Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan	Strategi 3.7.1. Peningkatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Strategi 3.7.2. Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana
		Strategi 3.7.3. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Strategi 3.7.4. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Sasaran 3.8. Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman	Strategi 3.8.1. Peningkatan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
MISI 4	Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan	
Tujuan 4	Sasaran 4.1.	Strategi 4.1.1.

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Dan Pertanian Lainnya
		Strategi 4.1.2. Peningkatan Diversifikasi dan Penguatan Cadangan Pangan
		Strategi 4.1.3. Peningkatan Produksi Perikanan
	Sasaran 4.2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Strategi 4.2.1. Meningkatkan Dan Mengembangkan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Serta Penetapan Kawasan Industri Kabupaten
		Strategi 4.2.2. Pembinaan Dan Pemberdayaan Kampung KB
		Strategi 4.2.3. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha
		Strategi 4.2.4. Meningkatkan Investasi Daerah
		Strategi 4.2.5. Meningkatkan Destinasi Kepariwisata
		Strategi 4.2.6. Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten
		Strategi 4.2.7. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Desa
	Sasaran 4.3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Strategi 4.3.1. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Strategi 4.3.2. Melestarikan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
		Strategi 4.3.3. Meningkatkan Pengelolaan Ruang

		Terbuka Hijau
		Strategi 4.3.4. Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
		Strategi 4.3.5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Strategi 4.3.6. Peningkatan Pelayanan Pengaduaan Masyarakat Terkait Pencemaran
		Strategi 4.3.7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
		Strategi 4.3.8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Sasaran 4.4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Strategi 4.4.1. Mendorong dan Memfasilitasi OPD/Masyarakat Untuk Berinovasi
MISI 5	Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	
Tujuan 5 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya	Sasaran 5.1. Meningkatnya Nilai – Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan Masyarakat	Strategi 5.1.1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Karakter Keagamaan
		Strategi 5.1.2. Meningkatkan Fungsi Lembaga Keagamaan
		Strategi 5.1.3. Memberantas Narkoba dan Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama
	Sasaran 5.2. Meningkatnya Pelestarian Budaya	Strategi 5.2.1. Meningkatkan Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya
	Sasaran 5.3. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah	Strategi 5.3.1. Peningkatan Peran Partisipasi Pemilih

		Strategi 5.3.2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan Nasional Melalui Forum Strategis
--	--	--

6.2. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Untuk memperjelas alur arah kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA				
ARAH KEBIJAKAN				
TAHUN KE-I TAHUN 2022	TAHUN KE-II TAHUN 2023	TAHUN KE-III TAHUN 2024	TAHUN KE-IV TAHUN 2025	TAHUN KE-V TAHUN 2026
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Meningkatkan fasilitasi inisiatif inovasi daerah.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas dan menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (pertanian, pariwisata, industri dan UMKM) serta Mewujudkan uji coba pelaksanaan inovasi daerah.	Menciptakan sumber daya manusia yang menjunjung nilai-nilai moral, religius dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Labuhanbatu Utara serta Penerapan inovasi daerah.	Meningkatkan sinergitas seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pelaksanaan evaluasi inovasi daerah.	Mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah serta melaksanakan fasilitasi dan evaluasi inovasi daerah demi Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sejahtera dan Religius.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan setiap tahun di masing-masing tahap. Selanjutnya, tahapan-

tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

6.2.1. Arah Kebijakan Tahun Transisi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2021)

Arah kebijakan pembangunan tahun transisi difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang mendesak untuk segera ditangani, antara lain : Pemulihan ekonomi masyarakat dan penanganan pandemi Covid-19. Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan yang timbul akibat Covid-19 menjadi pekerjaan yang harus ditangani seluruh daerah. Bukan hanya bagaimana daerah dituntut untuk menurunkan kasus suspek Covid-19, namun daerah juga harus bisa mengalokasikan pendanaan untuk kebutuhan Vaksinasi, Insentif tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta stabilitas ekonomi melalui stimulus bagi pelaku usaha terdampak Covid-19. Bahkan kondisi pandemi Covid-19 ini belum bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir.

6.2.2. Arah Kebijakan Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2022)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Fokus utama di Tahun 2022 adalah Birokrasi yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasis kinerja, penyempurnaan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan melakukan perbaikan terhadap sistem dan aturan yang jelas dan mengarahkan Kegiatan Kemasyarakatan yang meningkatkan nilai-nilai moral bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara serta meningkatkan fasilitasi inisiatif inovasi daerah. Selain itu, Mengingat belum adanya kepastian berakhirnya pandemi Covid-19, maka penanganan Covid-19 tetap menjadi prioritas yang akan dikedepankan.

6.2.3. Arah Kebijakan Tahun Kedua RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua adalah dengan menekankan pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, terutama pemenuhan infrastruktur yang menjadi sentra-sentra produksi, seperti infrastruktur pertanian, infrastruktur akses Industri dan pariwisata

serta menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara serta mewujudkan uji coba pelaksanaan inovasi daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian dengan besarnya kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan, maka perlu peningkatan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menggali seluruh sektor yang berpotensi meningkatkan PAD melalui peningkatan kompetensi dan komitmen pengelola pajak-retribusi, memanfaatkan penggunaan teknologi dan digitalisasi serta meningkatkan kerjasama antar pihak.

6.2.4. Arah Kebijakan Tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2024)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga adalah perluasan lapangan usaha dengan prioritas utama penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini didukung juga dengan penerapan inovasi daerah untuk peningkatan keterampilan kerja OPD dan masyarakat serta melakukan kerjasama dengan Perusahaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selain peningkatan SDM dari segi keterampilan kerja, fokus lain yang harus diselesaikan adalah menciptakan masyarakat yang memiliki nilai moral dan akhlak yang baik. Penguatan nilai-nilai keagamaan bagi seluruh masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang religius. Kemudian penerapan inovasi daerah harus dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

6.2.5. Arah Kebijakan Tahun Keempat RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2025)

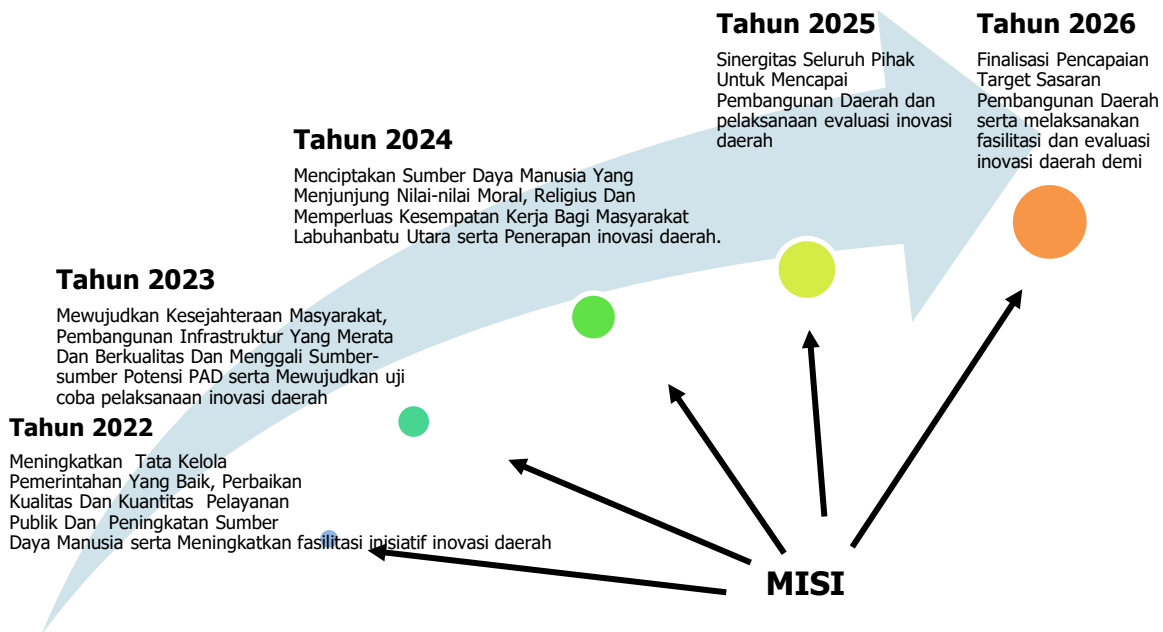
Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah mengevaluasi bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya. Apa saja target-target di awal penyusunan RPJMD dan Renstra yang masih tertinggal untuk dilakukan percepatan melalui strategi-strategi alternatif lain seperti konsolidasi, koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

6.2.6. Arah Kebijakan Tahun Kelima RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tahun 2026)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 merupakan tahap akhir implementasi RPJMD. Di tahun kelima ini menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Utara dalam menjalankan pemerintahan selama periode 2021-2026. Untuk itu

maka di Tahun 2026 ini berfokus pada akselerasi pencapaian kinerja untuk mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat dengan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sejahtera dan Religius.

Gambar 6.2
Tema RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026



6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam koridor pencapaian VISI “Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat Dengan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sejahtera dan Religius.”, secara makro dapat dicapai dengan pelaksanaan Program Unggulan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 - 2026 :

1. Sumber Daya Manusia Yang Hebat Dan Berkualitas, dengan fokus :
- a. Peningkatan SDM Pendidik Hebat Melalui pelatihan dan pendidikan dan Pemenuhan sarana/prasarana pendidikan.
 - b. Penguatan keterampilan sumber daya manusia di bidang Teknologi dan Informasi.

- c. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan.
- e. Pemenuhan gizi bagi anak sekolah dasar melalui pemberian sarapan bergizi ke sekolah dasar.
- f. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Kasus Stunting serta Kasus TBC.
- g. Menjaga kesadaran masyarakat untuk tetap menjalankan pola hidup sehat dan bersih.
- h. Peningkatan Pelayanan RSUD.
- i. Bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi.
- j. Memberikan kesempatan dan kemudahan pelayanan pendidikan, kesehatan bagi masyarakat miskin.
- k. Penguatan data masyarakat miskin dan pengalokasian bantuan tunai dan non tunai yang tepat sasaran.

2. Pemerintahan Hebat Dan Pelayanan Prima, dengan fokus :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada *e-goverment*.
- b. Peningkatan tata lembaga Pemerintah melalui IT.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam perumusan kebijakan publik melalui Musrenbang.
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sarana prasarana pemerintahan.
- e. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai yang disertai dengan merit sistem.
- f. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Infrastruktur Hebat dan Terkonektivitas, dengan fokus :

- a. Peningkatan akses jaringan jalan kawasan pesisir Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir serta pembangunan jalan Kabupaten menuju Kecamatan Aek Kuo.

- b. Peningkatan Akses jaringan jalan menuju sentra-sentra produksi (Pertanian, Industri dan Pariwisata) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Penguatan kelembagaan dalam rangka perbaikan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat.
- d. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Kawasan Kumuh.
- e. Peningkatan dan penanganan sanitasi dan persampahan (Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir).
- f. Peningkatan Jalan Lingkungan di Seluruh Desa/Kelurahan.
- g. Pemantapan Keseimbangan Wilayah Ibukota Kecamatan.

4. Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing, dengan fokus :

- a. Mengembangkan potensi pariwisata daerah dataran tinggi.
- b. Mengembangkan potensi pariwisata daerah pertanian dan pesisir.
- c. Peningkatan Lapangan Usaha Melalui Sektor Pariwisata.
- d. Peningkatan jaringan irigasi dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas produksi pertanian.
- e. Menjaga ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga pangan.
- f. Peningkatan Produksi Pertanian dengan Pemberian Pupuk Bersubsidi, Bibit Atau Benih.
- g. Mengembangkan hilirisasi produk.
- h. Pengembangan Akses Informasi Produk Unggulan Daerah dan hasil industri kreatif berbasis *online*.
- i. Peningkatan promosi dan kemudahan pelayanan investasi dalam menumbuhkan wisausaha baru.

5. Masyarakat Labuhanbatu Utara Yang Religius, dengan fokus :

- a. Pemberian bantuan bagi guru ngaji dan sekolah minggu sebagai stimulus pendidikan karakter masyarakat untuk taat beragama serta menjunjung solidaritas antar beragama.
- b. Menghidupkan kembali sekolah sore (mda)/sekolah minggu.
- c. Menerapkan program mengaji dan tahfiz Al-Quran dalam pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

Tab

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Labuhanbatu Utara
VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS

No	MISI	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	Target Capaian Sasaran										OPD penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupung Non-Formal	1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat																
		1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD dan SMP	Persen (%)	65.5	Rp 130,312,777,000.00	68	Rp 143,344,054,700.00	71	Rp 157,510,460,170.00	74	Rp 173,181,506,187.00	76	Rp 190,499,656,805.70	Dinas Pendidikan	
						PERSENTASE PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Persen (%)	7.55%	Rp 10,612,400,000.00	7.78%	Rp 11,673,640,000.00	8.03%	Rp 12,841,004,000.00	8.26%	Rp 14,125,104,400.00	8.50%	Rp 15,537,614,840.00		
						JUMLAH IZIN SEKOLAH YANG DIKELUARKAN	Izin Sekolah	15	Rp 450,000,000.00	20	Rp 495,000,000.00	25	Rp 544,500,000.00	30	Rp 598,950,000.00	35	Rp 658,845,000.00		
						ANGKA KELULUSAN SD DAN SMP	Persen (%)	89	Rp 380,000,000.00	90	Rp 418,000,000.00	92	Rp 459,800,000.00	94	Rp 505,780,000.00	95	Rp 556,358,000.00		
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Dan Menengah	Guru/10.000 Murid	601.2	Rp 88,000,000.00	630.8	Rp 96,800,000.00	639.1	Rp 106,480,000.00	633.9	Rp 117,128,000.00	627.5	Rp 128,840,800.00	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE CAPAIAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL) BIDANG KESEHATAN	Persen (%)	100	Rp 66,592,400,000.00	100	Rp 70,654,600,000.00	100	Rp 74,686,300,000.00	100	Rp 84,075,900,000.00	100	Rp 84,075,900,000.00	Dinas Kesehatan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK) YANG SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	orang	150	Rp 144,000,000.00	175	Rp 151,850,000.00	200	Rp 158,900,000.00	225	Rp 192,100,000.00	1,000	Rp 175,800,000.00	Dinas Kesehatan
						PROGRAM SEHAKAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	JUMLAH APOTIK DAN JABINGANNYA YANG MEMILIKI IZIN	IZIN	80	Rp 791,000,000.00	85	Rp 839,250,000.00	90	Rp 890,409,750.00	95	Rp 647,012,125.00	100	Rp 667,300,000.00	Dinas Kesehatan
		1.2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	JUMLAH DESA/KEKURAHAN YANG DIPASILITASI UNTUK MELAKUKAN GEBAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT	DESA/KELUARAHAN	15	Rp 450,000,000.00	15	Rp 494,400,000.00	15	Rp 520,300,000.00	15	Rp 579,450,000.00	15	Rp 658,702,500.00		Dinas Kesehatan
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE CAPAIAN SPM (STANDART PELAYANAN MINIMAL) RUMAH SAKIT	Persen (%)	100	Rp 39,511,739,200.00	100	Rp 41,961,721,008.00	100	Rp 43,457,241,592.00	100	Rp 47,551,512,783.80	100	Rp 50,165,858,669.52	RSUD
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK) YANG SESUAI STANDAR PELAYANAN	SERTIFIKAT	70	Rp 250,000,000.00	80	Rp 300,000,000.00	80	Rp 350,000,000.00	90	Rp 350,000,000.00	90	Rp 350,000,000.00	RSUD
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE CAPAIAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL) BIDANG KESEHATAN	Persen (%)	100%	Rp 72,480,000,000.00	100%	Rp 83,352,000,000.00	100%	Rp 95,854,800,000.00	100%	Rp 110,233,020,000.00	100%	Rp 126,767,973,000.00	Dinas Kesehatan
		1.3	Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dan Peningkatan Implementasi Kabupaten Layak Anak	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Persen (%)	47,70	Rp 144,000,000.00	47,90	Rp 148,000,000.00	48	Rp 302,000,000.00	48,18	Rp 137,000,000.00	48,38	Rp 141,000,000.00		DPPA
						INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	Persen (%)	90,10		90,15		90,20		90,25		90,30			
						PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN GENDER (IPG)	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Persen (%)	47,70	Rp 144,000,000.00	47,90	Rp 148,000,000.00	48	Rp 302,000,000.00	48,18	Rp 137,000,000.00	48,38	Rp 141,000,000.00	DPPA
						INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	Persen (%)	90,10		90,15		90,20		90,25		90,30			
		1.4	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Anak/Perempuan Korban Kekerasan/KDRT Termasuk TPPO	Persentase Anak Korban Kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT	Persen (%)	0,041%	Rp 905,000,000.00	0,037%	Rp 938,000,000.00	0,034%	Rp 944,000,000.00	0,030%	Rp 958,000,000.00	0,026%	Rp 975,000,000.00		DPPA
		1.5	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	Persen (%)	60%	Rp 34,700,000.00	62%	Rp 75,500,000.00	65%	Rp 211,500,000.00	68%	Rp 189,500,000.00	70%	Rp 397,500,000.00		as Ketenagakerj
		1.6	Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Prestasi Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	JUMLAH ATLET BERPRESTASI	orang	55	Rp 3,285,000,000.00	60	Rp 18,613,500,000.00	65	Rp 18,974,850,000.00	70	Rp 14,372,335,000.00	75	Rp 4,899,411,000.00		Disporapar
		1.7	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran			Persen (%)	75,38		75,18		74,86		74,42		73,86			

NO	MSI		TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	Target Capaian Sasaran								OPD penanggung Jawab		
								2022		2023		2024		2025			2026	
2	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berhsh, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi	2	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik	Opini Atas Audit BPK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keberlhan Ketertarikan dan Keindahan) Yang Tertangani	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMMAN DAN KETERBITAN UMUM	PERSENTASE LAYANAN GANGGUAN KETERTAMMAN DAN KETERBITAN UMUM	Persen (%)	100%	Rp 2,544,470,000.00	100%	Rp 2,832,950,000.00	100%	Rp 3,225,990,000.00	100%	Rp 3,350,040,000.00	100%	Rp 3,325,290,000.00	Satpol PP
		2.1	Menciptakan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat	Penurunan Kasus Narkoba	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	JUMLAH PEMBINAAN, PENCEGAHAN, DAN PENTILANGUNGAN NARKOBA DAN ANTISIPASI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA	KEGIATAN	14	Rp 100,000,000.00	14	Rp 110,000,000.00	14	Rp 121,000,000.00	14	Rp 133,100,000.00	14	Rp 146,410,000.00	Keshangpol
		2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) Opini Atas Audit BPK indeks Reformasi Birokrasi PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi Opini BPK atas Audit BPK TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERSENTASE TINDAKLANJUT TERHADAP TEMUAN BPK Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi Opini BPK atas Audit BPK TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persen (%) Persen (%) WTP Persen (%)	80% 70% 100% 100%	Rp 25,239,800,000.00 Rp 2,260,000,000.00 Rp 268,481,600.00 Rp 162,901,689,928.76	90% 75% 100% 100%	Rp 26,929,300,000.00 Rp 3,535,000,000.00 Rp 281,296,048.00 Rp 173,397,886,855.40	92% 80% 100% 100%	Rp 29,013,000,000.00 Rp 3,535,000,000.00 Rp 295,796,393.00 Rp 185,030,477,245.08	94% 85% 100% WTP	Rp 31,558,300,000.00 Rp 3,535,000,000.00 Rp 301,586,213.00 Rp 198,536,055,177.77	95% 90% 100% WTP	Rp 34,671,800,000.00 Rp 3,535,000,000.00 Rp 326,115,523.00 Rp 214,434,035,110.89	Setdakab INSPEKTORAT/ ORTA Setdakab BPKAD
		2.3	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	KEPEGAWAJAN DAERAH	INDEKS PROFESIONAL ASN	Indeks	71	Rp 2,050,234,700.00	72	Rp 2,246,225,910.00	73	Rp 2,467,396,241.00	74	Rp 2,709,993,605.00	75	Rp 2,977,465,706.00	BKD
		2.4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dan Informasi Publik	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH IZIN YANG TERBIT	izin	400 izin	Rp 280,000,000.00	450 izin	Rp 303,000,000.00	500 izin	Rp 316,800,000.00	550 izin	Rp 331,480,000.00	600 izin	Rp 367,128,000.00	ORTA/OPD PELAYANAN PUBLIK
		2.5	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Hasd Kebutuhan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBIANGAN DAERAH	Dimplementasikannya Rencana kembangkan dan Terfasilitasinya OPD	Persen (%)	50% dan 100%	Rp 400,000,000.00	60% dan 100%	Rp 685,000,000	70% dan 100%	Rp 556,000,000	80% dan 100%	Rp 440,000,000	90% dan 100%	Rp 938,000,000	BALITBANG
		2.6	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLM Mendukung IKLM Usaha Jumlah BUMD yang terbentuk	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLM Mendukung IKLM Usaha PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTISE PAJAK TERHADAP PAD JUMLAH IZIN YANG TERBIT JUMLAH MEDIA PENGELOLAAN DATA DAN INFROMASI PELAYANAN PERIZINAN YANG TERSEDIA JUMLAH PERATURAN YANG MENDUKUNG IKLM USAHA	Persen (%) izin MEDIA PERATURAN	75% 400 izin 5 Media 1 Peraturan	Rp 3,027,000,000.00 Rp 280,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 200,000,000.00 Rp 1,802,464,840.00	78% 450 izin 5 Media 1 Peraturan	Rp 3,481,000,000.00 Rp 303,000,000.00 Rp 80,000,000.00 Rp 300,000,000.00 Rp 1,982,711,324.00	80% 500 izin 5 Media 2 Peraturan	Rp 4,003,000,000.00 Rp 316,800,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp 200,000,000.00 Rp 2,180,982,456.00	82% 550 izin 5 Media 1 Peraturan	Rp 4,604,000,000.00 Rp 331,480,000.00 Rp 120,000,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp 2,399,080,702.00	85% 600 izin 5 Media 1 Peraturan	Rp 5,644,500,000.00 Rp 367,128,000.00 Rp 125,000,000.00 Rp 420,000,000.00 Rp 2,638,988,772.00	BAFFENDA/OP D RETRIHUSI DPMPPTSP DPMPPTSP DPMPPTSP Bagian Perencanaan
3	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahan	3	Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kelayahyan	Persentase Desa/Kehurahan Cepat Berkembang														
		3.1	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur	Persentase Jalan Kondisi Mantap Persentase Jembatan Kondisi Baik Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Ketersediaan Bangunan Sarana Umum Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan Persentase Layanan Angkutan Darat Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedianya fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan Persentase Penduduk Berakses Air Minum	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Program Pengelolaan Sumber Daya Air PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Layanan Angkutan Darat Jumlah Perlengkapan Jalan Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang Jalan yang terbangun Jumlah Jembatan yang terbangun Bertambahnya Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Persentase Bangunan Gedung yang tertata Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Persentase Layanan Angkutan Darat Persentase tersedianya layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum	KM Unit Persen (%) Persen (%) Unit % Paket Persen (%) Persen (%)	50 km 5 Unit 50% 20% 2,000 45 8 100% 20%	Rp 247,000,000,000.00 Rp 50,000,000,000.00 Rp 37,000,000,000.00 Rp 20,950,000,000.00 Rp 885,000,000 Rp 200,000,000 Rp 160,000,000.00 Rp 2,275,000,000.00	50 km 5 Unit 55% 20% 2,500 46 100% 20%	Rp 284,050,000,000.00 Rp 57,500,000,000.00 Rp 42,550,000,000.00 Rp 15,632,000,000.00 Rp 1,700,000,000 Rp 550,000,000 Rp 900,000,000 Rp 200,000,000.00 Rp 2,275,000,000.00	50 km 5 Unit 60% 20% 3,000 47 9 100% 20%	Rp 326,657,500,000.00 Rp 66,125,000,000.00 Rp 48,932,500,000.00 Rp 15,632,000,000.00 Rp 1,350,000,000 Rp 5,500,000,000 Rp 1,100,000,000 Rp 397,000,000.00 Rp 2,275,000,000.00	50 km 5 Unit 65% 20% 3,200 48 9.00 100% 20%	Rp 375,656,130,000.00 Rp 76,043,000,000.00 Rp 56,272,300,000.00 Rp 15,632,000,000.00 Rp 1,500,000,000 Rp 800,000,000 Rp 1,100,000,000 Rp 370,000,000.00 Rp 2,275,000,000.00	50 km 5 Unit 70% 20% 3,500 49 11 100% 20%	Rp 432,004,540,000.00 Rp 87,450,300,000.00 Rp 64,713,200,000.00 Rp 15,632,000,000.00 Rp 1,700,000,000 Rp 850,000,000 Rp 1,200,000,000 Rp 460,000,000.00 Rp 2,275,000,000.00	DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DISHUB DISHUB DISHUB DISHUB DPUPR

NO	MISI	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	Target Capaian Sasaran												OPD penanggung Jawab					
							2022			2023			2024			2025				2026				
		3.2	Tersedianya Rumah Tinggal Bersantasi	Persentase Rumah Tinggal Bersantasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Bersantasi	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persen (%)	2%	Rp	300,000,000.00	3%	Rp	230,000,000.00	5%	Rp	230,000,000.00	5%	Rp	30,000,000.00	5%	Rp	30,000,000.00	DPUPR	
		3.3	Tersedianya Perumahan Dan Permukiman Yang Tertata	Rasio Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten atau Relokasi Program	Persen (%)	10%	Rp	1,600,000,000.00	10%	Rp	1,840,000,000.00	10%	Rp	1,835,000,000.00	10%	Rp	1,845,000,000.00	10%	Rp	1,225,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Rasio Permukiman Layak Huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang tertata	Persen (%)	1%	Rp	14,131,300,000.00	1.5%	Rp	19,155,000,000.00	2%	Rp	22,155,000,000.00	5%	Rp	26,155,000,000.00	10%	Rp	30,155,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen (%)	5%	Rp	22,010,000,000.00	5%	Rp	25,512,000,000.00	5%	Rp	27,012,000,000.00	5%	Rp	31,312,400,000.00	5%	Rp	33,012,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		3.4	Meningkatkan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Tata Ruang	Persen (%)	35%	Rp	5,900,000,000.00	40%	Rp	6,785,000,000.00	45%	Rp	7,802,750,000.00	50%	Rp	8,973,160,000.00	55%	Rp	10,319,140,000.00	DPUPR	
		3.5	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Kabupaten	Persentase Pengelolaan Persampahan Yang Tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan Yang	Persen (%)	78%	Rp	4,520,000,000.00	79%	Rp	4,455,000,000.00	79%	Rp	4,540,000,000.00	80%	Rp	4,795,000,000.00	82%	Rp	5,455,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan				Persen (%)																		
		3.6	Meningkatnya Ketersediaan tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persen (%)	1%	Rp	1,900,000,000.00	1%	Rp	3,788,000,000.00	1%	Rp	2,194,000,000.00	1%	Rp	1,500,000,000.00	1%	Rp	1,500,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Penyelesaian Kasus Tanah Negara	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persen (%)	5%	Rp	400,000,000.00	5%	Rp	400,000,000.00	5%	Rp	400,000,000.00	5%	Rp	400,000,000.00	5%	Rp	400,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Penyelesaian Izin Lokasi	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	Persen (%)	2%	Rp	30,000,000.00	2%	Rp	30,000,000.00	2%	Rp	30,000,000.00	2%	Rp	30,000,000.00	2%	Rp	30,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		3.7	Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan	Persentase pelayanan penanggulangan bencana alam dan non alam	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana alam dan non alam	Persen (%)	100%	Rp	726,100,000.00	100%	Rp	690,100,000.00	100%	Rp	785,100,000.00	100%	Rp	849,540,000.00	100%	Rp	923,820,000.00	BPBD	
3.8	Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman	Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persen (%)	100%	Rp	5,412,000,000.00	100%	Rp	5,775,800,000.00	100%	Rp	5,820,650,000.00	100%	Rp	6,482,500,000.00	100%	Rp	7,056,280,000.00	DAMKAR			
4	Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan	4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB																				
		4.1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Gini Ratio																				
				Jumlah Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PRODUKTIVITAS PADI ATAU BAHAN PANGAN UTAMA LOKAL LAINNYA	Ton/Ha	5,58 ton/ha	Rp	1,673,610,000.00	6 ton/ha	Rp	1,736,960,000.00	6,02 ton/ha	Rp	1,754,000,000.00	6,03 ton/ha	Rp	1,844,000,000.00	6,05 ton/ha	Rp	1,889,000,000.00	PERTANIAN	
				Penguatan Cadangan Pangan	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Cadangan pangan	40 ton	100 ton	Rp	840,000,000.00	100 ton	Rp	840,000,000.00	100 ton	Rp	840,000,000.00	100 ton	Rp	840,000,000.00	100 ton	Rp	840,000,000.00	HANPANG	
		4.2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Kg	14.008.039 kg	Rp	535,000,000.00	14.708.341 kg	Rp	490,000,000.00	15.443.658 kg	Rp	762,000,000.00	16.215.741 kg	Rp	737,000,000.00	17.026.428 kg	Rp	917,000,000.00	PERTANIAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Kg	654.782 kg	Rp	537,000,000.00	674.365 kg	Rp	731,000,000.00	694.537 kg	Rp	857,000,000.00	715.313 kg	Rp	772,000,000.00	736.713 kg	Rp	992,000,000.00	PERTANIAN	
				Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Promosi Produk Unggulan di dalam dan luar daerah	kali	4 Kali	Rp	62,000,000.00	4 Kali	Rp	327,760,000.00	4 Kali	Rp	327,760,000.00	4 Kali	Rp	427,760,000.00	4 Kali	Rp	457,760,000.00	PERDAGANGAN	
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah promosi pemasaran produk yang dilaksanakan di dalam negeri	kali	3 Kali	Rp	63,630,000.00	3 Kali	Rp	63,630,000.00	3 Kali	Rp	63,630,000.00	3 Kali	Rp	191,140,000.00	3 Kali	Rp	198,750,000.00	PERDAGANGAN	
				Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	CAKUPAN RIBA KELOMPOK PENGRAJIN	KUB	4	Rp	120,000,000.00	5	Rp	150,000,000.00	6	Rp	180,000,000.00	7	Rp	210,000,000.00	8	Rp	240,000,000.00	PERINDUSTRIAN	
				Nilai Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN NILAI INVESTASI	Persen (%)	25%	Rp	260,000,000.00	28%	Rp	265,000,000.00	30%	Rp	310,000,000.00	32%	Rp	320,000,000.00	35%	Rp	350,000,000.00	DPMPPTSP	
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA)	INVESTOR	2	Rp	135,000,000.00	2	Rp	240,000,000.00	2	Rp	250,000,000.00	2	Rp	250,000,000.00	2	Rp	250,000,000.00	DPMPPTSP	
4.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	POIN	59,6	Rp	198,000,000.00	61,3	Rp	342,704,513.30	62,1	Rp	490,000,000.00	62,7	Rp	600,000,000.00	64,6	Rp	570,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup			
4.4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Diimplementasikannya Rencana kelibangan dan Terfasilitasinya OPD Berinovasi	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persen (%)	50% dan 100%	Rp	400,000,000.00	60% dan 100%	Rp	685,000,000.00	70% dan 100%	Rp	556,000,000.00	80% dan 100%	Rp	440,000,000.00	90% dan 100%	Rp	938,000,000.00	BALITBANG			
5	Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia																				
		5.1	Meningkatnya Nilai – Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan Masyarakat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESJAHTERAAN RAKYAT					Rp	19,100,354,940.00		Rp	21,010,390,434.00		Rp	23,111,429,477.00		Rp	25,422,572,425.00		Rp	27,964,829,668.00	
				Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESERIAN TRADISIONAL	JUMLAH KESERIAN TRADISIONAL YANG DI LAKSANAKAN	EVENT/KEGIATAN	12 Kegiatan	Rp	378,000,000.00	13 Kegiatan	Rp	415,800,000.00	14 Kegiatan	Rp	457,300,000.00	15 Kegiatan	Rp	503,100,000.00	16 Kegiatan	Rp	553,400,000.00	Dinas Pendidikan	
		5.2	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Pelestarian Cagar Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PENDAPATAN OBJEK BUDIDYA CAGAR BUDAYA DAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA	bulan	12 bulan	Rp	50,000,000.00	12 bulan	Rp	55,000,000.00	12 bulan	Rp	66,500,000.00	12 bulan	Rp	66,500,000.00	12 bulan	Rp	72,300,000.00	Dinas Pendidikan	

NO	MISI	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDUKAYOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	Target Capaian Sasaran										OPD penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		
		5.3 Menjaga Stabilitas Politik di Daerah	Persentase Hak Pemilih Suara	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SEKTA	Jumlah pembinaan Terhadap Partai politik	PARPOL	19 Parpol	Rp 822,400,000.00	19 Parpol	Rp 904,700,000.00	19 Parpol	Rp 1,054,700,000.00	19 Parpol	Rp 1,154,200,000.00	19 Parpol	Rp 1,263,700,000.00	Keshangpol
			Jumlah Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Yang Ditangani	Persen (%)	100%	Rp 100,000,000.00	100%	Rp 110,000,000.00	100%	Rp 121,000,000.00	100%	Rp 133,100,000.00	100%	Rp 146,400,000.00	Keshangpol

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam periode 2021-2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

(Dalam Jutaan)

Aspek/ Focus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		Tahun 0	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)			
		Realisasi	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
Pembangunan														
Sasaran : 1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan														
Strategi : 1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP	84,2%	65.50%	130.312,78	68%	143.344,05	71%	157.510,46	74%	173.181,51	76%	190.499,64	76%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan SD dan SMP	100%	100%	380,00	100%	418,00	100%	459,00	100%	505,78	100%	556,34	100%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Izin Sekolah Yang dikeluarkan	15 Izin Sekolah	15 Izin Sekolah	450,00	20 Izin Sekolah	495,00	25 Izin Sekolah	544,50	30 Izin Sekolah	598,95	35 Izin Sekolah	658,85	135 Izin sekolah	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap murid pendidikan dasar dan menengah	601.2 guru/10.000 murid	601.2 guru/10.000 murid	88,00	630.8 guru/10.000	96,80	639.1 guru/10.000	106,48	633.9 guru/10.000	117,13	627.5 guru/10.000	128,84	627.5 guru/10.000	Dinas Pendidikan
Sasaran : 1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan														
Strategi : 1.1.2. Meningkatkan Pemenuhan SPM														
Strategi : 1.1.3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP	84,2%	65.50%	130.312,78	68%	143.344,05	71%	157.510,46	74%	173.181,51	76%	190.499,64	76%	Dinas Pendidikan

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan SD dan SMP	100%	100%	380,00	100%	418,00	100%	459,00	100%	505,78	100%	556,34	100%	Dinas Pendidikan
Sasaran : 1.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat														
Strategi : 1.2.1. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/ kelurahan yang difasilitasi untuk melakukan gerakan masyarakat at hidup sehat	15 desa/ kelurahan	15 desa/ kelurahan	450	15 desa/ kelurahan	494,4	15 desa/ kelurahan	520,2	15 desa/ kelurahan	579,4	15 desa/ kelurahan	658,7	75 desa/ kelurahan	Dinas Kesehatan
Strategi : 1.2.2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM (Standart Pelayanan Minimal) Rumah Sakit Yang Terpenuhi	100%	100%	39.511,8	100%	41.961,4	100%	43.547,9	100%	47.551,5	100%	50.165,5	100%	RSUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) bidang kesehatan	100%	100%	66.592,4	100%	70.654,6	100%	74.686,3	100%	79.242,1	100%	84.075,9	100%	Dinas Kesehatan

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Apotik dan jaringannya yang memiliki izin	50 izin apotik dan jaringannya	80 izin apotik dan jaringannya	791,00	85 izin apotik dan jaringannya	839,2	90 izin apotik dan jaringannya	890,4	95 izin apotik dan jaringannya	647	100 izin apotik dan jaringannya	667,2	100 izin apotik dan jaringannya	Dinas Kesehatan
Strategi : 1.2.3. Peningkatan Anggota Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 Kecamatan	8 Kecamatan	1.135,7	8 Kecamatan	1.233,7	8 Kecamatan	1.346,7	8 Kecamatan	1.379,7	8 Kecamatan	1.708,7	8 Kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Strategi : 1.2.4. Meningkatkan Kesertaan Peserta KB														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	88%	89%	2.925,44	90%	3.024,44	91%	3.120,44	92%	3.205,44	93%	3.830,44	93%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sasaran : 1.3. Peningkatan dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dan Peningkatan Implementasi Kabupaten Layak Anak														
Strategi : 1.3.1. Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47,5	47,7	96	47,9	131	48	304	48,18	315	48,38	366	48,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Updating Data Terpilah gender dan Anak (SIGA)	50%	50%	0	65%	20	70%	40	75%	50	80%	80	80%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Terfasilitasi	1 Unit	2 Unit	255,6	2 Unit	271	3 Unit	311	3 Unit	425	3 Unit	530	3 Unit	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Strategi : 1.3.2. Meningkatkan Capaian Kabupaten Layak Anak														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa Layak Anak	57	68	212	78	215	87	215	94	285	100	295	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran : 1.4. Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Anak/Perempuan Korban Kekerasan/ KDRT Termasuk TPPO														
Strategi : 1.4.1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pencegahan dan Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan KDRT dan Anak Termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan)														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	0,045%	0,041%	905	0,037%	938	0,034%	944	0,030%	958	0,026%	975	0,026%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	0,019	0,017	211	0,015	236	0,013	236	0,011	243	0,0083	248	0,0083	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran : 1.5. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat														
Strategi : 1.5.1. Meningkatkan Penanganan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penguatan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														

PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL	Realisasi pengemba ngan kemampu an dan pemberda yaan SDM Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial (PSKS)	50%	55%	284,95	60%	284,95	65%	301,55	70%	304,80	75%	324,80	75%	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANA N WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pelayanan Kesejahter aan Sosial Kepada Warga Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	8	100%	8	100%	10,00	100%	15	100%	15	100%	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITAS I SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat kan pelayanan Rehabilita si kesejahter aan sosial dan yang memperol eh bantuan sosial	12%	15%	385,15	18%	466,35	22%	567,85	30%	744,35	35%	840,69	35%	Dinas Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	70%	70%	538,70	72%	654,64	75%	681,57	75%	708,90	80%	750,93	80%	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan dasar	15%	20%	554,70	20%	564,70	30%	646,20	40%	738,51	50%	831,70	50%	Dinas Sosial
Strategi : 1.5.2. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Strategi : 1.5.3. Meningkatkan Kualitas, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	50%	50%	134,6	55%	165,7	60%	203,5	65%	202,9	70%	257	70%	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0%	60%	34,7	62%	75,5	65%	211,5	68%	189,5	70%	397,5	70%	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	50%	50%	35,4	53%	38,4	55%	41,4	57%	45,4	60%	49,4	60%	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	0	1 Dokumen	29,5	1 Dokumen	32,5	1 Dokumen	35,5	1 Dokumen	38,5	1 Dokumen	41,5	5 Dokumen	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Strategi : 1.5.4. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terciptanya Penataan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik	82 Desa	82 Desa	1.331,93	82 Desa	1.354,93	82 Desa	1.362,58	82 Desa	1.498,84	82 Desa	1.545,55	82 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Strategi : 1.5.5. Peningkatan Kelembagaan Desa Menuju Desa Berkembang														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	terciptanya peningkatan perekonomian desa	82 Desa	82 Desa	25	82 Desa	31,5	82 Desa	34,7	82 Desa	38,1	82 Desa	41,9	82 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

[illegible]

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	2.544,47	100%	2.832,95	100%	3.225,99	100%	3.350,04	100%	3.325,29	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
Sasaran : 2.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah														
Strategi : 2.2.1. Optimalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)														
INSPEKTORAT DAERAH														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	70%	70%	1.335	75%	2.005	80%	2.345	85%	2.725	90%	2.925	80%	Inspektorat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH														

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksan anya kegiatan penunjang urusan Pemerinta han Daerah	100%	80%	25.239,8	90%	26.929,3	92%	29.013	94%	31.558,3	95%	34.671,8	95%	Sekretariat Daerah
Strategi : 2.2.2. Meningkatkan Integrasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dengan Penganggaran														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN														
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN AN DAERAH	Terlaksan anya penjabaran konsistensi dokumen perencanaan	70%	75%	1,059.60	75%	1,059.60	80%	1,059.60	85%	1,059.60	90%	1,073.56	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN AN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan di perbupkakan	2 dokumen	2 dokumen	1,468.86	2 dokumen	1,489.35	3 dokumen	1,957.35	2 dokumen	1,989.35	3 dokumen	2,024.35	4 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Strategi : 2.2.3. Optimalisasi Implementasi SAKIP														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksan anya kegiatan penunjang urusan Pemerintah an Daerah	100%	80%	25.239,8	90%	26.929,3	92%	29.013	94%	31.558,3	95%	34.671,8	95%	Sekretariat Daerah
Strategi : 2.2.4. Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN														
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas Audit BPK	WTP	WTP	162.901,69	WTP	173.397,89	WTP	185.030,48	WTP	198.536,06	WTP	214.434,04	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Strategi : 2.2.5. Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah Dan Pengelola Barang Milik Daerah Serta Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN														
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%	100%	763,13	100%	839,23	100%	923,34	100%	1.007,25	100%	1.094,78	100%	Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah
Strategi : 2.2.6. Peningkatan Pemahaman dan Penerapan SPIP oleh OPD														
INSPEKTORAT DAERAH														
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	70%	70%	634,4	70%	654	75%	650	80%	860	80%	940	75%	Inspektorat
Strategi : 2.2.7. Meningkatkan Pembangunan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Tata Kelola Pemerintah														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Program Pengelola an Aplikasi Informatika	40 OPD	40 OPD	1.000	40 OPD	1.150	40 OPD	1.322,5	40 OPD	1.520,8	40 OPD	1.749	40 OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Strategi : 2.2.8. Penguatan Produk Hukum dan Peningkatan Kapasitas Legislatif														
SEKRETARIAT DPRD														

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, pembantuan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran	ada	ada	13.438	ada	12.522	ada	13.399,1	ada	14.704,6	ada	16.400	ada	Sekretariat DPRD
Strategi : 2.2.9. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah														
NON URUSAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.019,66	100%	3.284,63	100%	3.456,75	100%	3.704,63	100%	3.996,27	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	3.015,9	12 bulan	4.017,5	12 bulan	4.564,9	12 bulan	4.017,5	12 bulan	4.564,9	60 Bulan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Persentase Terlaksan anya Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n	100%	100%	282.831	100%	302.831	100%	306.765	100%	311.347	100%	326.554	100%	Dinas Pendidikan
	Persentase Terlaksan anya Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n	50%	60%	13.422,5	65%	7.428,5	70%	6.993	80%	7.691,2	89%	8.247,2	89%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima n
	Terlaksan anya Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	12 bulan	12 bulan	3.387,47	12 bulan	3.547,5	12 bulan	3.850,02	12 bulan	4.084,48	12 bulan	4.512,39	60 Bulan	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa
	Persentase Kesejahter aan, Kompeten si, Kedisiplin an Serta Sarana dan Prasarana Semakin Meningka t	85%	85%	10.735,83	90%	10.822,88	90%	11.392,91	95%	11.862,27	95%	12.823,43	91%	Inspektorat

	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	2.560	12 bulan	2.811	12 bulan	3.060	12 bulan	3.341	12 bulan	3.649	60 Bulan	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten	100%	100%	3.208,23	100%	3.371,37	100%	3.941,24	100%	3.998,14	100%	4.266,47	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12 bulan	12 bulan	25.096,00	12 bulan	27.112,40	12 bulan	31.179,26	12 bulan	32.206,05	12 bulan	32.206,05	60 Bulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tersedianya fasilitas penunjang urusan pemerintahan bagi ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kab. Labuhanbatu Utara	12 bulan	12 bulan	27.457,1	12 bulan	30.605,1	12 bulan	34.144,2	12 bulan	35.860,1	12 bulan	32.683,7	60 Bulan	Sekretariat DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksan anya penunjang urusan Pemerinta h daerah	12 bulan	12 bulan	4.256,58	12 bulan	4.298,51	12 bulan	4.301,51	12 bulan	4.301,51	12 bulan	4.301,51	60 Bulan	Dinas Perdaganga n dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Terlaksan anya penunjang urusan Pemerinta han daerah	12 Bulan	12 Bulan	5.705,5	12 Bulan	6.561,7	12 Bulan	7.546	12 Bulan	8.677,9	12 Bulan	9.979,5	60 Bulan	Dinas Komunikas i dan Informatika
	Presentase ketersedia an sarana dan prasarana dengan kondisi yang baik yang menduku ng Kinerja perangkat daerah	70%	75%	8,543.31	75%	8,596.31	75%	8,782.30	75%	8,811.31	75%	8,760.94	75%	Dinas Pertanian
	Presentase Penyusun an Perencana an Dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Sesuai dengan Prosedur /Tepat Waktu	100%	100%	3.394,06	100%	3.801,19	100%	3.617,96	100%	3.809,37	100%	4.094,38	100%	Badan Kepegawai an Daerah

	Terlaksana a tata kelola permerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan Publik	100%	100%	4,141.07	100%	4528.2697	100%	4,535.88	100%	5,059.99	100%	5,662.57	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Terlaksana Program Administrasi Perkantoran	100%	100%	12.468,23	100%	12.662,54	100%	13.506,14	100%	14.602,67	100%	15.823,44	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	18.675,6	100%	19.748,2	100%	22.279	100%	23.147,9	100%	26.242,6	100%	RSUD
	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	55.472,2	100%	58.856,3	100%	63.543,2	100%	69.431,7	100%	76.574,4	100%	Dinas Kesehatan
	Terlaksana a tata kelola permerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan Publik	70%	70%	2.233,45	75%	2.163,51	78%	2.399,94	80%	2.718,62	85%	2.672,51	85%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Yang Terlaksanakan anya	100%	100%	2.993,4	100%	3.325,5	100%	3.224,6	100%	3.422,5	100%	3.537,5	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase Terlaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	92%	94%	2.894,5	94%	3.042,8	95%	3.129,9	95%	3.285,4	95,4%	3.514,2	95,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Terlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.755,21	100%	3.851,82	100%	3.908,01	100%	4.309,23	100%	4.949,39	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Terlaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	80%	25.239,8	90%	26.929,3	92%	29.013	94%	31.558,3	95%	34.671,8	95%	Sekretariat Daerah
	Persentase penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	2.669,4	100%	2.779,1	100%	2.748,5	100%	2.728,3	100%	2.690,4	100%	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70%	75%	3.019,7	78%	3.186	80%	3.217	82%	3.483	84%	3.311	84%	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	100%	100%	3.977,38	100%	4.775,86	100%	4.602,70	100%	5.122,82	100%	5.525,11	100%	Dinas Perhubungan
	Persentase Penyusunan, perencanaan dan pelaporan Kinerja dan Keuangan Sesuai dengan Prosedur/ Tepat Waktu	100%	100%	3.113,58	100%	3.205,07	100%	3.324,90	100%	3.427,82	100%	3.653,48	100%	Dinas Sosial
	persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	5.326,4	100%	6.174,3	100%	7.088,3	100%	6.611	100%	6.859,1	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	8.079	12 Bulan	9.393	12 Bulan	10.352	12 Bulan	11.776	12 Bulan	13.853	60 Bulan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.759,6	100%	2.834,2	100%	2.861,1	100%	3.090	100%	3.086	100%	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
	Persentase Penunjang Urusan Daerah	99%	100%	3.633	100%	3.883,7	100%	4.196,45	100%	4.595,51	100%	4.388,88	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Tingkat Efektifitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah	N/A	50%	4.053	60%	4.053	70%	4.053	80%	4.053	90%	4.053	90%	Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	66%	2.065,17	72%	2.192,58	78%	2.340,72	84%	2.513,95	90%	2.718,67	90%	Kecamatan Aek Kuo
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	66%	2.717,5	72%	2.885,1	78%	3.089,3	84%	3.336,3	90%	3.638,1	90%	Kecamatan Aek Natas
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	66%	2.772,98	72%	3.080,28	78%	3.277,46	84%	3.490,55	90%	3.748,27	90%	Kecamatan Kualuh Hilir

	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	60%	2.730,81	62%	2.894,66	65%	3.068,36	67%	3.252,44	70%	3.447,58	70%	Kecamatan Kualuh Hulu
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61%	62%	1.912,90	65%	2.076,51	68%	2.209,44	70%	2.409,52	72%	2.505,87	72%	Kecamatan Kualuh Leidong
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	66%	2.558,0	72%	2.723,3	78%	2.912,4	84%	3.079,9	90%	3.231,2	90%	Kecamatan Kualuh Selatan
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66%	72%	3.433,25	78%	3.644,26	84%	3.896,89	90%	4.160,71	90%	4.520,31	90%	Kecamatan Marbau
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	66%	3.389,0	72%	3.597,2	78%	3.846,0	84%	4.039,6	90%	4.388,8	90%	Kecamatan Na IX-X
Strategi : 2.2.10. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Penataan Kearsipan Pemerintah Daerah														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	40 Orang	50 Orang	100	50 Orang	125	50 Orang	130	50 Orang	175	50 Orang	250	50 Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pemberitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Yang NSPK	3 Izin	2 Izin	50	2 Izin	35	2 Izin	50	2 Izin	50	2 Izin	50	10 Izin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya Yang DiPreservasi	0 Arsip	20 Arsip	20	20 Arsip	20	20 Arsip	20	20 Arsip	20	20 Arsip	20	100 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran : 2.3. Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Strategi : 2.3.1. Meningkatkan Kualitas Penataan ASN Sesuai Dengan Kualifikasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN														
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Terpenuhi nya Pengelolaan Kepegawaian Daerah	100%	100%	1.384,22	100%	1.395,16	100%	1.805,13	100%	2.006,14	100%	2.119,11	100%	Badan Kepegawaian Daerah
Strategi : 2.3.2. Meningkatkan Kompetensi ASN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN														

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pengembangan Kompetensi ASN	661 Orang	320 orang	1.238,53	320 orang	1.188,67	320 orang	1.391	320 orang	1.500,31	320 orang	1.690,15	1.600 orang	Badan Kepegawaian Daerah
Sasaran : 2.4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik														
Strategi : 2.4.1. Peningkatan Mutu SDM Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pelayanan Publik														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang sesuai standart pelayanan kesehatan	400 Orang	150 Orang	144	175 Orang	151,2	200 Orang	158,9	225 Orang	192,1	250 Orang	175,8	1.000 Orang	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah sumber daya manusia (SDMK) yang sesuai standart pelayanan kesehatan	60 orang	70 Orang	250	80 orang	300	80 Orang	350	90 Orang	350	90 Orang	350	410 orang	RSUD
Strategi : 2.4.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah izin yang diterbitkan	600 Izin	400 izin	280	450 izin	303	500 izin	316,88	550 izin	331,49	600 izin	367,13	2.500 Izin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
URUSAN KECAMATAN														

PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedian ya Dokumen Musrenba ng Kecamata n	1 dokumen	1 dokumen	11,45	1 dokumen	12,08	1 dokumen	12,66	1 dokumen	13,35	1 dokumen	14,09	1 dokumen	Kecamatan Aek Kuo
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedian ya Dokumen Musrenba ng Kecamata n	1 dokumen	1 dokumen	182,28	1 dokumen	193,22	1 dokumen	204,81	1 dokumen	217,1	1 dokumen	230,12	1 dokumen	Kecamatan Aek Natas
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedian ya Dokumen Musrenba ng Kecamata n	1 dokumen	1 dokumen	210	1 dokumen	231	1 dokumen	231	1 dokumen	254	1 dokumen	280	1 dokumen	Kecamatan Kualuh Hilir
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedian ya Dokumen Musrenba ng Kecamata n	1 dokumen	1 dokumen	871	1 dokumen	923	1 dokumen	979	1 dokumen	1.370	1 dokumen	1.100	1 dokumen	Kecamatan Kualuh Hulu
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedian ya Dokumen Musrenba ng Kecamata n	1 dokumen	1 dokumen	230	1 dokumen	256	1 dokumen	265	1 dokumen	300	1 dokumen	285	1 dokumen	Kecamatan Kualuh Leidong
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedian ya Dokumen Musrenba ng Kecamata n	1 dokumen	1 dokumen	325,88	1 dokumen	345,43	1 dokumen	366,15	1 dokumen	400	1 dokumen	400	1 dokumen	Kecamatan Kualuh Selatan

PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedian ya Dokumen Musrenba ng Kecamata n	1 dokumen	1 dokumen	8	1 dokumen	8,14	1 dokumen	9	1 dokumen	9,14	1 dokumen	10	1 dokumen	Kecamatan Marbau
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedian ya Dokumen Musrenba ng Kecamata n	1 dokumen	1 dokumen	120,32	1 dokumen	127,54	1 dokumen	135,19	1 dokumen	143,30	1 dokumen	151,90	1 dokumen	Kecamatan Na IX-X
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Terseleng garanya kegiatan pemberda yaan masyarak at di Kelurahan	N/A	N/A	0	N/A	0	1 kegiatan	1	1 kegiatan	2	1 kegiatan	2	1 kegiatan	Kecamatan Aek Kuo
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Terseleng garanya kegiatan pemberda yaan masyarak at di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	798,29	2 kegiatan	846,18	2 kegiatan	896,96	2 kegiatan	950,77	2 kegiatan	1007,8	10 kegiatan	Kecamatan Aek Natas
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Terseleng garanya kegiatan pemberda yaan masyarak at di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	728,04	2 kegiatan	619	2 kegiatan	678,89	2 kegiatan	744,78	2 kegiatan	817,26	10 kegiatan	Kecamatan Kualuh Hilir

PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Terseleng garanya kegiatan pemberda yaan masyarak at di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.574,2	2 kegiatan	1.674,75	2 kegiatan	1.816,5	2 kegiatan	2.009	2 kegiatan	2.262,7	10 kegiatan	Kecamatan Kualuh Hulu
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Terseleng garanya kegiatan pemberda yaan masyarak at di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	775,91	2 kegiatan	781,91	2 kegiatan	783,91	2 kegiatan	898,91	2 kegiatan	988,91	10 kegiatan	Kecamatan Kualuh Leidong
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Terseleng garanya kegiatan pemberda yaan masyarak at di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	751,74	2 kegiatan	789,33	2 kegiatan	828,79	2 kegiatan	879,98	2 kegiatan	923,98	10 kegiatan	Kecamatan Kualuh Selatan
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Terseleng garanya kegiatan pemberda yaan masyarak at di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	628,69	2 kegiatan	666,41	2 kegiatan	706,39	2 kegiatan	748,78	2 kegiatan	793,70	10 kegiatan	Kecamatan Marbau
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Terseleng garanya kegiatan pemberda yaan masyarak at di Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	739,1	2 kegiatan	783,45	2 kegiatan	830,45	2 kegiatan	880,28	2 kegiatan	933,10	10 kegiatan	Kecamatan Na IX-X

PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terseleng garanya urusan pemerinta han umum di kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	76,58	5 Kegiatan	80,16	5 Kegiatan	83,99	5 Kegiatan	88,61	5 Kegiatan	93,50	5 Kegiatan	Kecamatan Aek Kuo
PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terseleng garanya urusan pemerinta han umum di kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	364,46	5 Kegiatan	386,32	5 Kegiatan	409,5	5 Kegiatan	434,07	5 Kegiatan	460,12	5 Kegiatan	Kecamatan Aek Natas
PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terseleng garanya urusan pemerinta han umum di kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	195,30	5 Kegiatan	214,82	5 Kegiatan	236,31	5 Kegiatan	259,94	5 Kegiatan	285,93	5 Kegiatan	Kecamatan Kualuh Hilir
PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terseleng garanya urusan pemerinta han umum di kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	218	4 Kegiatan	231	4 Kegiatan	245	4 Kegiatan	260	4 Kegiatan	275	4 Kegiatan	Kecamatan Kualuh Hulu
PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terseleng garanya urusan pemerinta han umum di kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	172	5 Kegiatan	207	5 Kegiatan	227	5 Kegiatan	377	5 Kegiatan	277	5 Kegiatan	Kecamatan Kualuh Leidong
PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terseleng garanya urusan pemerinta han umum di kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	195,30	5 Kegiatan	214,82	5 Kegiatan	236,31	5 Kegiatan	259,94	5 Kegiatan	285,93	5 Kegiatan	Kecamatan Kualuh Selatan

PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terseleng garanya urusan pemerinta han umum di kecamatan	5 Kegitatan	5 Kegitatan	375,18	5 Kegitatan	397,69	5 Kegitatan	421,55	5 Kegitatan	485,44	5 Kegitatan	514,57	5 Kegitatan	Kecamatan Marbau
PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Terseleng garanya urusan pemerinta han umum di kecamatan	5 Kegitatan	5 Kegitatan	65,86	5 Kegitatan	69,81	5 Kegitatan	74,0	5 Kegitatan	182,12	5 Kegitatan	193,06	5 Kegitatan	Kecamatan Na IX-X
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Tersusun nya APBD desa	11 Desa	11 Desa	1	11 Desa	1	11 Desa	1	11 Desa	1	11 Desa	1	11 Desa	Kecamatan Kualuh Hulu
PROGRAM PELESTARIA N KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangu nan Literasi Masyarak at	0%	35%	30	38%	20	43%	25	45%	50	50%	70	50%	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan
PROGRAM PENDAFTAR AN PENDUDUK	cakupan penerbita n Kartu Keluarga	114.032 Dokume n	10.400 Dokumen	350,6	10.600 Dokumen	443,1	10.900 Dokumen	465,3	11.100 Dokumen	488,5	11.300 Dokumen	512,9	168.332 Dokumen	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	cakupan penerbitan akta kelahiran	186.385 Dokumen	21.000 Dokumen	257,8	22.000 Dokumen	370,8	24.000 Dokumen	392,3	25.000 Dokumen	364,7	26.000 Dokumen	382,9	304.385 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	cakupan penerbitan Akta Perkawinan	23.104 Dokumen	1500 Dokumen		1700 Dokumen		1800 Dokumen		2000 Dokumen		1900 Dokumen		32.004 Dokumen	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)	264.559 Dokumen	20.000 Dokumen	789,4	21.000 Dokumen	1.081	23.000 Dokumen	1.179,9	24.000 Dokumen	1.249,9	25.000 Dokumen	1.221,2	377.559 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	0,9	0,91		0,92		0,94		0,95		0,96		0,96	
	rasio bayi berakte kelahiran	0,87	0,88		0,89		0,91		0,92		0,93		0,93	
	rasio pasangan berakte nikah	0,3	0,33		0,35		0,38		0,4		0,45		0,46	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	0,73%	0,73%	440	0,82%	330	0,93%	665	1,07%	700	1,16%	845	1,16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Strategi : 2.4.4. Perluasan data dan Informasi Publik Melalui Media Elektronik dan Non Elektronik														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksanaan Program Pengelola Informasi Komunikasi Publik	3 Media	3 Media	1	3 Media	1.265	3 Media	1.454,7	3 Media	1.672,9	3 Media	1.923,9	3 Media	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN														

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	ada	ada	47,5	ada	47,5	ada	47,5	ada	62,5	ada	62,5	ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	12 Bulan	12 Bulan	1.150	12 Bulan	1.322	12 Bulan	1.520,8	12 Bulan	1.749	12 Bulan	2.011	60 Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	12 Bulan	12 Bulan	900	12 Bulan	1.035	12 Bulan	1.190	12 Bulan	1.368	12 Bulan	1.574	60 Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran : 2.5. Tersediannya Rumusan Kebijakan Pembangunan														
Strategi : 2.5.1. Melaksanakan Penelitian Pengembangan Yang Berkualitas														
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Diimplemmentasikan Rencana kemitnngan dan Terfasilitasinya OPD Berinovasi	40% dan 100 %	50% dan 100%	400	60% dan 100%	685	70% dan 100%	556	80% dan 100%	440	90% dan 100%	938	90% dan 100%	Badan Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 2.6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah														
Strategi : 2.6.1. Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari PAD Sesuai Dengan Potensi Daerah														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDAPATAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pajak Terhadap PAD	75%	75%	3.027	78%	3.481	80%	4.003	82%	4.604	85%	5.644,5	85%	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Media pengelola an data dan informasi pelayanan perizinan yang tersedia	0 Media	5 Media	50	5 Media	80	5 Media	100	5 Media	120	5 Media	125	25 Media	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peraturan Yang Menduku ng Iklim Usaha	0 Peraturan	1 Peraturan	200	1 Peraturan	300	2 Peraturan	200	1 Peraturan	100	1 Peraturan	420	6 Peraturan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Strategi : 2.6.2. Pembentukan BUMD														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH														
PROGRAM PEREKONOM IAN DAN PEMBANGUN AN	Terlaksan anya Kegiatan Perekono mian Daerah dan Pembangu nan Daerah	100%	85%	1.330	87%	1.463	90%	1.609,3	92%	1.770,2	93%	1.947,2	93%	Sekretariat Daerah
Sasaran : 3.1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur														
Strategi : 3.1.1. Meningkatkan Kualitas Jalan Dan Jembatan Kondisi Baik														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN	Panjang Jalan yang terbangun	274,72 km	50 km	247.000,00	50 km	284.050,00	50 km	326.657,50	50 km	375.656,13	50 km	432.004,54	524,72 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Jembatan yang terbangun	5 Unit	5 Unit	50.000	5 Unit	57.500	5 Unit	66.125	5 Unit	76.043	5 Unit	87.450,3	30 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Strategi : 3.1.2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Jembatan Lingkungan Kondisi Baik														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														

Strategi : 3.1.3. Meningkatkan Kualitas Sarana Infrastruktur Irigasi														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	40%	50%	37.000	55%	42.550	60%	48.932,5	65%	56.272,3	70%	64.713,2	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Strategi : 3.1.4. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Serta Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase tersedianya layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)	100%	100%	160	100%	200	100%	397	100%	370	100%	460	100%	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlengkapan jalan	100%	100%	13.113,99	100%	13.330,05	100%	14.535,92	100%	15.481,72	100%	16.674,69	100%	Dinas Perhubungan
Strategi : 3.1.5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	5%	5%	250,00	10%	250,00	10%	250,00	10%	250,00	10%	250,00	50%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	20%	20%	20.950	20%	15.632	20%	15.632	20%	15.632	20%	15.632	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi : 3.1.6. Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Infrastruktur														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia jasa Kontruksi memenuhi standar kualifikasi	100%	100%	8.700	100%	10.005	100%	11.505,7	100%	13.231,6	100%	15.216,3	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 3.2. Tersedianya Air Minum dan Sanitasi														
Strategi : 3.2.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat tentang Air Bersih dan Sanitasi														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	20%	20%	2.275,00	20%	2.245,00	20%	2.275,00	20%	2.245,00	20%	2.275,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Strategi : 3.2.2. Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Akses Dan Kualitas Air Minum														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Strategi : 3.2.3. Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Akses dan Kualitas Sanitasi														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelola an dan Pengemban gan Sistem Drainase	10%	10%	775	10%	475	10%	475	10%	475	10%	475	60%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 3.3. Tersedianya Perumahan Permukiman Yang Tertata														
Strategi : 3.3.1. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang tertata	0,5%	1%	14.131,3	1,5%	19.155	2%	22.155	5%	26.155	10%	30.155	20%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten atau Relokasi Program Kabupaten Yang Diperoleh Rumah Layak Huni	20%	10%	1.600	10%	1.840	10%	1.835	10%	1.845	10%	1.225	70%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1%	5%	22.010	5%	25.512	5%	27.012	5%	31.312,4	5%	33.012	26%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan Yang Terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	2%	5%	9.070	5%	8.350	5%	10.370	5%	5.370	5%	5.828,9	27%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, , KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, , Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0%	3%	25	3%	25	5%	25	5%	25	5%	25	21%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran : 3.4. Meningkatkan Penataan Ruang														
Strategi : 3.4.1. Penataan dan Pemanfaatan Tata Ruang														
Strategi : 3.4.2. Pengendalian Tata Ruang														
Strategi : 3.4.3. Pemanfaatan dan Pengendalian Fungsi Ruang Terbuka Hijau														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Tata Ruang	30%	35%	5.900,00	40%	6.785,00	45%	7.802,75	50%	8.973,16	55%	10.319,14	55%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 3.5. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Kabupaten														
Strategi : 3.5.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Kualitas Penanganan Sampah Yang dihasilkan Masyarakat														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Sampah	78%	78%	4.520	78.50%	4.455	79%	4.540	80%	4.795	82%	5.455	85%	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Pembangunan sistem Pengelolaan Persampahan regional	0	0	200	1 Unit	5.000	1 Unit	5.000	0	0	1 Unit	5.000	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran : 3.6. Meningkatnya Ketersediaan tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat														
Strategi : 3.6.1. Meningkatkan Ketersediaan Tanah Untuk Program Prioritas Pembangunan Daerah														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelola an Izin Lokasi	2%	2%	30	5%	30	5%	30	5%	30	5%	30	24%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santuan Tanah Untuk Pembangunan	2%	1%	1.900	1%	3.788	1%	2.194	1%	1.500	1%	1.500	7%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Strategi : 3.6.2. Menyelesaikan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Pertanahan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah Yang Terlaksana	1%	2%	150	3%	90	5%	90	5%	90	5%	90	21%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	1%	5%	10	0%	0	5%	10	0%	0	10%	10	20%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelola an Izin Membuka Tanah	1%	10%	90	10%	60	10%	60	10%	60	10%	60	50%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelola an Tanah Kosong	1%	10%	25	10%	25	10%	25	10%	25	10%	25	50%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	5%	5%	400	5%	400	5%	400	5%	400	5%	400	30%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1%	1%	35	0%	30	0%	30	1%	2.010	1%	2.010	4%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran : 3.7. Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan														
Strategi : 3.7.1. Peningkatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana														
Strategi : 3.7.2. Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana														
Strategi : 3.7.3. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
Strategi : 3.7.4. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana alam dan non alam	100%	100%	726,10	100%	690,10	100%	785,10	100%	849,54	100%	923,82	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sasaran : 3.8. Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman														
Strategi : 3.8.1. Peningkatan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pencegaha n, pengendal ian, pemadam an penyelam atan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	5.412,00	100%	5.775,80	100%	5.820,65	100%	6.482,50	100%	7.056,28	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
Sasaran : 4.1. Meningkatkan Ketahanan Pangan														
Strategi : 4.1.1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Dan Pertanian Lainnya														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Produktivi tas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar per tahun	5,57 ton/ha	5,58 ton/ha	1,673.61	6 ton/ha	1,736.96	6,02 ton/ha	1,754.00	6,03 ton/ha	1,844.00	6,05 ton/ha	1,889.00	6,05 ton/ha	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkat an penyediaa n prasarana pertanian dari tahun sebelumn ya	10%	10%	1,345.00	15%	1,645.00	20%	1,849.00	25%	2,722.00	50%	3,382.00	50%	Dinas Pertanian

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,05%	0.05%	577.00	0.10%	677.00	0.15%	847.00	0.20%	1,025.00	0.20%	1,025.00	0.20%	Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Kejadian/Kasus Bencana Pertanian Kabupaten Yang Terjadi Dan Ditanggulangi	NA	100%	85.00	100%	185.00	100%	185.00	100%	285.00	100%	385.00	100%	Dinas Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Pertanian	NA	70%	110.00	70%	160.00	75%	160.00	75%	220.00	75%	240.00	75%	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan bagi Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kelompok Tani	3 Kegiatan	6 kegiatan	1089.69	5 kegiatan	1,021.33	6 kegiatan	1,179.69	5 kegiatan	1080.00	6 kegiatan	1,329.25	6 kegiatan	Dinas Pertanian

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	13.341.085 kg	14.008.039 kg	535.00	14.708.341 kg	490.00	15.443.658 kg	762.00	16.215.741 kg	737.00	17.026.428 kg	917.00	17.026.428 kg	Dinas Pertanian
Strategi : 4.1.2. Peningkatan Diversifikasi dan Penguatan Cadangan Pangan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	183.45%	100%	610	100%	610	100%	610	100%	610	100%	610	100%	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Cadangan pangan	40 ton	100 ton	840	100 ton	840	100 ton	840	100 ton	840	100 ton	840	100 ton	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya Peta Kerentanan Ketahanan Pangan	NA	100%	210	100%	210	100%	210	100%	210	100%	210	100%	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	NA	20 Sertifikasi	190	30 Sertifikasi	190	40 Sertifikasi	190	50 Sertifikasi	190	50 Sertifikasi	190	50 Sertifikasi	Dinas Ketahanan Pangan
Strategi : 4.1.3. Peningkatan Produksi Perikanan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	635.768 kg	654.782 kg	537.00	674.365 kg	731.00	694.537 kg	857.00	715.313 kg	772.00	736.713 kg	992.00	736.713 kg	Dinas Pertanian

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Usaha Perikanan Tangkap dan Pembudidayaan yang diawasi	NA	NA	0.00	35 buah	50.00	40 buah	50.00	40 buah	50.00	45 buah	50.00	45 buah	Dinas Pertanian
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Difasilitasi	NA	40%	80.00	70%	175.00	70%	80.00	75%	175.00	75%	175.00	75%	Dinas Pertanian

Sasaran : 4.2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

Strategi : 4.2.1. Meningkatkan Dan Mengembangkan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Serta Penetapan Kawasan Industri Kabupaten

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Laporan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI dalam Siinas	0	4 Laporan	39,3	4 Laporan	59,3	4 Laporan	75,6	4 Laporan	93,1	4 Laporan	124,4	4 Laporan	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang terfasilitasi	0	16 Dokumen	34,4	18 Dokumen	37,4	20 Dokumen	40,4	22 Dokumen	44,4	24 Dokumen	48,4	24 Dokumen	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah	50%	60%	130	63%	150	65%	152	67%	184	70%	196	70%	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Strategi : 4.2.2. Pembinaan dan Perberdayaan Kampung KB

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK														
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,31%	1,25%	365,76	1,21%	410,76	1,19%	463,76	1,5%	618,76	1,1%	658,76	1,1%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Strategi : 4.2.3. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	20 Koperasi	0	0	2 Koperasi	10	2 Koperasi	18	2 Koperasi	19	2 Koperasi	19	28 Koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi Aktif	Koperasi	0 Koperasi	0	5 Koperasi	10,23	5 Koperasi	25	5 Koperasi	25	5 Koperasi	25	20 Koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi yang sehat	Koperasi	40 Koperasi	16,48	3 Koperasi	20	2 Koperasi	145	3 Koperasi	145	2 Koperasi	145	50 Koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi Aktif yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	140 Koperasi	Koperasi	0	Koperasi	0	2 Koperasi	40	3 Koperasi	40	2 koperasi	40	147 koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdaya kan dan diberikan perlindun gan	273 Koperasi	Koperasi	0	Koperasi	0	10 Koperasi	35	15 Koperasi	40	10 Koperasi	40	308 Koperasi	Dinas Perdaganga n dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAY AAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	peningkat an UMKM yang telah diberdaya kan	50%	60%	192	65%	202	70%	202	75%	202	80%	202	80%	Dinas Perdaganga n dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTAR AN PERUSAHAAN	Jumlah ijin rekomend asi yang diterbitka n	Rekomen dasi	Rekomend asi	0	Rekomen dasi	0	5 Rekomend asi	20	5 Rekomen dasi	20	5 Rekomen dasi	20	15 Rekomend asi	Dinas Perdaganga n dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG AN	Persentase penyediaa n sarana prasarana pasar rakyat	70%	70%	74,77	70%	74,9	70%	206,1	70%	424,97	70%	917,38	70%	Dinas Perdaganga n dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah pemantau an stabilitas harga di pasaran	1 laporan	1 laporan	712	2 laporan	712	2 laporan	712	2 laporan	712	2 laporan	712	10 laporan	Dinas Perdaganga n dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

[illegible]

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	12.954 Orang	13.650 Orang	116.5	15.000 Orang	120	16.500 Orang	100	18.150 Orang	160	20.000 Orang	140	20.000 Orang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah tenaga Kerja Pariwisata Yang Memiliki sertifikat Kompetensi	3 Orang	3 Orang	60	5 Orang	85	5 Orang	105	7 Orang	120	8 Orang	115	28 Orang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Strategi : 4.2.6. Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara Berkebangsaan	5%	5%	70	7%	230	7%	240	7%	352.7	8%	445,5	8%	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Strategi : 4.2.7. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Desa														
Sasaran : 4.3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup														
Strategi : 4.3.1. Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	59.6 Poin	198	61,3 Poin	342,7	62,1 Poin	490	62,7 Poin	600	64,6 Poin	570	64,6	Dinas Lingkungan Hidup
Strategi : 4.3.2. Melestarikan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kajian LH	0	1 Dokumen	100	2 Dokumen	250	4 Dokumen	400	3 Dokumen	300	1 dokumen	100	11 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
Strategi : 4.3.3. Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang dikelola	0	1 RTH	200	1 RTH	200	2 RTH	200	3 RTH	250	4 RTH	700	11 RTH	Dinas Lingkungan Hidup
Strategi : 4.3.4. Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Jumlah Usaha/ kegiatan yang Pengelolaan Limbah B3 nya sesuai dengan peraturan yang berlaku	85%	80%	20	85%	25	90%	70	90%	75	92%	80	92%	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0%	2%	300	3%	230	5%	230	5%	30	5%	30	20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Strategi : 4.3.5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	90%	85%	25	87%	30	88%	95	88%	110	90%	125	90%	Dinas Lingkungan Hidup
Strategi : 4.3.6. Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	100%	100%	10	100%	25	100%	40	100%	55	100%	60	100%	Dinas Lingkungan Hidup
Strategi : 4.3.7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Peserta yang mendapatkan penghargaan di Bidang LH	0 Peserta	0 Peserta	0	10 Peserta	20	10 Peserta	25	15 Peserta	50	20 Peserta	55	55 Peserta	Dinas Lingkungan Hidup
Strategi : 4.3.8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														

PROGRAM PENINGKAT AN PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHA N LINGKUNGA N HIDUP UNTUK MASYARAKA T	Terlaksan anya Pendidika n, Pelatihan dan Penyuluh an LH	0	3 Kegiatan	20	4 kegiatan	75	4 Kegiatan	110	4 Kegiatan	145	4 Kegiatan	200	19 Kegiatan	Dinas Lingkunga n Hidup
Sasaran : 4.4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif														
Strategi : 4.4.1. Mendorong dan Memfasilitasi OPD/Masyarakat untuk Berinovasi														
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	Diimplem entasikan nya Rencana kelitbanga n dan Terfasilita sinya OPD Berinovasi	40% dan 100 %	50% dan 100%	400	60% dan 100%	685	70% dan 100%	556	80% dan 100%	440	90% dan 100%	938	90% dan 100%	Badan Penelitian dan Pengemban gan
Sasaran : 5.1. Meningkatnya Nilai – Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan Masyarakat														
Strategi : 5.1.1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Karakter Keagamaan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH														
PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	Terlaksan anya Kegiatan Pemerinta han dan Kesejahter aan Rakvat	100%	85%	17.824,4	88%	18.715,6	90%	19.651,4	93%	20.646,7	94%	21.693,1	94%	Sekretariat Daerah
Strategi : 5.1.2. Meningkatkan Fungsi Lembaga Keagamaan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	85%	17.824,4	88%	18.715,6	90%	19.651,4	93%	20.646,7	94%	21.693,1	94%	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	46 Ormas	46 Ormas	100	46 Ormas	110	46 Ormas	121	46 Ormas	133	46 Ormas	146,4	46 Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Strategi : 5.1.3. Memberantas Narkoba dan Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah Ormas Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Mendapat pembinaan	14 Ormas	14 Ormas	100	14 Ormas	110	14 Ormas	121	14 Ormas	133	14 Ormas	146,4	14 Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran : 5.2. Meningkatkan Pelestarian Budaya														
Strategi : 5.2.1. Meningkatkan Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dan Penetapan Cagar Budaya	12 bulan	12 bulan	50	12 bulan	55	12 bulan	66,5	12 bulan	66,5	12 bulan	73,2	60 bulan	Dinas Pendidikan

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	160	1 kegiatan	176	1 kegiatan	193,6	1 kegiatan	212,9	1 kegiatan	234,2	5 kegiatan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Festival Seni dan Budaya Yang diselenggarakan	3 kegiatan	3 kegiatan	1.750	3 kegiatan	1.925	3 kegiatan	2.117,5	3 kegiatan	2.329,5	3 kegiatan	2.562,1	15 kegiatan	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	378	13 Kegiatan	415,8	14 Kegiatan	457,3	15 Kegiatan	503,1	16 Kegiatan	553,4	58 Kegiatan	Dinas Pendidikan
Sasaran : 5.3. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah														
Strategi : 5.3.1. Peningkatan Peran Partisipasi Pemilih														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah pembinaan Terhadap Partai politik	19 Parpol	19 Parpol	822,4	19 Parpol	904,7	19 Parpol	1.054,7	19 Parpol	1.154,2	19 Parpol	1.263,7	19 Parpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Strategi : 5.3.2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan Nasional Melalui Forum Strategis														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat (Etnis) Dalam Pemahaman Wawasan Kebangsaan	9 kali	9 kali	210,5	9 kali	231,5	9 kali	254,7	9 kali	280,1	9 kali	308,1	9 kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Yang Ditangani	100%	100%	100	100%	110	100%	121	100%	133,1	100%	146,4	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII**KINERJA PENYELENGGAARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Selain itu Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta dukungan terhadap pencapaian IKU dan IKK.

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan indikator makro pembangunan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Perubahan RPJMD ini dilakukan penataan ulang indikator kinerja beserta target-targetnya meliputi indikator makro daerah, IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU PD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK). Realisasi dan proyeksi indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

8.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten labuhanbatu Utara

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Terhadap PAD, Persentase Kelurahan/Desa Cepat Berkembang, Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB, Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan

nasional dan indikator kinerja makro pembangunan Sumatera Utara.

Proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Labuhanbatu Utara mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel 8.1 berikut :

8.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Utara

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Target IKU pemerintah daerah mulai Tahun 2021 sampai dengan 2026 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi COVID-19. IKU pemerintah daerah disajikan pada Tabel 8.2 sebagai berikut :

8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 - 2026. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut *cascading* yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (*impact*) sampai paling rendah (*output*). Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 8.3 sebagai berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode
		Satuan	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,61	71,73	71,86	71,98	72,08	72,17	72,26
2	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	Persen	90,47	90,725	90,98	91,235	91,49	91,745	92
3	Indeks Pembangunan Gender	persen	89,82	90,12	90,27	90,42	90,57	90,72	90,86
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,82	6,52	6,21	5,91	5,61	5,30	5,00
5	Sakip	Nilai	CC	CC	CC	B	B	BB	BB
6	Opini Atas Audit BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	B	B	B	A
8	Persentase Terhadap PAD	Persen	5,84%	6,80%	7,87%	8,93%	10%	11,07%	12,14%
9	Persentase Kelurahan/Desa Cepat Berkembang	Persen	63,41%	66,18%	68,94%	71,71%	74,47%	77,24%	80,00%
10	Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB	Persen	0,27	1,06	1,85	2,64	3,42	4,21	5,00
11	Indeks Gini	angka	0,262	0,259	0,255	0,251	0,247	0,244	0,240

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
		Satuan	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI									
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.27	1.06	1.85	2.64	3.42	4.21	5.00	Seluruh Perangkat Daerah
2	Indeks Gini	angka	0.262	0.259	0.255	0.251	0.247	0.244	0.240	Seluruh Perangkat Daerah
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL									
1	Persentase Kemiskinan	Persen	90,47	90,725	90,98	91,235	91,49	91,745	92	Seluruh Perangkat Daerah
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,61	71,73	71,86	71,98	72,08	72,17	72,26	Seluruh Perangkat Daerah
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	89,82	90,12	90,27	90,42	90,57	90,72	90,86	DPPPA
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persen	47.70	47.90	48.00	48.18	48.38	48.38	48.38	DPPPA
5	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.8	9.4	9.12	9.45	9.88	9.9	9.88	DINAS PENDIDIKAN
6	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.8	14.2	14.48	14.88	15.02	15.82	15.02	DINAS PENDIDIKAN
7	Angka Partisipasi Kasar (APK)									
	SD/MI/ Paket A	Persen	85	87	88	89	90	92	90	DINAS PENDIDIKAN
	SMP/MTs/Paket B	Persen	70	73	78	80	84	89	84	DINAS PENDIDIKAN
8	angka partisipasi murni (APM)									
	SD/MI/ Paket A	Persen	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	DINAS PENDIDIKAN
	SMP/MTs/Paket B	Persen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	DINAS PENDIDIKAN
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	angka	3.81	2.84	2.66	2.49	2.30	2.09	2.09	DISNAKER
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA									
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	DISPORA
2	Jumlah atlet berprestasi	Orang	50	50	55	60	65	65	345	DISPORA
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB									
B.1.1	PELAYANAN DASAR									
1	PENDIDIKAN									
	persentase pendidikan anak usia dini (PAUD)	persen	7	8	8	8	8	9	9	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Partisipasi sekolah (APS)									DINAS PENDIDIKAN
	SD/MI/ Paket A	angka	719.9	719.9	719.9	720	720	719.9	720	DINAS PENDIDIKAN
	SMP/MTs/Paket B	angka	842.2	842.2	842.2	842.2	842.2	842.2	842.2	DINAS PENDIDIKAN
	Angka putus sekolah									DINAS PENDIDIKAN
	SD/MI/ Paket A	angka	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	DINAS PENDIDIKAN
	SMP/MTs/Paket B	angka	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	DINAS PENDIDIKAN
	Angka melanjutkan AM dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	53	53	53	54	54	54	54	DINAS PENDIDIKAN
	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN
	guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	87	88	90	93	95	98	98	DINAS PENDIDIKAN
	persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	persen	49	48	47	46	45	44	43	DINAS PENDIDIKAN
	rasio guru/ murid sekolah dasar (SD/MI)	angka	619	669	679	689	699	789	809	DINAS PENDIDIKAN
	rasio guru/ murid sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	angka	662	712	732	742	747	767	797	DINAS PENDIDIKAN
	rasio guru/ murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI)	angka	6191	6306	6356	6406	6466	6496	6546	DINAS PENDIDIKAN
	rasio guru/ murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	angka	6617	6717	6787	6877	6977	7027	7077	DINAS PENDIDIKAN
	persentase sekolah PAUD	persen	80	82	84	86	88	90	92	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase sekolah SD/MI yang memiliki izin	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN
	persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki izin	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN
2	KESEHATAN									
	persentase capaian SPM (standart pelayanan Minimal) bidang kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100		DINKES
	jumlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang sesuai standar pelayanan kesehatan	orang	N/A	1050	1100	1150	1200	1250		DINKES
	Jumlah apotik dan jaringan yang memiliki izin	izin apotik dan jaringan	N/A	80	85	90	95	100		DINKES

	jumlah desa/kelurahan yang di fasilitasi untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat	desa/kelurahan	18	18	18	18	18	18		DINKES
	persentase capaian SPM (standart pelayanan Minimal) Rumah Sakit	persen	100	100	100	100	100	100		RSUD
	jumlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang sesuai standar pelayanan kesehatan	sertifikat	N/A	85	90	95	100	105		RSUD
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
3.1	PEKERJAAN UMUM									
	panjang jalan jembatan terbangun	meter	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	PUPR
	Ketersediaan bangunan umum	unit	2	2	2	2	2	2	2	PUPR
	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	persen	20	20	20	20	20	20	20	PUPR
	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persen	2	2	3	5	5	5	5	PUPR
3.2	PENATAAN RUANG									
	persentase kesesuaian dan ketaatan tata ruang	persen	50	50	60	70	80	90	90	PUPR
3.3	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	Rasio Rumah Layak Huni	pesen	5	5	5	5	5	5	5	PERKIM
	Rasio Permukiman Layak Huni	pesen	100	100	100	100	100	100	100	PERKIM
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	pesen	1	1	1	1	1	1	1	PERKIM
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	pesen	1	1	1	1	1	1	1	PERKIM
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	pesen	1	1	1	1	1	1	1	PERKIM
	Penyelesaian Izin Lokasi	pesen	1	1	1	1	1	1	1	PERKIM
4	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	Persentase Potensi gangguan/konflik yang teratasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP
	jumlah pembinaan terhadap kelompok masyarakat etnis dalam pemahaman wawasan kebangsaan	kali	9	9	9	9	9	9	9	KESBANGPOL
	jumlah pembinaan terhadap partai politik	parpol	11	11	11	11	11	11	11	KESBANGPOL
	jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	KESBANGPOL
	jumlah ormas bidang ekonomi, sosial budaya yang mendapat pembinaan	ormas	2	2	2	2	2	2	2	KESBANGPOL
	persentase potensi konflik yang ditangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
	persentase pelayanan, penanganan, penyelamatan, evakuasi kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	DAMKAR
	persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	DAMKAR
	persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di kelurahan / desa	persen	0	0	10	10	10	10	40	DAMKAR
	jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	desa	5	4	4	4	4	4	20	BPBD
	persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	persen	75,4	100	100	100	100	100	100	BPBD
5	SOSIAL									
	realisasi pengembangan kemampuan dan pemberdayaan SDM potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	persen	50	55	57	59	61	63	63	DINSOS
	persentase pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga migran korban tindak kekerasan	persen	0	100	100	100	100	100	100	DINSOS
	persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan memperoleh bantuan sosial	kegiatan	N/A	2	2	2	2	2	2	DINSOS
	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	kegiatan	N/A	1	1	1	1	1	1	DINSOS
	persentase korban bencana yang skala kabupaten yang mendapat bantuan sosial kebutuhan dasar	kegiatan	N/A	2	2	2	2	2	2	DINSOS
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR									
1	TENAGA KERJA									
	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	persen	N/A	75%	78%	80%	82%	85%	85%	DISNAKER

	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	persen	N/A	50%	55%	60%	65%	70%	70%	DISNAKER
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	Jumlah Lembaga Layanan anak yang terfasilitasi	Unit	1unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	DPPPA
	Updating Data terpilah gender dan anak (SIGA)	data	50%	50%	65%	70%	75%	80%	80%	DPPPA
	indeks kabupaten layak anak	sub kegiatan	N/A	2	2	1	1	1	7	DPPPA
	rasio KDRT	rasio	0.019	0.017	0.015	0.013	0.011	0.008	0.011	DPPPA
	persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	persen	100	100	100	100	100	100	100	DPPPA
3	PANGAN									
	PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	persen	183.45	100	100	100	100	100	100	HANPANG
	JUMLAH CADANGAN PANGAN	ton	40	100	100	100	100	100	100	HANPANG
	TERSEDIAANYA PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	persen	N/A	100	100	100	100	100	100	HANPANG
	SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	sertifikat	N/A	20	30	40	50	50	50	HANPANG
5	LINGKUNGAN HIDUP									
	indeks kualitas lingkungan hidup	poin	N/A	59.6	61.3	62.1	62.7	64.6	62.7	DLH
	persentase pengelolaan sampah yang ditangani	persen	78	78	78.50	79	80.00	82.00	84.00	DLH
	persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan	persen	98	85	87	88	88	90	88	DLH
	persentase pengaduan masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	100	DLH
	persentase ketaatan pengendalian limbah B3	persen	N/A	80	85	90	90	92	90	DLH
	jumlah terlaksananya pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	kegiatan	0	3	4	4	4	4	4	DLH
	jumlah peserta yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	peserta	0	0	10	10	15	20	20	DLH
	jumlah Ruang terbuka hijau yang dikelola	RTH	0	1	1	2	3	4	3	DLH
	Persentase Penurunan emisi gas rumah kaca	%	N/A	10	12	14	15	16	16	DLH
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	tingkat kepuasan masyarakat terhadap penatausahaan pendaftaran penduduk	persen	82	85	88	91	94	97	100	DISDUKCAPIL
	tingkat kepuasan masyarakat terhadap penatausahaan pencatatan sipil	persen	80	82	85	88	91	94	97	DISDUKCAPIL
	cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	persen	88	90	91.5	93	94.5	96	97	DISDUKCAPIL
	ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DISDUKCAPIL
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	terciptanya desa dan penyelenggara pemerintahan desa yang baik	desa	82	82	82	82	82	82	82	PMD
	Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	desa	82	82	82	82	82	82	82	PMD
	terciptanya desa yang tertata baik	desa	82	82	82	82	82	82	82	PMD
										PMD
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	1.31	1.25	1.21	1.19	1.5	1.1	1.1	DPPKB
	Rasio Aspektor KB	persen	88	89	90	91	92	93	93	DPPKB
	jumlah pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	kecamatan	8	8	8	8	8	8	8	DPPKB
9	PERHUBUNGAN									
	meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan perlengkapan keselamatan jalan (LLAJ)									
	rasio izin trayek	nilai	0	1	1	1	1	2	2	DISHUB
	persentase layanan angkutan darat	persen	N/A	45	46	47	48	50	50	DISHUB
	persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	0	0	20	20	20	25	25	DISHUB
	pemasangan rambu-rambu	persen	N/A	16	36	58	72	80	80	DISHUB

	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	nilai	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	DISHUB
	jumlah barang/orang yang terangkut angkutan umum	orang	N/A	152988	168360	184464	192150	217404	217404	DISHUB
	jumlah orang/ barang yang melalui dermaga/terminal per tahun	orang	N/A	104310	109800	117120	122976	124440	124440	DISHUB
	meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan perlengkapan keselamatan Pelayaran (ASDP)									DISHUB
	persentase layanan angkutan darat	persen	N/A	10	11	13	15	16	16	DISHUB
	jumlah orang/ barang yang melalui dermaga/terminal per tahun	orang	N/A	91500	120780	140910	161040	181170	181170	DISHUB
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	terlaksananya program pengelola informasi komunikasi publik	media	3	3	3	3	3	3	3	DISKOMINFO
	tersedianya program pengelola aplikasi informatika	OPD	40	40	40	40	40	40	40	DISKOMINFO
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi aktif	koperasi	N/A	5	5	5	5	5	5	DPKUKM
	Jumlah Koperasi yang Sehat	koperasi	40	45	50	50	50	50	50	DPKUKM
	Jumlah peserta yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	koperasi	142	142	142	142	142	142	142	DPKUKM
	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan diberikan perlindungan	koperasi	258	258	258	258	258	258	258	DPKUKM
	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	Sub kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	DPKUKM
12	PENANAMAN MODAL									
	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	B	B	B	B	B	B	B	DPMP2TSP
	Persentase Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	80	85	85	90	90	100	100	DPMP2TSP
	Nilai Investasi	Milyar	1	1	1	1	1	1	1	DPMP2TSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	0.57	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	DISPORA
	Jumlah Kwaran yang aktif	kwaran	8	8	8	8	8	8	40	DISPORA
14	KEBUDAYAAN									
	jumlah kesenian tradisional yang diselenggarakan	kegiatan	12	13	14	15	16	17	17	DISPORA
	jumlah pembinaan sejarah yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DISPORA
	pendaftaran objek diduga cagar budaya dan penetapan cagar budaya	kegiatan	13	16	19	22	25	27	27	DISPORA
15	KEARSIPAN									
	jumlah pengujung perpustakaan per tahun	persen	N/A	0.73	0.82	0.93	1.07	1.16	1.16	DISPERSIP
	jumlah naskah kuno yang diakuisisi// alih media (digitalisasi)/ terdaftar	item	N/A	4	5	5	5	5	5	DISPERSIP
	peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	10	10	10	10	10	10	10	DISPERSIP
	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya	arsip	10	10	10	10	10	10	10	DISPERSIP
	penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	izin	N/A	2	3	4	5	6	6	DISPERSIP
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
1	PARIWISATA									
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangs	persen	5	5	7	7	7	8	8	DISPORA
	Jumlah kunjungan wisata	orang	12,954	13,650	15,000	16,500	18,150	20,000	83,300	DISPORA
	Jumlah tenaga kerja parawisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	orang	3	3	5	5	7	8	28	DISPORA
2	PERTANIAN/ PERKEBUNAN									
	Pertanian									
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar per tahun	ton/HA	5,57	5,58	6.00	6,02	6,03	6,05	6,05	PERTANIAN
	Cakupan bina kelompok petani	%	5	8	10	10	10	10	48	PERTANIAN
	Perkebunan									PERTANIAN
	Produksi tanaman perkebunan masyarakat per hektar per tahun	ton	1,187,363,520	1,484,204,400	1,583,151,360	1,682,098,320	1,781,045,280	1,978,939,200	1,978,939,200	PERTANIAN

	Perikanan									
	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	kg	13,976,853	14,662,821	15,382,706	16,138,195	16,931,054	17,763,141	17,763,141	PERTANIAN
	Cakupan bina kelompok nelayan	%	15	20	20	20	25	25	25	PERTANIAN
3	PERDAGANGAN									
	Jumlah ijin rekomendasi yang diterbitkan	rekomendasi	-	5	5	5	5	5	5	DPKUKM
	Persentase Penyediaan Sarana dan prasarana pasar rakyat	persen	70	70	70	70	70	70	70	DPKUKM
	Jumlah pemantauan stabilitas harga di pasaran	laporan	1	2	2	2	2	2	2	DPKUKM
	Jumlah Promosi Produk Unggulan di dalam dan luar daerah	kali	4	4	4	4	4	4	4	DPKUKM
	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang/jasa	kali	3	3	3	3	3	3	3	DPKUKM
	Jumlah promosi pemasaran produk yang dilaksanakan di dalam negeri	kali	3	3	3	3	3	3	3	DPKUKM
4	PERINDUSTRIAN									
	Pertumbuhan Industri Kecil dan Mikro	Persen	10%	16%	19%	20%	20%	22%	22%	DISNAKER
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG									
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
	jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan di perbupkan	dokumen	2	2	2	2	3	3	2	BAPPEDA
	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	persen	70	75	75	80	85	90	90	BAPPEDA
2	KEUANGAN									
	Opini Atas Audit BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	Opini Atas Audit BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	Persentase Jumlah Aset Kabupaten Yang Terinventarisasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	BPKAD
3	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	5,73%	6,80%	7,87%	8,93%	10%	11,07%	12,14%	BAPENDA
4	KEPEGAWAIAN DAERAH									
	Indeks Profesional ASN	nilai	N/A	71	72	73	74	75	75	BKD
	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	N/A	8	11	13	15	15	15	BKD
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BALITBANG
	Implementasi rencana kelitbangan	persen	40%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	BALITBANG
6	PENGAWASAN									
	Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	persen	N/A	70	75	80	85	90	80	INSPEKTORAT
	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	persen	N/A	70	70	75	80	80	75	INSPEKTORAT
7	SEKRETARIAT DEWAN									
	tersedianya rencana kerja DPRD	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	SETWAN
	jumlah perda inisiatif DPRD	perda	6	7	7	7	7	7	7	SETWAN
8	SEKRETARIAT DAERAH									
	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	80	82	82	84	84	SETDAKAB
	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian dan pembangunan Daerah	%	95	95	95	95	95	95	95	SETDAKAB
	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan ra	%	90	90	92	92	93	94	94	SETDAKAB
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	PENATA RUANG									
	Ketaatan terhadap RTRW	persen	30	30	30	30	30	30	30	PUPR

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, top-down bottom-up, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, didalam proses pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara akan tercipta kerja sama yang diistilahkan dengan “kolaborasi” serta pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab pada setiap tingkat pemerintahan yang diistilahkan dengan “desentralisasi” dengan harapan seluruh stake holder pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara akan bekerja penuh rasa tanggungjawab dan kelak meraih hasilnya bersama, Mewujudkan “Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat Dengan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sejahtera Dan Religius”.

Dokumen ini juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh OPD dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 secara terpadu, sinergis dan konsisten dengan RPJMD Sumatera Utara dan RPJM Nasional pada lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 ditentukan oleh komitmen seluruh OPD di lingkungan pemerintahan

Kabupaten Labuhanbatu utara. Komitmen tersebut diwujudkan dengan sikap konsistensi OPD dalam mempedomani RPJMD ini dalam penyusunan Renstra OPD dan dijadikan acuan didalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang cerdas aparaturnya, sejahtera masyarakatnya, dan religious Kabupatennya, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2026. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

9.1.1 Masa Transisi Tahun 2020

Pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020. Dalam 2 (dua) dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, IKD tingkat dampak, dan IKD tingkat outcome tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen APBD Tahun 2021. Pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan sedangkan pada dokumen APBD 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Sumatera Utara akibat pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret tahun 2020. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 ini.

Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2022 sampai dengan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2026.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.

3. Prioritas pembangunan Kabupaten dilaksanakan setiap tahun. Sesuai diprioritaskan pada 11 (Sebelas) prioritas pembangunan yang menjadi program prioritas kepala daerah. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perdatentang RPJMD ini.
4. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
5. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
8. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.

9. Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD dan RKPD secara periodik.
10. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat,

Aek Kanopan, 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA

HENDRIYANTO SITORUS

9. Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD dan RKPD secara periodik.
10. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat,

Aek Kanopan,

2021

BUPATI LABUHANBATU UTARA

HENDRIYANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, --

ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002